



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KAJIAN TRIWULANAN
PERIODE NOVEMBER 2022**



LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

November 2022

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Penerbit :

PENGARAH

Heru Saptaji

PENANGGUNG JAWAB

Achmad Fauzi

TIM PENYUSUN

Halida Rizkina, Maulina Umi Rofiqoh, Reffi Marizka Dewi, Yohana Ariesta Amelia

KONTRIBUTOR

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI, dan Syariah

Unit Implementasi Kebijakan SP dan Pengawasan SPPUR

Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600

Fax : 0370-631793

E-mail : EKMONKPwBINTB@bi.go.id

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia;
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia

- Kejujuran dan Integritas (*Trust and Integrity*);
- Profesionalisme (*Professionalism*);
- Keunggulan (*Excellence*);
- Mengutamakan Kepentingan Umum (*Public Interest*); dan
- Koordinasi dan Kerja Sama Tim (*Coordination and Teamwork*) yang Berlandaskan Keluhuran Nilai-Nilai Agama (*Religion*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya buku “Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) edisi November 2022” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan asesmen perkembangan perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III 2022, serta prospek perekonomian di tahun 2022. Asesmen mencakup: perkembangan ekonomi makro daerah; keuangan pemerintah; inflasi; stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM; penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah; ketenagakerjaan dan kesejahteraan; serta prospek perekonomian daerah.

Secara ringkas, Perekonomian NTB pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan di triwulan laporan utamanya ditopang oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Pada sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi NTB didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Transportasi. Secara khusus, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan kinerja LU Konstruksi serta perlambatan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. Provinsi NTB pada triwulan III 2022 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy). Selanjutnya, stabilitas keuangan daerah relatif terjaga, kinerja sistem pembayaran mengalami peningkatan, serta ketenagakerjaan dan kesejahteraan menunjukkan adanya perbaikan kinerja.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi positif atas terbitnya publikasi ini, yaitu BPS, DJPB, BPKAD, OPD Tingkat Provinsi dan Kab/Kota, BUMN, Perbankan, serta asosiasi dan pelaku usaha. Kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan, pemerhati ekonomi, dan masyarakat yang membutuhkan. Masukan dan saran konstruktif kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Mataram, November 2022
**KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Heru Saptaji

INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

INDIKATOR	2019				2020				2021				2022		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
EKONOMI DAERAH															
PDRB - Harga konstan (Rp Miliar)	22.278	23.405	23.996	24.192	22.946	23.108	23.765	23.470	22.675	24.210	24.341	24.211	24.428	25.661	26.070
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.155	5.896	5.739	4.766	4.836	6.353	5.653	4.624	5.165	6.131	5.685	4.730	5.410	6.121	5.824
- Pertambangan dan Penggalian	3.354	2.692	2.876	4.086	3.998	3.977	4.060	4.571	4.047	3.968	4.053	4.513	4.823	4.925	5.012
- Industri Pengolahan	870	945	1.488	1.156	880	984	1.383	1.105	905	963	1.413	1.163	966	972	1.415
- Pengadaan Listrik, Gas	21	21	22	25	23	23	24	25	25	25	25	27	27	30	28
- Pengadaan Air	18	19	18	18	19	20	19	18	18	20	19	19	19	20	20
- Konstruksi	2.305	2.620	2.641	2.844	2.156	1.947	2.271	2.552	2.153	2.238	2.608	2.724	2.195	2.221	2.486
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.202	3.502	3.556	3.323	3.273	3.240	3.292	3.103	3.102	3.379	3.334	3.316	3.268	3.541	3.397
- Transportasi dan Pergudangan	1.548	1.754	1.684	1.608	1.606	736	1.037	1.149	1.162	1.175	1.045	1.242	1.336	1.377	1.322
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	342	375	438	419	382	154	269	324	291	254	252	347	351	343	350
- Informasi dan Komunikasi	577	579	598	609	609	682	682	683	684	696	697	711	714	717	716
- Jasa Keuangan	799	795	810	915	893	881	946	969	945	955	976	973	1.038	864	999
- Real Estate	712	736	734	750	743	743	725	751	745	766	742	754	760	783	784
- Jasa Perusahaan	43	44	42	44	45	40	41	42	41	42	41	44	45	45	44
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.159	1.242	1.117	1.341	1.210	1.224	1.225	1.342	1.165	1.368	1.211	1.344	1.180	1.348	1.309
- Jasa Pendidikan	1.126	1.130	1.131	1.186	1.163	1.131	1.131	1.185	1.152	1.153	1.177	1.205	1.170	1.221	1.222
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499	519	530	544	533	479	505	525	541	543	554	565	551	549	558
- Jasa lainnya	549	535	573	557	576	495	502	504	532	533	511	535	575	583	583
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	1.72	2.06	6.37	5.40	3.00	(1.26)	(0.96)	(2.99)	(1.18)	4.77	2.42	3.16	7.73	5.99	7.10
Pertumbuhan PDRB tanpa Sektor Pertambangan (yoy %)	2.29	4.14	6.23	6.17	0.04	(7.80)	(6.54)	(5.93)	(1.81)	5.79	3.08	4.09	5.12	2.32	3.55
FISKAL DAERAH (Provinsi + Kab/Kota)															
Realisasi Penerimaan Daerah (Rp Miliar)	4.407	9.938	14.995	20.584	3.995	8.855	14.990	19.786	4.064	7.664	13.931	20.064	4.914	6.581	14.339
Realisasi Belanja Daerah (Rp Miliar)	2.147	7.152	12.421	20.691	2.155	6.671	12.222	19.751	2.119	6.860	12.303	20.103	3.931	5.056	12.750
- Belanja Pegawai	1.193	3.502	5.457	7.631	1.252	3.297	5.280	7.364	1.332	3.768	5.451	7.613	1.958	2.241	5.603
- Belanja Barang	362	1.394	2.694	4.579	456	1.502	2.551	4.388	298	1.338	2.849	5.277	921	1.253	3.255
- Belanja Modal	98	494	1.572	4.041	160	189	1.318	2.620	120	430	1.095	2.756	394	298	1.720
- Belanja Bantuan Sosial	326	1.270	1.915	3.187	223	849	1.989	3.336	170	349	1.384	1.683	40	131	320
INFLASI															
Indeks Harga Konsumen	101.79	103.20	102.25	103.16	103.45	103.03	103.11	103.77	105.33	105.00	105.05	105.97	107.68	110.64	112.24
- Kota Mataram	101.74	103.12	102.00	102.87	103.09	102.81	102.77	103.47	105.09	104.76	104.80	105.83	107.66	110.54	112.17
- Kota Bima	101.97	103.50	103.13	104.17	104.69	104.34	104.32	104.84	106.19	105.85	105.97	106.49	107.76	110.98	112.48
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)	2.75	2.89	2.12	1.36	1.63	(0.17)	0.84	0.60	2.31	1.91	1.89	2.12	2.49	5.37	6.84
- Kota Mataram	3.53	3.73	2.74	2.12	1.34	(0.36)	0.75	0.58	2.44	1.96	1.97	2.28	2.46	5.52	7.04
- Kota Bima	2.92	3.08	2.26	1.53	2.67	0.50	1.15	0.64	1.86	1.76	1.58	1.57	2.63	4.85	6.14
STABILITAS SISTEM KEUANGAN															
Total Aset (Rp Miliar)	48.191	47.515	48.677	52.851	58.032	56.381	59.202	60.216	60.443	62.049	62.284	63.345	64.804	66.461	63.345
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	30.449	30.208	30.006	31.111	30.457	30.893	32.361	33.364	34.668	36.131	34.312	35.410	37.198	41.084	41.089
- Giro (%)	20.36	22.00	19.18	19.18	18.04	17.42	19.62	16.25	25.30	23.99	7.658	7.005.13	9.746.63	12.380.95	12.005.33
- Tabungan (%)	55.94	54.39	53.48	53.48	51.74	53.06	53.09	55.30	48.11	50.48	17.608	18.644.02	17.286.36	18.870.49	19.203.52
- Deposito (%)	23.70	23.61	27.34	27.34	30.22	29.51	27.29	28.46	26.60	25.53	9.047	9.761.01	10.165.11	9.832.93	9.880.12
Kredit (Rp Miliar) - berdasarkan lokasi proyek	52.274	53.973	55.258	57.736	61.973	64.500	67.793	67.478	69.265	70.019	58.868	70.468	70.996	74.257	74.491
- Modal Kerja	13.704	14.026	14.912	16.980	16.104	21.342	23.465	23.784	24.902	25.159	19.390	25.521	25.230	27.565	28.080
- Investasi	17.894	18.896	19.013	18.657	23.927	21.379	22.087	21.106	21.471	21.278	15.524	20.695	20.966	21.415	20.367
- Konsumsi	20.677	21.051	21.333	22.100	21.942	21.778	22.241	22.588	22.893	23.583	23.954	24.252	24.800	25.277	26.044
Total Kredit UMKM (Rp Miliar)	13.084	13.539	14.052	14.398	14.949	14.687	15.259	15.847	15.982	16.381	16.649	17.327	17.362	17.835	18.949
Loan to Deposit Ratio (%)	129.08	132.62	137.52	144.76	165.66	156.88	154.94	151.90	149.63	145.52	154.70	151.64	146.25	135.77	137.60
NPL (%)	1.30	1.35	1.36	1.06	1.06	1.12	1.02	1.03	0.99	1.12	1.27	1.37	1.54	1.65	1.84
SISTEM PEMBAYARAN															
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	971.70	265.33	5.582.23	6.305.85	6.783.66	7.203.87	7.563.85	10.011.95	6.875.02	7.843.07	6.988.54	7.202.20	7.446.49	6.921.21	8.135.29
Volume Transaksi RTGS (lembar)	1.049	325	4.382	4.356	4.014	4.124	4.729	5.449	4.719	4.959	4.960	5.570	4.468	4.686	4.584
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	17.99	4.91	103.37	116.78	125.62	133.41	140.07	185.41	127.32	145.24	129.42	133.37	137.90	128.17	150.65
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (ribu lembar)	19.43	6.02	81.15	80.67	74.33	76.37	87.57	100.91	87.39	91.83	91.85	103.15	82.74	86.78	84.89
Nominal Kliring (Rp miliar)	2.379.45	2.531.08	3.057.04	3.863.13	3.020.61	2.513.07	3.019.21	3.293.02	2.710.50	2.930.21	2.970.75	3.509.79	3.379.71	3.504.40	3.419.50
Volume Kliring (ribu lembar)	55.34	59.29	67.57	77.92	58.77	57.83	63.61	70.94	53.05	63.62	61.10	76.17	65.23	70.67	70.05
Rata-rata Harian Nominal Kliring (Rp miliar)	44.06	46.87	56.61	71.54	55.94	46.54	55.91	60.98	50.19	54.26	55.01	65.00	62.59	64.90	63.32
Rata-rata Harian Volume Kliring (lembar)	1.02	1.10	1.25	1.44	1.09	1.07	1.18	1.31	0.98	1.18	1.13	1.41	1.21	1.31	1.30
KESEJAHTERAAN															
Nilai Tukar Petani	102.31	101.65	105.13	106.87	107.55	105.83	106.86	108.96	108.45	106.51	107.12	106.27	106.62	104.95	104.97
Tingkat Pengangguran Terbuka (% , Feb-Ags)	3.27	3.27	3.42	3.42	3.14	3.14	4.22	4.22	3.97	3.97	3.01	3.92	3.92	3.92	2.89
Tingkat Kemiskinan (% , Mar-Sept)	14.57	14.57	14.57	13.88	13.88	13.97	13.97	14.23	14.23	14.14	14.14	13.83	13.83	13.68	13.68
Gini Rasio (% , Mar-Sept)	0.379	0.379	0.374	0.374	0.376	0.376	0.376	0.386	0.386	0.381	0.381	0.384	0.384	0.373	0.373

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	xvii
BAB 1 PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH	20
1.1 KONDISI UMUM.....	20
1.2 SISI PENGELUARAN	21
1.2.1 Konsumsi.....	22
1.2.2 PMTB / Investasi	25
1.2.3 Ekspor dan Impor	26
1.3 SISI LAPANGAN USAHA	29
1.3.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31
1.3.2 Pertambangan dan Penggalian	32
1.3.3 Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor.....	33
1.3.4 Konstruksi.....	34
1.3.5 Transportasi dan Pergudangan	36
BOKS 1 : Sarang Burung Walet Menjadi Salah Satu Unggulan Untuk Dorong Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	40
BAB 2 KEUANGAN PEMERINTAH	42
2.1 PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH NTB	43
2.2 APBD PROVINSI NTB TAHUN 2022.....	45
2.2.1 Risiko Fiskal dari Pendapatan Pemerintah Daerah	45
2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi NTB	47
2.3 APBD 10 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB TAHUN 2022	49
2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota NTB.....	50
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota NTB	51
2.4 APBN DI PROVINSI NTB TAHUN 2022.....	53
2.4.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan APBN di Provinsi NTB	53
2.4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi NTB	54

2.5	RISIKO FISKAL PEMERINTAH DAERAH	55
2.5.1	Risiko Fiskal dari Pendapatan Pemerintah Daerah	55
2.5.2	Risiko Fiskal dari Belanja Pemerintah Daerah	57
BAB 3 INFLASI		61
3.1	KONDISI UMUM.....	61
3.2	INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA	63
3.2.1	Makanan, Minuman dan Tembakau	63
3.2.2	Pakaian dan Alas Kaki	66
3.2.3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	66
3.2.4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.....	67
3.2.5	Kesehatan.....	68
3.2.6	Transportasi	69
3.2.7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	71
3.2.8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya.....	72
3.2.9	Pendidikan.....	73
3.2.10	Penyediaan Makan dan Minuman/Restoran.....	74
3.2.11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	75
3.3	Inflasi Triwulanan	76
3.4	INFLASI SPASIAL.....	77
3.5	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	78
3.6	TRACKING INFLASI TRIWULAN IV 2022.....	81
BOKS 2 : Kolaborasi Bank Indonesia dan TPID Dalam GNPIP.....		83
BAB 4 STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM		84
4.1	ASESMEN LEMBAGA KEUANGAN.....	86
4.1.1	Kondisi Umum	86
4.1.2	Dana Pihak Ketiga (DPK).....	88

4.1.3	Perkembangan Penyaluran Kredit	89
4.1.4	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	91
4.2	ASESMEN KETAHANAN KORPORASI	91
4.2.1	Kondisi Rentabilitas dan Likuiditas Korporasi	91
4.2.2	Penyaluran Kredit Korporasi.....	93
4.3	ASESMEN KETAHANAN RUMAH TANGGA.....	96
4.3.1	Perkembangan Kondisi Rumah Tangga	96
4.4	PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	100
4.4.1	Kredit UMKM.....	100
4.4.2	Program Pengembangan UMKM	101
BOKS 3 Pelatihan Pewarnaan Alami Sebagai Pendorong Wastra Tenun NTB		104
BAB 5 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH		107
5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	107
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NON-TUNAI	110
BAB 6 KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN		116
6.1	KETENAGAKERJAAN	116
6.1.1	Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi NTB.....	116
6.1.2	Prospek Ketenagakerjaan Triwulan IV-2022	120
6.2	PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN PROVINSI NTB	120
6.2.1	Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi NTB.....	120
6.2.2	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.....	122
6.3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI NTB.....	123
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN		125
7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTB.....	126
7.2	PRAKIRAAN INFLASI PROVINSI NTB.....	134

Daftar Grafik

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB dan Nasional	22
Grafik 1.2 Pertumbuhan Komponen Utama PDRB NTB	22
Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen – Survei Konsumen Bank Indonesia	23
Grafik 1.4 Pertumbuhan PDRB Konsumsi RT	23
Grafik 1.5 Pertumbuhan Omset Survei Penjualan Eceran	23
Grafik 1.6 Kredit Konsumsi di Provinsi NTB	23
Grafik 1.7 Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTB	24
Grafik 1.8 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah	24
Grafik 1.9 Perkembangan PMTB	26
Grafik 1.10 Saldo Bersih Tertimbang Investasi	26
Grafik 1.11 Pertumbuhan PDRB Ekspor LN Provinsi NTB	27
Grafik 1.12 Perkembangan Harga Tembaga Global	27
Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Komoditas Tambang	27
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Non Tambang	27
Grafik 1.15 Tujuan Ekspor Komoditas Tambang	27
Grafik 1.16 Neraca Perdagangan Provinsi NTB	27
Grafik 1.17 Perkembangan PDRB Impor LN di Provinsi NTB	29
Grafik 1.18 Perkembangan Impor Menurut Penggunaan	29
Grafik 1.19 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi NTB	30
Grafik 1.20 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Utama Provinsi NTB	30
Grafik 1.21 PDRB Provinsi NTB Sektor Pertanian	31
Grafik 1.22 Perkembangan Produksi Jagung	31
Grafik 1.23 PDRB Provinsi NTB Sektor Pertambangan dan Penggalian	32
Grafik 1.24 Perbandingan Nilai Produksi Konsentrat Tembaga dibanding PDRB Pertambangan	32
Grafik 1.25 PDRB Provinsi NTB Sektor PBER	34
Grafik 1.26 Likert Scale Penjualan Domestik	34
Grafik 1.27 Perkembangan Nominal dan Volume Transaksi E-Commerce	34
Grafik 1.28 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan	34
Grafik 1.29 PDRB Provinsi NTB Sektor Konstruksi	35
Grafik 1.30 Perkembangan Kredit Sektor Konstruksi	35
Grafik 1.31 PDRB Provinsi NTB Sektor Transportasi dan Pergudangan	37
Grafik 1.32 Pertumbuhan Penumpang Pesawat Udara Provinsi NTB	37
Grafik 1.33 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut NTB	37
Grafik 1.34 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB	37
Grafik 1.35 PDRB Provinsi NTB Sektor Industri Pengolahan	38

Grafik 1.36 PDRB Provinsi NTB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38
Grafik 1.37 PDRB Provinsi NTB Sektor Pengadaan Air	38
Grafik 1.38 PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Keuangan	38
Grafik 1.39 PDRB Provinsi NTB Sektor Administrasi Pemerintahan.....	38
Grafik 1.40 PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Pendidikan.....	38
Grafik 1.41 PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39
Grafik 1.42 PDRB Provinsi NTB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	39
Grafik 1.43 PDRB Provinsi NTB Sektor Real Estate	39
Grafik 1.44 PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Perusahaan.....	39
Grafik 1.45 PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Lainnya.....	39
Grafik 1.46 PDRB Provinsi NTB Sektor Informasi dan Komunikasi.....	39
Grafik 2.1 Pagu Pendapatan Pemerintah Nusa Tenggara Barat	44
Grafik 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Nusa Tenggara Barat	44
Grafik 2.3 Pagu Belanja Pemerintah Nusa Tenggara Barat	45
Grafik 2.4 Realisasi Belanja Pemerintah Nusa Tenggara Barat	45
Grafik 2.5 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi NTB	46
Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	49
Grafik 2.7 Perkembangan Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di NTB	50
Grafik 2.8 Perkembangan Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota di NTB	50
Grafik 2.9 Perkembangan Pendapatan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB.....	51
Grafik 2.10 Perkembangan Belanja APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB	53
Grafik 2.11 Jumlah Komponen Anggaran Pendapatan APBN 2022.....	54
Grafik 2.12 Rasio Efektivitas Provinsi NTB Triwulan III 2022.....	56
Grafik 2.13 Rasio Kemandirian Provinsi NTB Triwulan III 2022.....	57
Grafik 2.14 Penyerapan Belanja Modal Kota/Kabupaten di Provinsi NTB Triwulan III 2022	59
Grafik 2.15 Penyerapan Belanja Pegawai Kota/Kabupaten di Provinsi NTB Triwulan III 2022	60
Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional.....	62
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Spasial	62
Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau	65
Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau	65
Grafik 3.5 Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras Provinsi NTB	65
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Komoditas Cabai Rawit Provinsi NTB.....	65
Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Komoditas Pakaian dan Alas Kaki.....	66
Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pakaian dan Alas Kaki	66
Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	67

Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	67
Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Komoditas Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	69
Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	69
Grafik 3.13 Perkembangan Mobilitas Masyarakat di tempat Ritel dan Rekreasi	69
Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Komoditas Kesehatan	69
Grafik 3.15 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Kesehatan.....	69
Grafik 3.16 Perkembangan Inflasi Komoditas Transportasi.....	71
Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Transportasi	71
Grafik 3.18 Pertumbuhan Penumpang Pesawat Bandara Internasional Lombok	71
Grafik 3.19 Perkembangan Tarif Tiket Pesawat	71
Grafik 3.20 Perkembangan Inflasi Komoditas Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	72
Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keu	72
Grafik 3.22 Perkembangan Inflasi Komoditas Rekreasi, Olahraga dan Budaya	73
Grafik 3.23 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	73
Grafik 3.24 Perkembangan Inflasi Komoditas Pendidikan	74
Grafik 3.25 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pendidikan.....	74
Grafik 3.26 Perkembangan Inflasi Komoditas Penyediaan Makan dan Minuman/Restoran	75
Grafik 3.28 Perkembangan Inflasi Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	76
Grafik 3.29 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	76
Grafik 3.30 Perkembangan Harga Emas Perhiasan.....	76
Grafik 3.31 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB.....	77
Grafik 3.32 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB Berdasarkan Komoditas.....	77
Grafik 3.33 Proyeksi Perkembangan Inflasi Tahunan Triwulan IV 2022 Provinsi NTB.....	83
Grafik 4.1 Perkembangan Nominal Aset, DPK, dan Kredit Bank Umum di Provinsi NTB.....	89
Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum di Provinsi NTB.....	89
Grafik 4.3 Proporsi DPK Secara Spasial Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.....	89
Grafik 4.4 Perkembangan Kredit, DPK, dan LDR Bank Umum di Prov. NTB	92
Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit di Prov. NTB	92
Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	92
Grafik 4.7 Proporsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	92
Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Perbankan Konvensional dan Syariah.....	92
Grafik 4.9 Perbandingan Perkembangan NPL dan LaR	92
Grafik 4.10 Perkembangan Kondisi Rentabilitas Korporasi Provinsi NTB	93

Grafik 4.11 Perkembangan Kondisi Likuiditas Korporasi Provinsi NTB.....	93
Grafik 4.12 Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Produktif	94
Grafik 4.13 Perkembangan NPL Lapangan Usaha Utama Provinsi NTB	95
Grafik 4.14 Perkembangan LaR Lapangan Usaha Utama Provinsi NTB.....	95
Grafik 4.15 Perkembangan Kredit yang Direstrukturisasi	96
Grafik 4.16 Pangsa Kredit Produktif yang Direstrukturisasi Berdasarkan Sektor/LU	96
Grafik 4.17 Perkembangan Rumah Tangga dalam Produk Domestik Regional Bruto Prov. NTB	97
Grafik 4.18 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	97
Grafik 4.19 Persepsi Rumah Tangga terhadap Ekonomi Saat Ini.....	98
Grafik 4.20 Persepsi Rumah Tangga terhadap Ekspektasi Ekonomi	98
Grafik 4.21 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	99
Grafik 4.22 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).....	99
Grafik 4.23 Rasio NPL Kredit Konsumsi.....	99
Grafik 4.24 Perkembangan Kredit Konsumsi.....	99
Grafik 4.25 Perkembangan Kredit UMKM	100
Grafik 4.26 Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan	100
Grafik 4.27 Perkembangan Restrukturisasi Kredit UMKM	101
Grafik 5.1 Perkembangan Nominal Inflow, Outflow, dan Net Outflow Uang Kartal	108
Grafik 5.2 Perkembangan Pengedaran Uang di Provinsi NTB	108
Grafik 5.3 Perkembangan Transaksi RTGS	111
Grafik 5.4 Perkembangan Transaksi Kliring.....	111
Grafik 5.5 Perkembangan Nominal Transaksi APMK di Provinsi NTB	113
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal dan Volume Transaksi Uang Elektronik di Provinsi NTB	113
Grafik 5.7 Perkembangan Merchant dan Pengguna QRIS di Provinsi NTB.....	113
Grafik 5.8 Perkembangan Merchant dan Pengguna QRIS di Provinsi NTB.....	113
Grafik 6.1 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Provinsi NTB.....	118
Grafik 6.2 Distribusi Tenaga Kerja per Sektor/LU	118
Grafik 6.3 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi NTB.....	118
Grafik 6.4 TPT Provinsi NTB Menurut Tempat Tinggal	118
Grafik 6.5 Perkembangan Pertumbuhan Indeks Job Vacancy Provinsi NTB	120
Grafik 6.6 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Provinsi NTB ...	120
Grafik 6.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB.....	121
Grafik 6.8 Persentase Distribusi Penduduk Miskin	121
Grafik 6.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB.....	121
Grafik 6.10 Pertumbuhan Indeks Yang Diterima dan Indeks Yang Dibayar	123
Grafik 6.11 Nilai Tukar Petani Provinsi NTB	123

Grafik 6.12 IPM Provinsi NTB dan Nasional	124
Grafik 6.13 Pertumbuhan IPM Provinsi NTB dan Nasional	124
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Prov. NTB Tahunan.....	124
Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi NTB	139

Daftar Tabel

Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTB Sisi Pengeluaran	21
Tabel 1.2 PDRB Provinsi NTB Sisi Lapangan usaha	30
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Triwulan III 2021 dan 2022	47
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Triwulan III 2021 dan 2022.....	48
Tabel 3.1 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi NTB pada Triwulan III 2022.....	63
Tabel 3.2 Ringkasan Perkembangan Inflasi Provinsi NTB	63
Tabel 3.3 Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pangan Provinsi NTB	65
Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Spasial per Kelompok Pengeluaran.....	78
Tabel 3.5 Langkah Pengendalian Inflasi Provinsi NTB	79
Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Bank Umum di Provinsi NTB	87
Tabel 4.2 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi di Provinsi NTB.....	94
Tabel 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral	101
Tabel 5.1 Inflow, Outflow, dan Net Flow Uang Per Pecahan (ribu lembar)	109
Tabel 5.2 Ketentuan Penurunan Tarif SKNBI	112
Tabel 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTB (ribu orang).....	117
Tabel 6.2 Perbandingan Kinerja Lapangan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	119
Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB	133

Daftar Gambar

Gambar Boks 1.1 Rantai Nilai Sarang Burung Walet dengan Pasar Ekspor	41
Gambar Boks 1.2 Jenis Sarang Burung Walet	42
Gambar Boks 2.1 Kick-Off Program GNPIP Bersama Gubernur Provinsi NTB Pada 17 Agustus 2022	86
Gambar Boks 2.2 Penyerahan simbolis bantuan bibit cabai kepada pengurus Ponpes Darul Lughah Watahfizh Sekarbela	86
Gambar Boks 2.3 Penyerahan Bibit Cabai oleh Deputi Gubernur Senior kepada Ponpes Thohir Yasin dan Nurul Islam	86
Gambar Boks 3.1 Hasil Perwarnaan Bahan Benang Wastra Tenun	108
Gambar Boks 3.2 Proses Pelatihan Pewarnaan Alami	108

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian NTB pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy).

Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi NTB mengalami peningkatan pada triwulan III 2022 yang tercermin dari peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja, masing-masing sebesar 7,29% (yoy) dan 0,51% (yoy).

Pada triwulan III 2022 Provinsi NTB secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,84% (yoy). Tekanan inflasi triwulan III 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy).

Perekonomian NTB pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan di triwulan laporan utamanya ditopang oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Pada sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi NTB didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Transportasi. Secara khusus, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan kinerja LU Konstruksi serta perlambatan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. Di luar LU Pertambangan, kinerja ekonomi Provinsi NTB triwulan III 2022 juga masih tercatat tumbuh 3,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,32% (yoy).

Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi NTB mengalami peningkatan pada triwulan III 2022 yang tercermin dari peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja, masing-masing sebesar 7,29% (yoy) dan 0,51% (yoy). Peningkatan realisasi pendapatan utamanya didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan APBN dan total APBD Kabupaten/Kota pada triwulan III 2022, di mana masing-masing tumbuh 26,83% (yoy) dan 6,48% (yoy). Peningkatan realisasi belanja utamanya didorong oleh realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota pada triwulan III 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 5,79% (yoy), sejalan dengan peningkatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Perkembangan Inflasi Daerah

Provinsi NTB pada triwulan III 2022 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi triwulan III 2022 utamanya dipengaruhi oleh kelompok Transportasi serta kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Sementara kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang menyumbangkan penurunan harga (deflasi) secara tahunan pada triwulan III 2022. Secara spasial, inflasi di Kota Mataram dan Kota Bima tercatat sebesar 7,04% (yoy) dan 6,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 5,52% (yoy) dan 4,85% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 diperkirakan berada di atas rentang target inflasi

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III 2022 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko tetap terjaga sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut.

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian di Provinsi NTB pada triwulan III 2022, permintaan terhadap uang kartal dan transaksi menggunakan pembayaran non-tunai di Provinsi NTB tercatat meningkat.

Kondisi ketenagakerjaan berdasarkan data Agustus 2022 mengalami perbaikan sejalan dengan peningkatan TPAK dan penurunan TPT

nasional yakni $3\pm 1\%$ (yoy) seiring dengan tren kenaikan harga energi dan komoditas global, serta adanya kebijakan penyesuaian tarif untuk sejumlah komoditas.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan

Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III 2022 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko tetap terjaga sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Penghimpunan DPK tercatat tumbuh 19,75% (yoy) pada triwulan III 2022, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 13,71% (yoy). Penyaluran kredit triwulan III 2022 tercatat tumbuh 26,54% (yoy), meningkat secara signifikan dibandingkan capaian pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang sebesar 6,05% (yoy). Sementara itu risiko kredit secara umum masih terjaga dengan Rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,84% dan Loan at Risk (LAR) pada triwulan III 2022 juga tercatat menurun menjadi sebesar 9,88% dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 10,67%. Adapun, kinerja penyaluran kredit UMKM triwulan III 2022 relatif melambat.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian di Provinsi NTB pada triwulan III 2022, permintaan terhadap uang kartal dan transaksi menggunakan pembayaran non-tunai di Provinsi NTB tercatat meningkat. Kondisi net outflow pada triwulan III 2022 yang sebesar Rp189 miliar. Nominal transaksi non-tunai (melalui RTGS dan kliring) triwulan III 2022 sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh sebesar 10,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,70% (yoy). Nilai transaksi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) mencapai Rp23,61 triliun atau tumbuh sebesar 26,58% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,04% (yoy). Nilai transaksi QRIS pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp52,26 miliar, meningkat 346,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB berdasarkan data Agustus 2022 mengalami perbaikan sejalan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK Agustus 2022 tercatat 70,93%, lebih tinggi

dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 70,57%. Sejalan dengan perbaikan TPAK, TPT tercatat mengalami penurunan dari 3,01% pada Agustus 2021 menjadi 2,89% pada Agustus 2022.

Kondisi kesejahteraan masyarakat NTB pada periode Maret 2022 tercatat membaik dibandingkan periode Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2022 tercatat sebanyak 731,94 ribu orang atau 13,68% dari total penduduk NTB. Angka ini menurun dibandingkan periode Maret 2021 yang tercatat sebanyak 746,66 ribu orang atau sebesar 14,14% dari total penduduk serta sudah sedikit membaik dibandingkan periode September 2019 (sebelum pandemi) yang tercatat sebesar 14,56%.

Prospek Perekonomian Daerah

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,4% – 7,2% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,30% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan perekonomian didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, serta Ekspor Luar Negeri (LN) yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh kenaikan ekspor konsentrat tembaga. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekpektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama, kecuali LU Konstruksi yang masih tertahan pasca penyelesaian sejumlah proyek strategis pada tahun 2021.

Selanjutnya tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021, serta lebih tinggi dari batas atas target inflasi nasional 3%±1% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan seiring dengan recovery ekonomi, kenaikan harga komoditas pangan dan kenaikan harga energi global. Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi terutama terjadi pada kelompok komoditas volatile foods (VF) dan kelompok administered prices (AP).

Kondisi kesejahteraan periode Maret 2022 tercatat membaik dibandingkan Maret 2021

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,4% - 7,2% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Tekanan Inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021, serta lebih tinggi dari batas atas target inflasi nasional 3% ± 1% (yoy).

BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Ekonomi NTB pada triwulan III 2022 tumbuh 7,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,99% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sejalan dengan kondisi perekonomian yang membaik seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilisasi masyarakat akibat relaksasi aturan dan kasus COVID-19 yang semakin terkendali. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan di triwulan laporan utamanya ditopang oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Pada sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi NTB didukung oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Transportasi. Secara khusus, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan kinerja LU Konstruksi serta perlambatan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. Di luar LU Pertambangan, kinerja ekonomi Provinsi NTB triwulan III 2022 juga masih tercatat tumbuh 3,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,32% (yoy).

1.1 KONDISI UMUM

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan III 2022 melanjutkan pertumbuhan positif sebesar 7,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh sebesar 5,99% (yoy). Peningkatan kinerja perekonomian Provinsi NTB sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional triwulan III 2022 yang juga tercatat tumbuh 5,72% (yoy). Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sejalan dengan kondisi perekonomian yang membaik seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilisasi masyarakat akibat relaksasi aturan dan kasus COVID-19 yang semakin terkendali. Keberhasilan Provinsi NTB untuk tetap meraih pencapaian positif ini tidak lepas dari berbagai upaya sinergi dan kolaborasi seluruh *stakeholders* daerah terkait dalam mendorong pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas ekonomi Provinsi NTB di tengah tantangan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2022 dicerminkan pada perbaikan baik dari sisi permintaan maupun sisi lapangan usaha. Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan di triwulan laporan utamanya ditopang oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Pada

sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi NTB didukung oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Transportasi. Secara khusus, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan kinerja LU Konstruksi serta perlambatan kinerja LU Pertambangan dan LU Perdagangan. Di luar LU Pertambangan, kinerja ekonomi Provinsi NTB triwulan III 2022 juga masih tercatat tumbuh 3,55% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,32% (yoy).

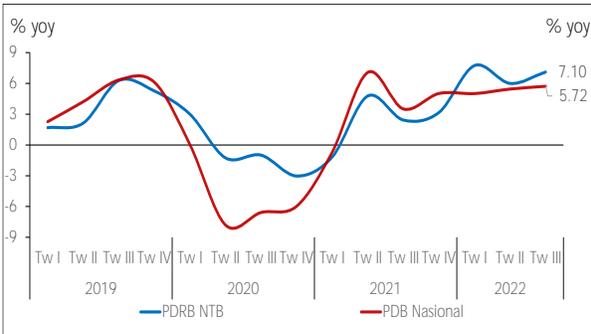
Realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB dengan perhitungan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada triwulan III 2022 mencapai Rp40,49 triliun. Dengan pencapaian realisasi tersebut, pangsa PDRB Provinsi NTB terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional tercatat sebesar 0,83%, relatif stabil dengan pangsa triwulan sebelumnya dan masih lebih rendah dari pangsa PDRB Provinsi Bali yang mencapai 1,28%.

1.2 SISI PENGELUARAN

Pada sisi pengeluaran, kinerja perekonomian ditopang oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah. Tren positif kinerja ekonomi sejalan didukung oleh pengendalian kasus COVID-19 yang semakin baik ditandai dengan melandainya kasus serta vaksinasi yang terus diperluas. Seiring dengan pencapaian ini pemerintah juga melakukan relaksasi kebijakan mobilisasi sehingga mendorong berjalannya aktivitas roda ekonomi masyarakat secara lebih masif serta peningkatan aktivitas pariwisata. Secara khusus, Ekspor Luar Negeri triwulan III 2022 juga masih mencatatkan pertumbuhan positif meskipun mengalami tren perlambatan dari triwulan sebelumnya yang dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas global serta kinerja produksi konsentrat tembaga yang sedikit melandai. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang lebih tinggi tertahan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang mengalami kontraksi pada triwulan III 2022 sejalan dengan telah diselesaikannya pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Sirkuit Mandalika, proyek-proyek di Bandara Internasional Lombok (BIL), serta jalan *by-pass* BIL-Mandalika pada tahun 2021.

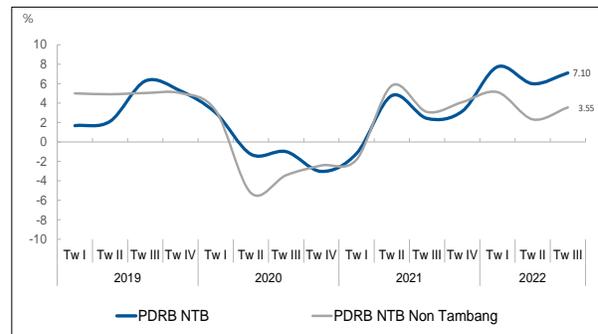
Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTB Sisi Pengeluaran

Komponen (ADHK, Rp Miliar)	Nominal ADHK (Rp Miliar)			Pangsa (%)	Pertumbuhan (% yoy)		
	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022		Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14,825.07	14,979.41	14,954.22	56.96%	4.06	3.10	4.34
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	391.42	396.25	400.36	1.57%	9.16	5.86	6.41
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,878.07	3,183.17	3,238.77	14.04%	2.14	-2.63	0.51
PMTB	7,570.72	7,396.94	7,841.75	34.33%	2.09	-0.58	-2.95
Perubahan Inventori	67.19	65.67	64.48	0.47%	-14.58	-4.96	-186.20
Ekspor Barang dan Jasa	4,046.08	5,787.75	5,449.48	26.43%	187.28	115.46	98.53
Impor Barang dan Jasa	427.82	427.22	386.47	1.62%	-8.47	31.71	24.53
Net Ekspor Antar Daerah	(4,922.31)	(5,721.21)	(5,493.05)	-32.2%	54.64	49.25	36.32
PDRB	24,428.43	25,660.76	26,069.53		7.73	5.99	7.10



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.1 Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

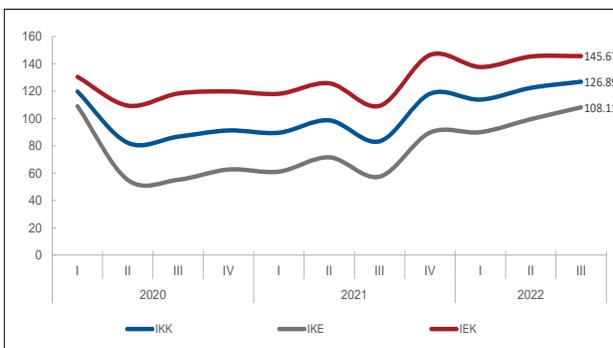
Grafik 1.1 Pertumbuhan Komponen Utama PDRB NTB

1.2.1 Konsumsi

Konsumsi Provinsi NTB secara agregat (Konsumsi Rumah Tangga + Pemerintah + LNPRT) pada triwulan III 2022 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II 2022. Konsumsi agregat pada triwulan III 2022 tumbuh sebesar 3,70% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,13% (yoy). Perbaikan kinerja konsumsi bersumber dari peningkatan seluruh komponen konsumsi, baik Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah maupun LNPRT. Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT pada triwulan III 2022 melanjutkan tren pertumbuhan positif dengan masing-masing tumbuh 4,34% (yoy) dan 6,41% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy) dan 5,86% (yoy). Sementara itu, Konsumsi Pemerintah triwulan III 2022 mengalami perbaikan dari triwulan II 2022 yang tercatat kontraksi 2,63% (yoy) menjadi tumbuh 0,51% (yoy) pada triwulan III 2022.

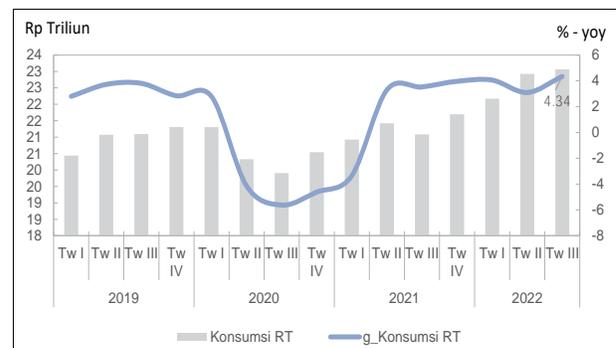
Perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan. Pada triwulan III 2022, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) meningkat menjadi 108,11 atau kembali pada level optimis setelah tercatat sebesar 99,44 pada triwulan II 2022. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada triwulan III 2022 bergerak ke level 145,67, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 145,33. Berbagai indikator positif ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan keyakinan konsumen untuk melakukan konsumsi, serta ekspektasi terhadap kondisi ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 126,89, semakin meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 122,39.

Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE), peningkatan konsumsi masyarakat di triwulan III 2022 terutama didorong oleh kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta transportasi dan komunikasi. Secara keseluruhan SPE triwulan III 2022 tumbuh 142,27% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 70,86% (yoy). Secara khusus, kenaikan omset terjadi pada kelompok perumahan dan perlengkapan rumah tangga sejalan dengan peningkatan pembelian barang tahan lama. Sementara itu, kenaikan omset kelompok transportasi dan komunikasi disumbang oleh kenaikan konsumsi pada bahan bakar kendaraan sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan oleh data *Google Mobility Report* yang secara rata-rata mencatat peningkatan pergerakan mobilitas sebesar 34,53% pada periode Juli hingga September 2022.



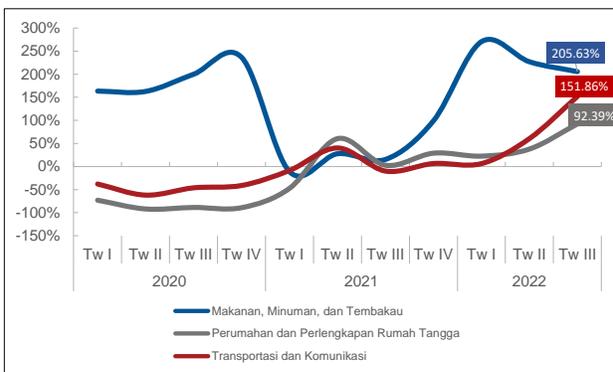
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2 Indeks Keyakinan Konsumen – Survei Konsumen Bank Indonesia



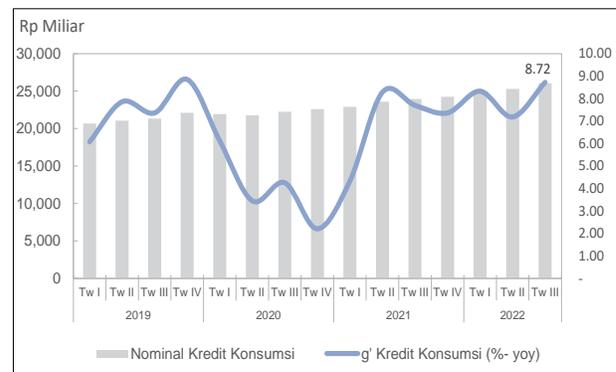
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Pertumbuhan PDRB Konsumsi RT



Sumber: SPE Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.4 Pertumbuhan Omset Survei Penjualan Eceran

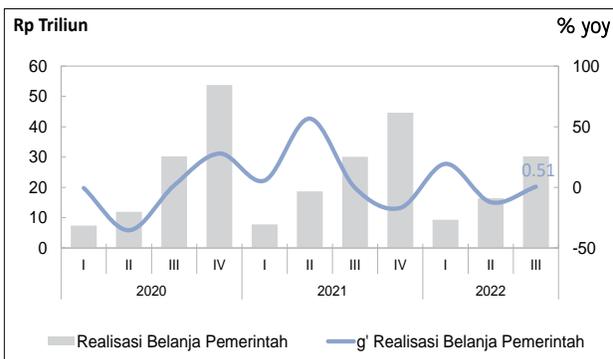


Sumber: Laporan Bank Umum Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5 Kredit Konsumsi di Provinsi NTB

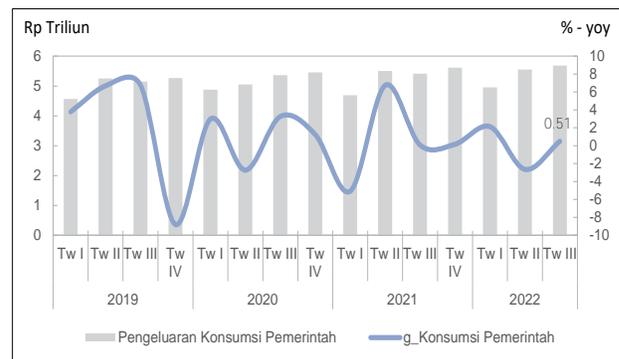
Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga ini juga tidak lepas dari berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah sampai dengan triwulan III 2022. Beberapa insentif yang diberikan antara lain adalah perpanjangan pemberian diskon PPnBM dengan skema 2% pada Juli-September, serta pelonggaran kebijakan LTV/FTV yang diperpanjang selama tahun 2022 diperkirakan terus memberikan dampak positif pada konsumsi masyarakat khususnya pada kendaraan bermotor. Dampak positif ini salah satunya dapat terindikasi dari peningkatan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) roda empat triwulan III 2022 yang tercatat tumbuh 4,82% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,85% (yoy). Secara keseluruhan kredit konsumsi juga tercatat tumbuh dari triwulan sebelumnya 7,19% (yoy) menjadi 8,72% (yoy) pada triwulan III 2022.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB yang tinggi di triwulan III 2022 turut didukung oleh peningkatan kinerja fiskal. Kinerja Konsumsi Pemerintah pada triwulan III 2022 tumbuh 0,51% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2,63% (yoy). Total belanja APBN dan APBD sampai dengan triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp30,23 Triliun atau mencapai 63,74% dari total pagu anggaran. Realisasi tersebut tercatat tumbuh 0,51% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 12,26% (yoy) yang mengindikasikan adanya upaya percepatan realisasi anggaran di triwulan III 2022 utamanya untuk belanja barang. Kenaikan aktivitas pemerintahan juga tercermin dari realisasi penggunaan listrik kantor pemerintah triwulan III 2022 yang tumbuh 9,72% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,45% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.6 Realisasi Belanja Pemerintah di Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

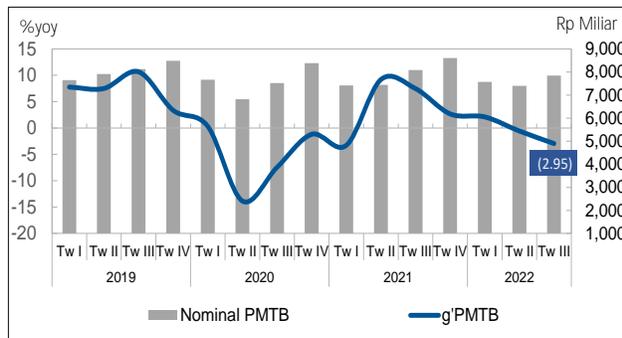
Grafik 1.7 Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah

1.2.2 PMTB / Investasi

Kinerja investasi Provinsi NTB yang dicerminkan oleh PMTB mengalami tren penurunan pada triwulan III 2022. PMTB mengalami penurunan yang lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi 0,58% (yoy) menjadi terkontraksi 2,95% (yoy) pada triwulan III 2022. Selain akibat faktor *base year effect* karena PMTB pada triwulan III 2021 telah tumbuh mencapai 7,45% (yoy), moderasi dari nilai investasi ini juga disebabkan dari beberapa proyek infrastruktur bernilai signifikan telah selesai, antara lain proyek pembangunan Sirkuit Mandalika dan infrastruktur pendukung di KEK Mandalika, perbaikan dan perluasan terminal Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan jalan *bypass* BIL – Mandalika serta konstruksi Bendungan Bintang Bano. Penurunan kinerja PMTB juga terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) kondisi investasi triwulan III 2022 yang tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya, dimana Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi dari 42,55% lebih rendah pada triwulan II 2022 menjadi 11,26% pada triwulan III 2022.

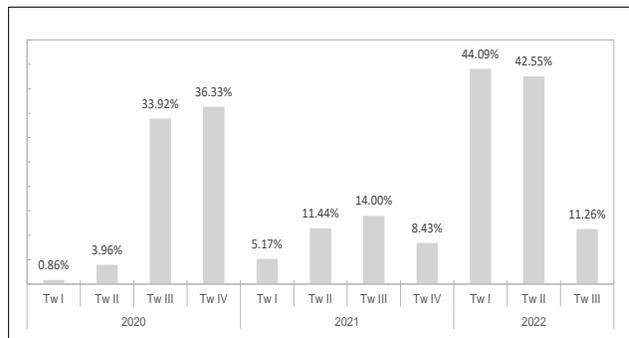
Perlambatan realisasi belanja modal APBN Provinsi NTB pada triwulan III 2022 turut menyumbang kontraksi PMTB lebih dalam. Realisasi belanja modal APBN Provinsi NTB sampai dengan triwulan triwulan III 2022 mencapai Rp1,76 Triliun, tercatat mengalami kontraksi 30,54% (yoy). Sebagian besar komponen belanja modal dalam bentuk Belanja Gedung dan Bangunan, serta Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Penurunan kinerja investasi yang lebih dalam relatif tertahan oleh masih berlanjutnya konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan-bendungan di Provinsi NTB, serta proyek Mandalika Urban Tourism Infrastructure Project (MUTIP) di KEK Mandalika. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) PSN bendungan yang masih berlanjut yaitu Bendungan Beringin Sila senilai Rp1,7 triliun yang ditargetkan selesai pada Desember 2022, Bendungan Tiu Suntuk senilai Rp1,2 Triliun yang ditargetkan selesai pada 2023 dan Bendungan Meninting senilai Rp1,4 triliun yang ditargetkan selesai pada 2024. Sementara untuk konstruksi MUTIP di KEK Mandalika dengan estimasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun telah memasuki masa konstruksi sejak tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023. Seiring dengan optimisme perbaikan kondisi ekonomi ke depan, sebagian pelaku usaha diperkirakan mulai meningkatkan realisasi investasi. Hal ini terkonfirmasi dari hasil *liaison*, di mana *Likert Scale* (LS) investasi pada triwulan III 2022 sebesar 1,00, meningkat dibandingkan LS triwulan II 2022 yang sebesar 0,71.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.8 Perkembangan PMTB



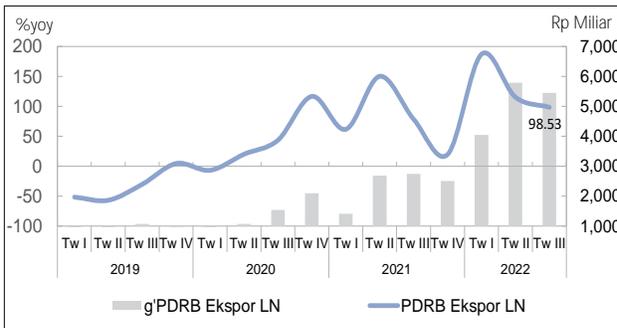
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.9 Saldo Bersih Tertimbang Investasi

1.2.3 Ekspor dan Impor

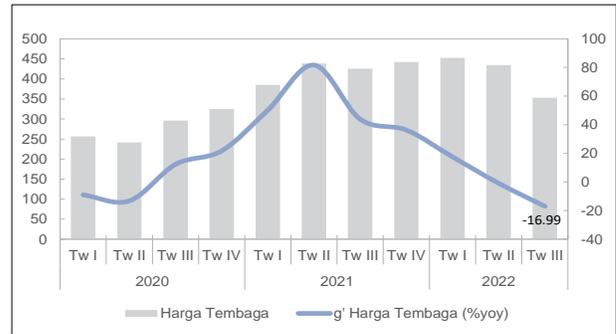
Kinerja ekspor-impor menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan positif perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III 2022. Pada triwulan III 2022 neraca perdagangan luar negeri Provinsi NTB mencatatkan surplus (ADHK) sebesar Rp5,06 Triliun, sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp5,36 Triliun. Moderasi nilai net ekspor terjadi seiring dengan penurunan capaian ekspor di tengah penurunan impor triwulan III 2022.

Pada triwulan III 2022 kinerja Ekspor Luar Negeri tumbuh sebesar 98,53% (yoy), masih melanjutkan tren positif meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 115,46% (yoy). Secara khusus, perlambatan terjadi seiring dengan penurunan realisasi ekspor komoditas tambang sebagai komoditas yang mendominasi pangsa ekspor Provinsi NTB yang juga terpantau tumbuh melambat dari tumbuh 186,91% (yoy) pada triwulan II 2022 menjadi 178,19% (yoy) di triwulan III 2022. Penurunan ekspor tambang sejalan dengan tren penurunan harga komoditas global terutama untuk komoditas tembaga yang terus berlanjut. Harga rata-rata tembaga global triwulan III 2022 tercatat sebesar \$351,95/pound atau terkontraksi 17,25% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,99% (yoy). Lebih lanjut, penurunan ekspor komoditas tambang turut dipengaruhi oleh kebijakan *zero-covid policy* Tiongkok yang menghambat operasional industri manufaktur yang berdampak pada penurunan permintaan bahan baku. Tren penurunan ekspor komoditas tambang ke Tiongkok mulai terjadi pada triwulan IV 2021 dan terus berlanjut hingga triwulan III 2022. Selain itu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat krisis pasokan global yang salah satunya disebabkan oleh ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina disinyalir turut menyumbang penurunan permintaan komoditas tembaga.



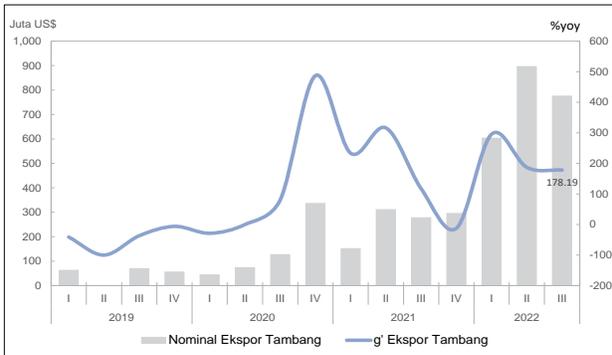
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.10 Pertumbuhan PDRB Ekspor LN Provinsi NTB



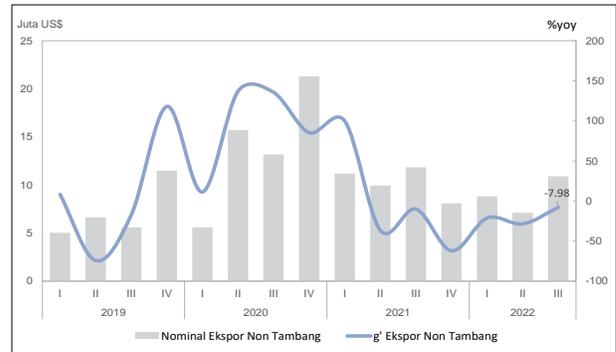
Sumber: LME, diolah

Grafik 1.11 Perkembangan Harga Tembaga Global



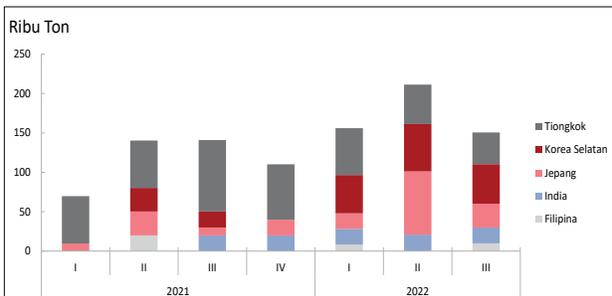
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Komoditas Tambang



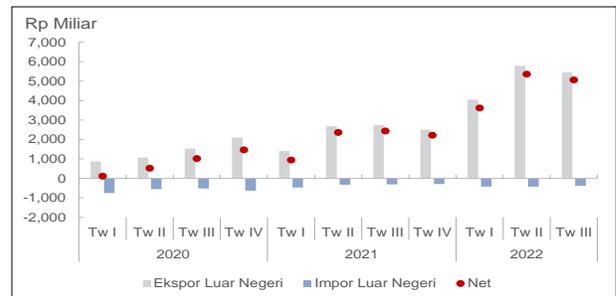
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Non Tambang



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.14 Tujuan Ekspor Komoditas Tambang



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.15 Neraca Perdagangan Provinsi NTB

Meski demikian, pada sepanjang tahun 2022 ekspor komoditas tembaga diprakirakan masih berpotensi meningkat sejalan dengan peningkatan kuota ekspor tembaga. Per Maret 2022, perusahaan tambang utama di NTB mendapatkan kuota ekspor sebesar 989.001 WMT, mengalami kenaikan 70,68% dibandingkan kuota ekspor tahun sebelumnya yang sebesar 579.444 WMT. Peningkatan kuota ekspor ini sejalan dengan meningkatnya target produksi konsentrat tembaga yang didukung oleh perbaikan *recovery rate*.

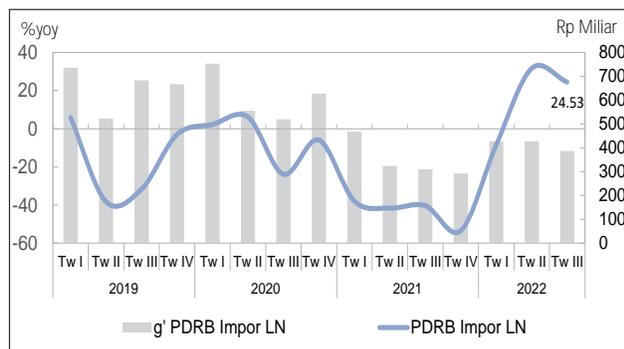
Meskipun mengalami perlambatan pada triwulan III 2022, tren kinerja positif ekspor relatif terjaga didukung oleh perbaikan ekspor komoditas non-tambang. Pada triwulan III 2022, nilai ekspor komoditas non tambang tercatat sebesar US\$10,91 juta atau tumbuh 28,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 21,19% (yoy). Perlambatan lebih lanjut juga relatif tertahan oleh volume muat barang di pelabuhan yang mengalami peningkatan kinerja. Volume muat barang pada triwulan III 2022 tumbuh 22,58% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 8,96% (yoy). *Likert Scale* (LS) kegiatan ekspor luar negeri dari hasil *liaison* Bank Indonesia Provinsi NTB pada triwulan III 2022 yaitu senilai 1,00, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

Impor Luar Negeri NTB tercatat menurun pada triwulan III 2022. Kinerja Impor Luar Negeri Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tumbuh 24,53% (yoy), menurun dibandingkan impor triwulan II 2022 yang tumbuh 31,71% (yoy). Penurunan impor dipengaruhi oleh menurunnya intensitas impor bahan baku dan bahan penolong serta barang-barang modal. Impor bahan baku dan bahan penolong yang sebagian besar berupa komoditas karet dan barang dari karet pada triwulan III 2022 tercatat \$41,16 juta atau tumbuh 40,66% (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 51,22% (yoy). Selanjutnya impor bahan penolong triwulan III 2022 berkontraksi lebih dalam 90,42% (yoy) dari yang sebelumnya berkontraksi 65,39% (yoy).

Penurunan intensitas aktivitas impor terkonfirmasi dari jumlah bongkar barang pelabuhan triwulan III 2022 yang tercatat berkontraksi 2,43% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,38% (yoy). Tendensi penurunan aktivitas impor diindikasikan akibat tidak terdapat realisasi kegiatan impor *raw cane sugar* sebagai bahan baku industri pengolahan produsen gula di Provinsi NTB selama triwulan III 2022. Berdasarkan informasi dari produsen gula utama di Kabupaten Dompu, kuota impor *raw cane sugar* meningkat dari 50 ribu ton pada tahun 2021 menjadi menjadi 100 ribu ton pada tahun 2022, namun sebagian besar sudah direalisasikan pada triwulan I dan triwulan II 2022. Sebagaimana historis, pada semester kedua tahun berjalan bahan

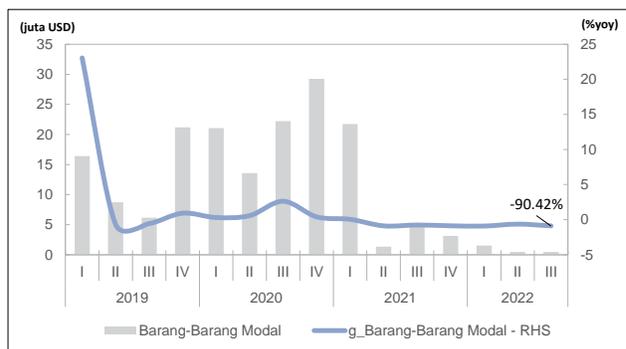
baku untuk industri gula lebih banyak dipenuhi dari lokal seiring dengan telah dimulainya panen tebu di Kabupaten Dompu.

Pada triwulan III 2022, net ekspor antar daerah Provinsi NTB mengalami perlambatan. Net ekspor NTB pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh 36,32% (yoy), tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 49,25% (yoy). Hal ini sejalan dengan terbatasnya produksi padi yang pada triwulan III 2022 yang tercatat berkontraksi 20,23% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 13,91% (yoy). Sebagai salah satu daerah dengan produksi pertanian yang cukup mendominasi, Provinsi NTB menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan konsumsi di daerah lain. Selain itu, produksi hortikultura seperti bawang merah dan cabai juga tercatat mengalami penurunan produksi sehingga menyebabkan penurunan pengiriman ke luar daerah. Lebih lanjut masih berlanjutnya wabah Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) di Provinsi NTB turut menahan aktivitas pengiriman hewan ternak ke luar daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, sampai dengan September 2022 tercatat sebanyak 100.899 ekor hewan ternak terjangkit PMK yang tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.16 Perkembangan PDRB Impor LN di Provinsi NTB



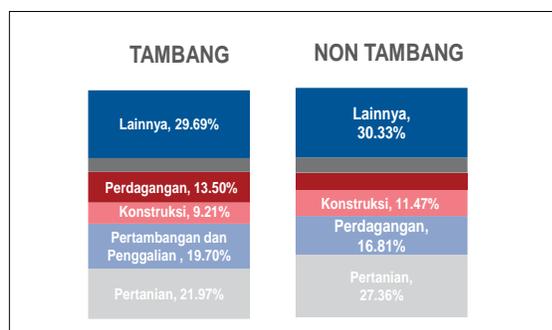
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Impor Menurut Penggunaan

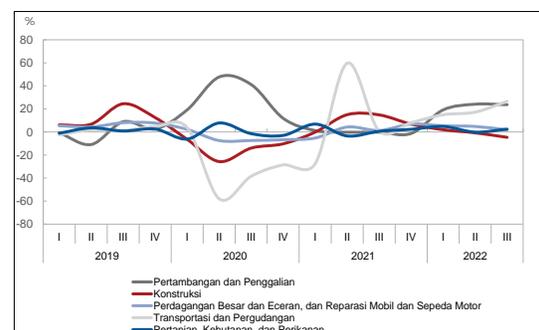
1.3 SISI LAPANGAN USAHA

Peningkatan perekonomian Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tercermin pada kinerja lapangan usaha (LU) yang menunjukkan perbaikan, terutama pada LU Pertanian serta LU Transportasi dan Pergudangan. Perbaikan kinerja LU Pertanian sejalan dengan kenaikan produksi tanaman pangan khususnya komoditas jagung. Sementara itu, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan yang

tumbuh signifikan sejalan dengan peningkatan intensitas mobilisasi masyarakat baik melalui transportasi udara maupun laut. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi relatif tertahan oleh perlambatan kinerja LU Pertambangan seiring dengan penurunan produksi tembaga, perlambatan LU Perdagangan seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditas yang mempengaruhi daya beli masyarakat, serta penurunan kinerja LU Konstruksi sejalan dengan *base effect* penyelesaian proyek strategis kawasan Mandalika di tahun 2021. Secara struktural, LU Pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Provinsi NTB dengan pangsa mencapai 21,97%. LU lainnya yang turut memberikan andil cukup besar yaitu LU Pertambangan dengan pangsa 19,70% dan LU Perdagangan sebesar 13,50%.



Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.18 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi NTB

Grafik 1.19 Pertumbuhan Sektor Ekonomi Utama Provinsi NTB

Tabel 1.2 PDRB Provinsi NTB Sisi Lapangan usaha

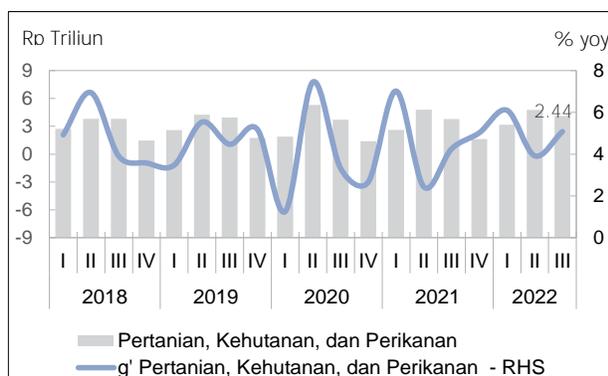
Lapangan Usaha (ADHK, Rp Milliar)	Tw II 2022	Tw III 2022	Kontribusi per Tw III 2022 (%)	Pertumbuhan (% yoy)		
				Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,121	5,824	21.97	4.74	-0.17	2.44
Pertambangan dan Penggalian	4,925	5,012	19.70	19.18	24.11	23.68
Industri Pengolahan	972	1,415	4.63	6.81	0.97	0.19
Pengadaan Listrik, Gas	30	28	0.08	5.30	16.37	12.94
Pengadaan Air	20	20	0.08	3.57	0.70	3.67
Konstruksi	2,221	2,486	9.21	1.96	-0.76	-4.68
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,541	3,397	13.50	5.37	4.80	1.88
Transportasi dan Pergudangan	1,377	1,322	5.33	14.91	17.18	26.53
Penyediaan Akomodasi dan Mamin	343	350	1.58	20.39	34.97	38.79
Informasi dan Komunikasi	717	716	2.00	4.41	3.02	2.73
Jasa Keuangan	864	999	4.23	9.75	-9.49	2.32
Real Estate	783	784	2.93	2.05	2.19	5.69
Jasa Perusahaan	45	44	0.16	8.64	7.21	8.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,348	1,309	5.93	1.28	-1.44	8.09
Jasa Pendidikan	1,221	1,222	4.78	1.59	5.90	3.90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	549	558	1.86	1.95	1.12	0.82
Jasa lainnya	583	583	2.02	8.04	9.28	14.22
PDRB	25,661	26,070	100	7.73	5.99	7.10
PDRB tanpa Tambang	23,592	24,430		5.12	2.32	3.55

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

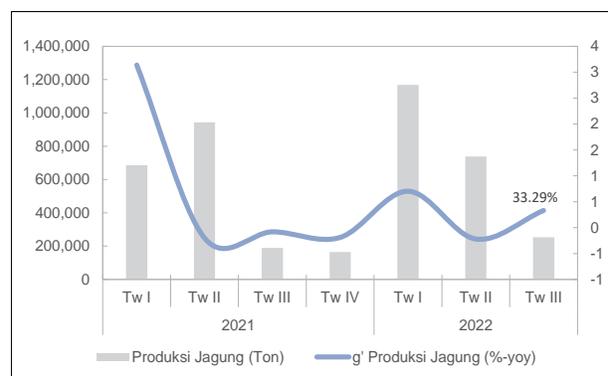
1.3.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Pada triwulan III 2022, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,44% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang berkontraksi 0,17% (yoy). Perbaikan kinerja ini didorong oleh peningkatan produksi tanaman pangan khususnya komoditas jagung yang pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh signifikan 33,29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 21,84% (yoy). Hasil panen jagung triwulan III 2022 tergolong optimal didukung oleh cuaca yang lebih kondusif sehingga mendukung produktivitas. Tanaman jagung relatif tahan pada kondisi tanah yang kering dan tidak terlalu membutuhkan pupuk atau perawatan yang intensif. Selain itu, tren kenaikan harga jagung turut menjadi faktor pendorong petani untuk beralih menanam komoditas jagung dibanding komoditas pertanian lainnya.

Pertumbuhan kinerja pertanian yang lebih tinggi relatif tertahan oleh penurunan produksi padi dan hortikultura. Produksi komoditas padi pada triwulan III 2022 berkontraksi 20,23% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan II 2022 yang berkontraksi 13,91% (yoy). Selanjutnya produksi komoditas bawang merah pada triwulan III 2022 juga tercatat mengalami penurunan dari 4,31% (yoy) pada triwulan II 2022 menjadi 1,50% (yoy) di triwulan III 2022. Kondisi yang sama juga terjadi untuk komoditas cabai rawit yang pada triwulan III 2022 hanya tumbuh 9,09% (yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai 24,06% (yoy).



Sumber: BPS, diolah



Sumber: Dinas Pertanian Prov NTB, diolah

Grafik 1.20 PDRB Provinsi NTB Sektor Pertanian

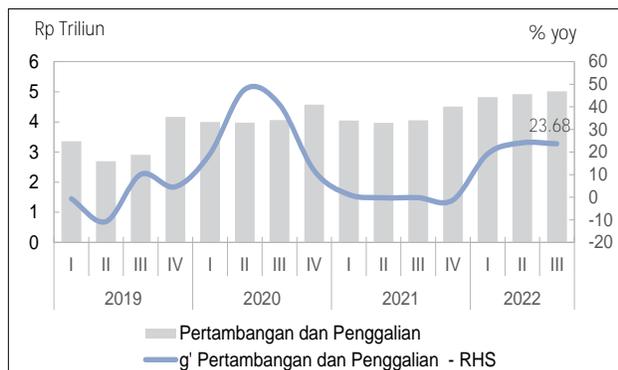
Grafik 1.21 Perkembangan Produksi Jagung

Ke depan, terdapat potensi peningkatan produktivitas pertanian sejalan dengan upaya optimalisasi pemanfaatan bendungan di Provinsi NTB. Pembangunan Bendungan Bintang Bano

(65,84 juta m³), bendungan terbesar dari sisi kapasitas tampung di NTB, telah selesai pada tahun 2021 dan berimplikasi pada peningkatan produktivitas pertanian ke depannya. Bendungan ini dapat mendukung penyediaan irigasi lahan pertanian seluas 6.700 hektar, meningkat dibandingkan sebelum bendungan dibangun yaitu 4.200 hektar dengan sistem tadah hujan. Diharapkan bendungan ini dapat mendorong penanaman padi 2 (dua) kali dalam setahun. Beberapa proyek bendungan lain adalah Bendungan Beringin Sila (27,46 juta m³) yang ditargetkan selesai di tahun 2022 serta Bendungan Tiu Suntuk (56 juta m³) dan Bendungan Meninting (12,18 juta m³) yang masih berjalan di tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023.

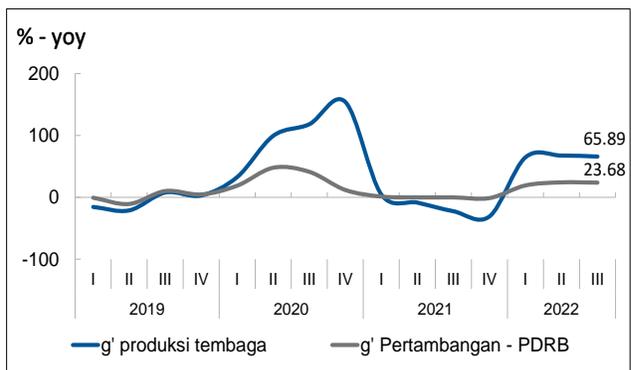
1.3.2 Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III 2022 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2022, LU Pertambangan dan Penggalian tercatat tumbuh 23,68% (yoy), sedikit melandai dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh 24,11% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan produksi konsentrat tembaga pada triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 65,89% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 67,49% (yoy). Berdasarkan hasil FGD dengan pelaku usaha terkait, realisasi produksi konsentrat tembaga triwulan III 2022 lebih rendah dari target sebelumnya yang dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas produksi yang masih dilakukan secara bertahap.



Sumber: BPS, dlolah

Grafik 1.22 PDRB Provinsi NTB Sektor Pertambangan dan Penggalian



Sumber: Perusahaan tambang, BPS, dlolah

Grafik 1.23 Perbandingan Nilai Produksi Konsentrat Tembaga dibanding PDRB Pertambangan

Perlambatan produksi konsentrat tembaga diindikasikan akibat penurunan permintaan global khususnya Tiongkok. Pada triwulan III 2022, jumlah ekspor konsentrat tembaga ke Tiongkok

sebanyak 40.124 ton atau berkontraksi 55,71% (yoy), mengalami tendensi menurun dibandingkan triwulan II dan triwulan I yang masing-masing mencapai 50.096 ton dan 59.439 ton. Penurunan permintaan Tiongkok sejalan dengan kebijakan *zero-covid policy* yang berdampak pada pembatasan operasional industri manufaktur sehingga permintaan bahan baku termasuk tembaga menjadi menurun. Akibat dari kondisi tersebut turut berkontribusi pada penurunan harga tembaga global pada triwulan III 2022 yang tercatat mengalami kontraksi 16,99% (yoy).

1.3.3 Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor

Pada triwulan III 2022, kinerja LU Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil (Perdagangan) mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,88% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh sebesar 4,80% (yoy). Perlambatan kinerja LU Perdagangan diindikasikan sejalan dengan kenaikan harga beberapa komoditas yang menahan daya beli masyarakat. Pada saat pandemi Covid-19, LU Perdagangan menjadi salah satu yang terdampak karena penjualan dan margin usaha mengalami penurunan. Sementara itu pemulihan ekonomi yang lebih cepat relatif tertahan dengan adanya kenaikan beberapa harga komoditas yang dipengaruhi oleh pasokan yang belum normal pasca pandemi dan gejolak geopolitik. Kondisi ini juga tercermin pada hasil *liaison* di mana *likert scale* penjualan domestik untuk sektor perdagangan di Provinsi NTB triwulan III 2022 sebesar -0,14, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 0,88. Apabila dilihat lebih detail, perlambatan kinerja perdagangan juga tercermin dari Survei Penjualan Eceran (SPE) terutama pada komponen makanan, minuman dan tembakau mengalami penurunan pertumbuhan omset dari triwulan sebelumnya yang sebesar 227% (yoy) menjadi 205% (yoy) di triwulan III 2022.

Deselerasi kinerja LU Perdagangan tidak hanya terjadi pada transaksi *offline*, tetapi juga transaksi yang dilakukan secara *online* melalui platform *e-commerce*. Adapun berdasarkan data transaksi *e-commerce* yang diperoleh dari 4 *marketplace* besar di Indonesia, pertumbuhan transaksi pembeli di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 22,10% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya 37,58% (yoy). Searah dengan nominal transaksi, volume transaksi juga tercatat tumbuh melambat dari 37,54% (yoy) pada triwulan II 2022 menjadi 17,57% (yoy) pada triwulan III 2022.

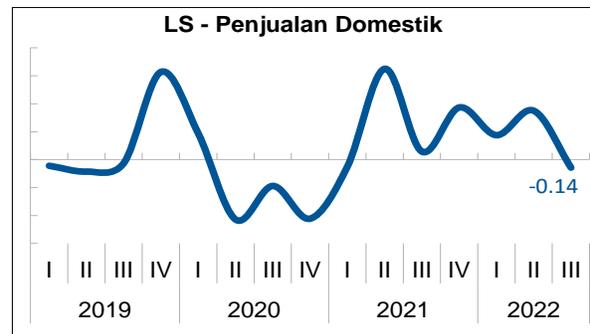
Perlambatan kinerja LU Perdagangan yang lebih dalam tertahan oleh perbaikan penyaluran kredit LU Perdagangan dan kenaikan mobilitas masyarakat. Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit LU Perdagangan triwulan III tercatat 5,35% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,93% (yoy). Hal ini menunjukkan optimisme perbankan terhadap prospek

perekonomian ke depannya, sehingga penyaluran kredit baik untuk modal kerja maupun kredit investasi dapat didorong tumbuh lebih tinggi. Adapun kenaikan mobilitas masyarakat di Provinsi NTB sebagaimana ditunjukkan oleh data *Google Mobility Report* yang secara rata-rata mencatat peningkatan pergerakan mobilitas sebesar 34,53% pada periode Juli hingga September 2022.



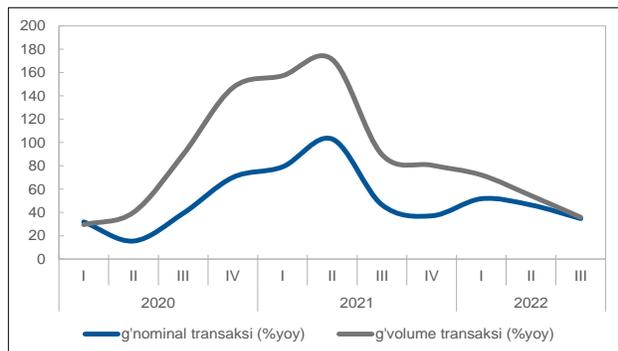
Sumber: BPS, dlolah

Grafik 1.24 PDRB Provinsi NTB Sektor PBER



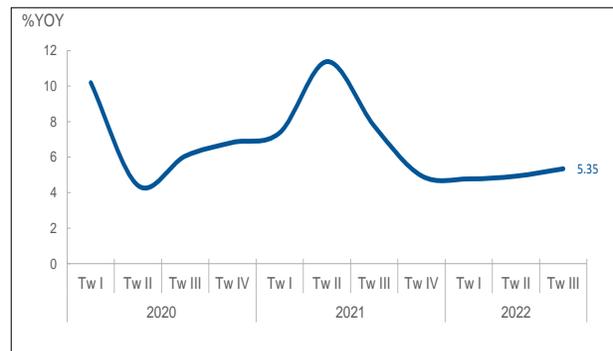
Sumber: Survei Bank Indonesia, dlolah

Grafik 1.25 Likert Scale Penjualan Domestik



Sumber: Beberapa E-commerce, dlolah

Grafik 1.26 Perkembangan Nominal dan Volume Transaksi *E-Commerce*



Sumber: Laporan Bank Umum, dlolah

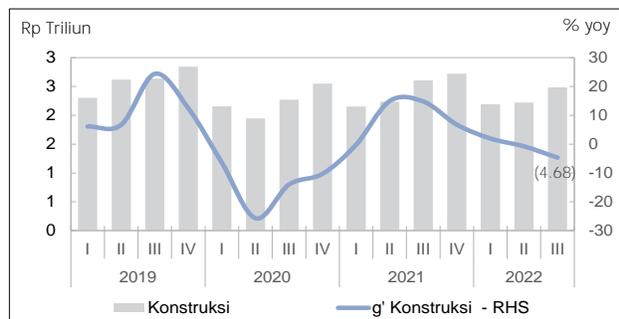
Grafik 1.27 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan

1.3.4 Konstruksi

Sejalan dengan pertumbuhan PMTB triwulan III 2022 yang berkontraksi 2,95% (yoy), kinerja konstruksi Provinsi NTB juga tercatat kontraksi 4,68% (yoy). Pertumbuhan sektor konstruksi yang negatif tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi fisik memang relatif minim di triwulan III 2022. Hal ini ditengarai terjadi sejalan dengan mayoritas proyek strategis nasional dan proyek daerah

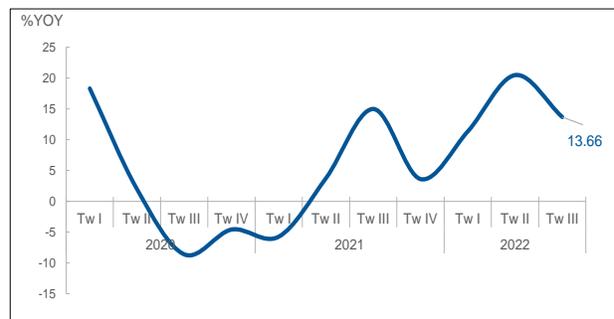
yang telah diselesaikan pada tahun 2021. Sejumlah proyek tersebut antara lain pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Sirkuit Mandalika, perluasan dan perbaikan infrastruktur bandara serta pembangunan jalan *by-pass* BIL-Mandalika yang diakselerasi pengerjaannya sejalan dengan persiapan penyelenggaraan World Super Bike 2021. Belum berjalannya proyek konstruksi baru di samping penyelesaian beberapa proyek strategis nasional (PSN) *multiyears* juga diperkirakan menjadi penyebab masih tertahannya kinerja sektor konstruksi sampai dengan triwulan III 2022.

Tendensi penurunan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari penurunan penyaluran kredit sektor konstruksi. Pada triwulan III 2022, penyaluran kredit konstruksi tercatat tumbuh 13,66% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mencapai 20,47% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku konstruksi masih cenderung *wait and see* untuk memulai pembangunan proyek baru atau pembangunan yang dilakukan masih cenderung terbatas pada pemeliharaan yang tidak terlalu memerlukan pembiayaan modal yang besar.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.28 PDRB Provinsi NTB Sektor Konstruksi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.29 Perkembangan Kredit Sektor Konstruksi

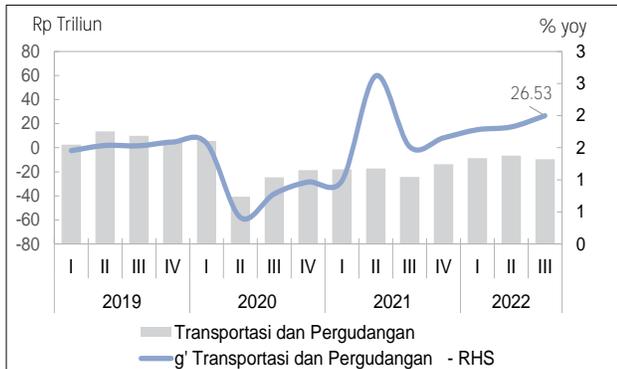
Penurunan kinerja LU Konstruksi lebih dalam relatif tertahan oleh konstruksi proyek bendungan dan infrastruktur di kawasan Mandalika yang berjalan *on-track*. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) PSN bendungan yang masih berlanjut. Bendungan Beringin Sila dan Bendungan Meninting masing-masing senilai Rp1,7 triliun dan Rp1,4 triliun ditargetkan selesai Desember 2022, serta Bendungan Tiu Suntuk senilai Rp1,2 Triliun yang ditargetkan selesai Desember 2023. Sementara untuk konstruksi MUTIP di KEK Mandalika dengan estimasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun telah memasuki masa konstruksi sejak tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023.

Pembangunan ini berkontribusi pada volume penjualan semen triwulan III 2022 yang tumbuh 0,76% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi 8,01% (yoy). Dampak dari pembangunan ini juga tercermin dalam indikator Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Sektor Konstruksi di Provinsi NTB di mana terjadi kenaikan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) dari -1,63% pada triwulan II 2022 menjadi 3,26% pada triwulan III 2022.

1.3.5 Transportasi dan Pergudangan

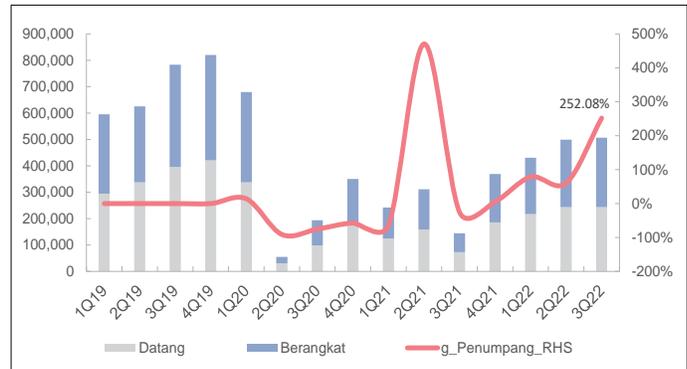
Peningkatan kinerja LU Transportasi didorong kenaikan jumlah penumpang angkutan udara dan angkutan laut. Pada triwulan III 2022, LU Transportasi mencatatkan pertumbuhan 26,53% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 17,18% (yoy). Pertumbuhan signifikan tersebut sejalan dengan jumlah penumpang pesawat triwulan III 2022 melalui Bandara Internasional Lombok mencapai 506.979 orang atau tumbuh 252,08% (yoy), meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 60,58% (yoy). Selain karena *base effect* tahun sebelumnya yang rendah akibat pembatasan mobilitas, peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah maskapai yang beroperasi dan penambahan rute baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Sementara itu, dari penumpang angkutan laut juga mencatatkan pertumbuhan 13,36% (yoy) pada triwulan III 2022, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 3,35% (yoy). Lebih lanjut, kinerja positif LU Transportasi sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata yang terkonfirmasi dari pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan triwulan III 2022 yang mencapai 64,40% (yoy), meningkat dari periode sebelumnya 23,74% (yoy).

Tren kenaikan kinerja LU Transportasi terkonfirmasi dari hasil SKDU dan penyaluran kredit sektor transportasi. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Saldo Bersih Tertimbang (SBT) LU Konstruksi di Provinsi NTB mengalami kenaikan dari 2,90% menjadi 4,04%. Sejalan dengan kondisi tersebut, penyaluran kredit sektor transportasi triwulan III 2022 juga tercatat tumbuh 7,31% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 4,20% (yoy). LU Transportasi menjadi salah satu lapangan usaha yang terdampak selama pandemi sehingga pelonggaran pembatasan mobilitas seiring pandemi yang cenderung terkendali telah mendorong percepatan pemulihan LU Transportasi.



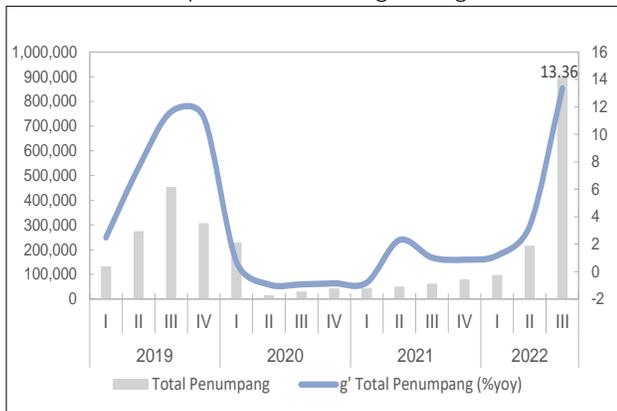
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.30 PDRB Provinsi NTB Sektor Transportasi dan Pergudangan



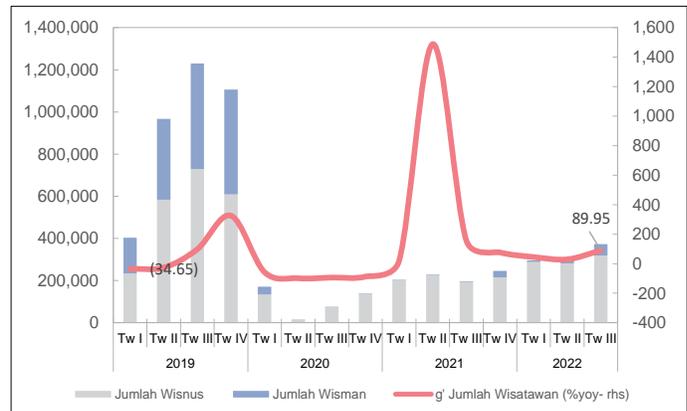
Sumber: Angkasa Pura, diolah

Grafik 1.31 Pertumbuhan Penumpang Pesawat Udara Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

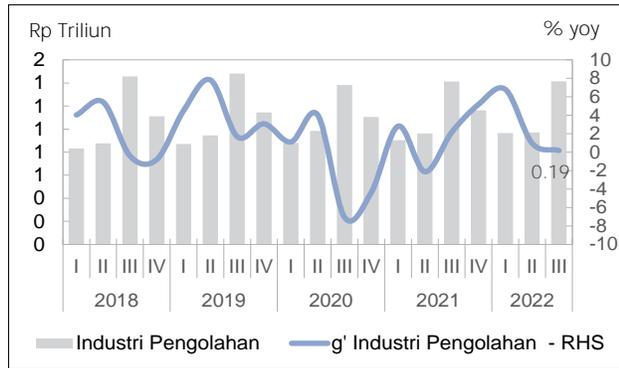
Grafik 1.32 Perkembangan Penumpang Angkutan Laut NTB



Sumber: Dinas Pariwisata Prov. NTB, diolah

Grafik 1.33 Perkembangan Kunjungan Wisatawan ke Provinsi NTB

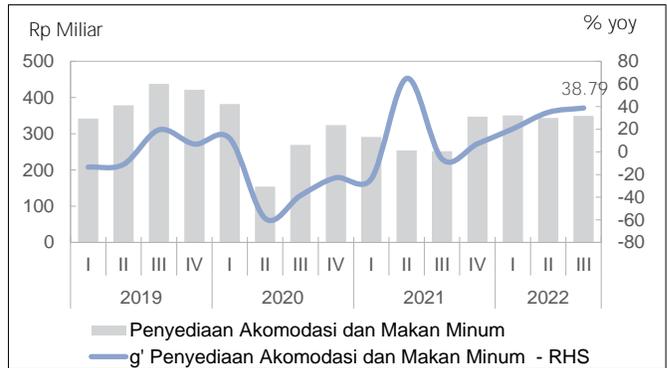
Lampiran: Grafik Pertumbuhan Per Sektor Ekonomi Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.34

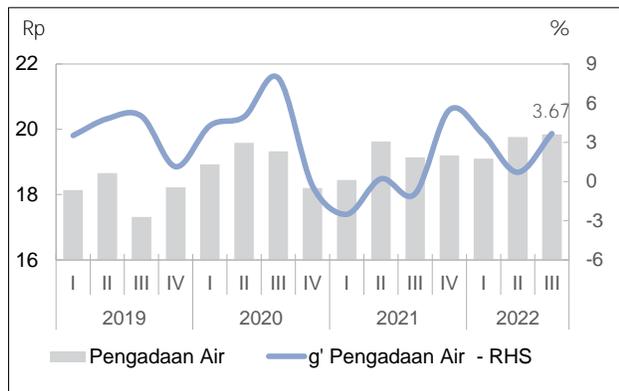
PDRB Provinsi NTB Sektor Industri Pengolahan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.35

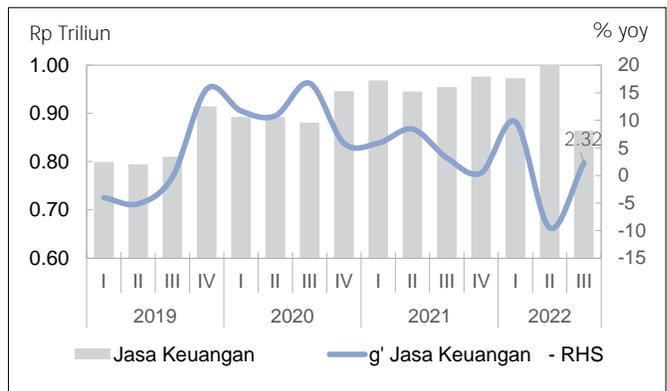
PDRB Provinsi NTB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.36

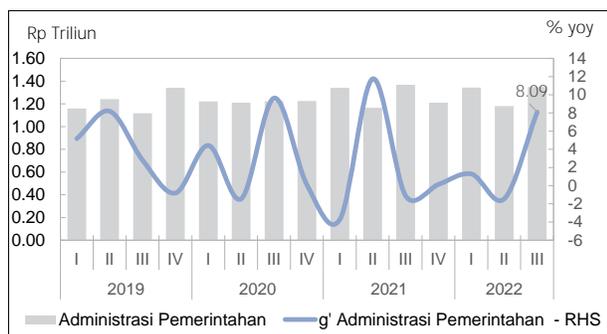
PDRB Provinsi NTB Sektor Pengadaan Air



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.37

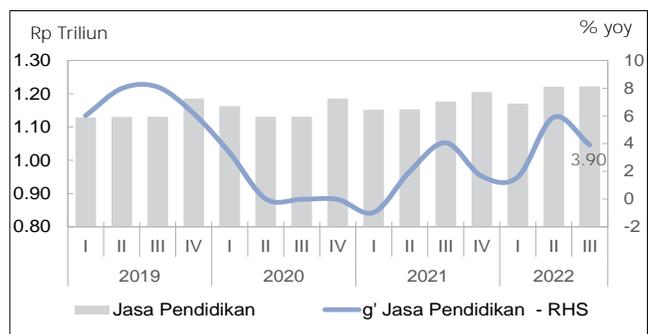
PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Keuangan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.38

PDRB Provinsi NTB Sektor Administrasi Pemerintahan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

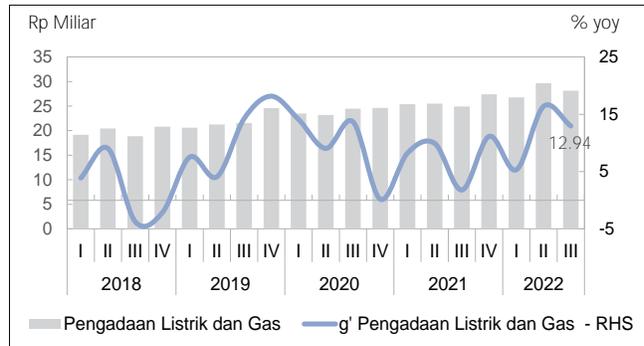
Grafik 1.39

PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Pendidikan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.40
PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial



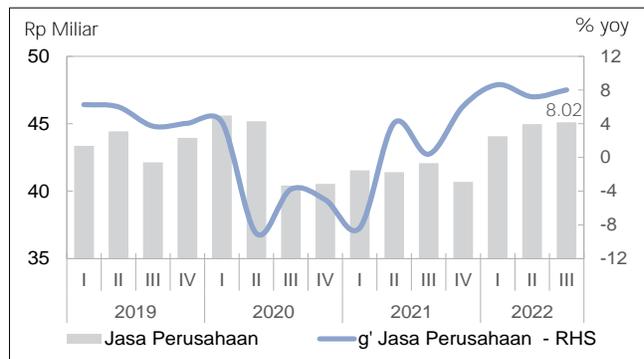
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.41
PDRB Provinsi NTB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas



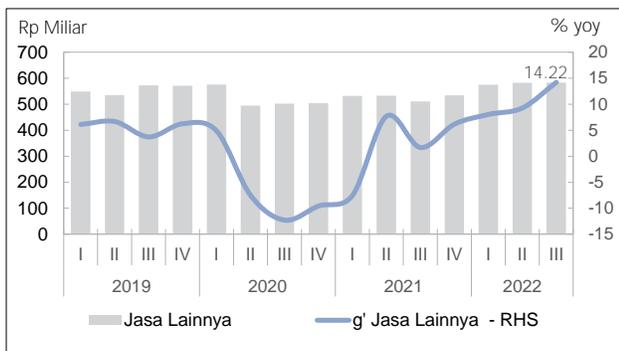
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.42
PDRB Provinsi NTB Sektor Real Estate



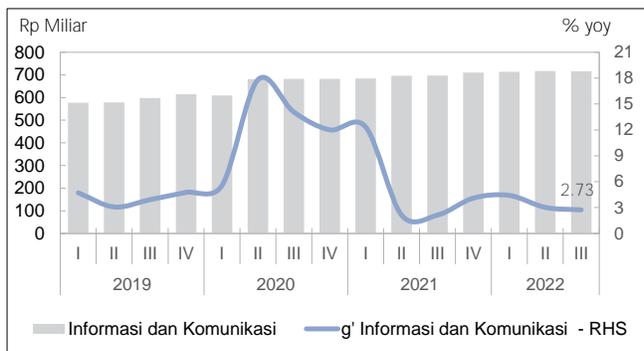
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.43
PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Perusahaan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.44
PDRB Provinsi NTB Sektor Jasa Lainnya



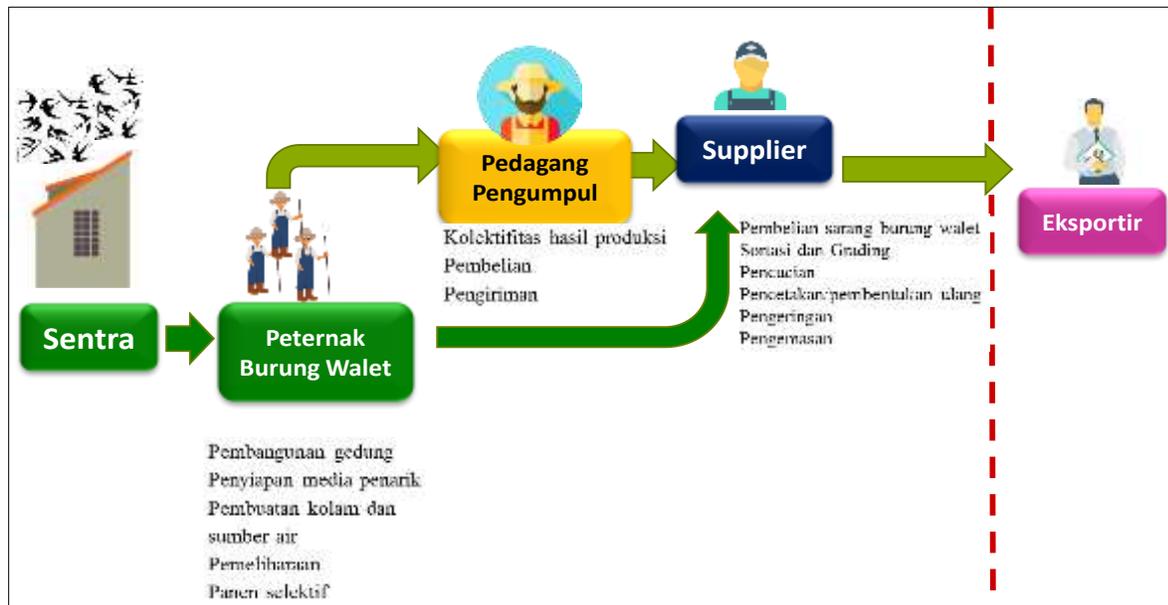
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.45
PDRB Provinsi NTB Sektor Informasi dan Komunikasi

BOKS 1 : Sarang Burung Walet Menjadi Salah Satu Unggulan Untuk Dorong Ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM dalam memproduksi dan menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat terjadi distribusi kekayaan yang lebih inklusif kepada masyarakat. Hasil produksi UMKM juga dapat dipasarkan secara domestik maupun internasional, namun pangsa pasar yang lebih luas mendorong UMKM untuk terus menyediakan produk dengan kualitas yang lebih baik dan daya saing yang lebih kompetitif. Selain pasar domestik, pasar ekspor juga seringkali menjadi target penjualan hasil produk UMKM karena dapat memberikan insentif yang lebih baik, seperti pasar/permintaan yang lebih luas, hingga jaminan kontinuitas permintaan produksi dan keuntungan penjualan yang lebih baik. Selain itu, pangsa dan permintaan produk UMKM yang lebih besar juga mendorong volume produksi yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan faktor produksi yang lebih banyak. Hal ini juga yang menyebabkan penyediaan lapangan pekerjaan lebih tinggi, melakukan ekspansi bisnis, serta mendorong peningkatan standar kelayakan hidup yang lebih tinggi bagi pelaku usaha.

Berbagai komoditas yang dihasilkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diekspor, salah satunya adalah sarang burung walet. Komoditas ini merupakan komoditas bernilai tinggi dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang bersih artinya memerlukan tingkat polusi yang rendah, baik itu polusi udara maupun polusi suara. Keberhasilan usaha sarang burung walet sangat ditentukan oleh pengelolaan gedung dengan tingkat lingkungan mikro yang sesuai dengan habitat asli burung walet. Sarang burung walet dapat dihasilkan setelah gedung dibangun sekurang-kurangnya 2 tahun dan selanjutnya panen selektif dilakukan 2 bulan sekali. Panen selektif yang dimaksud adalah untuk menjaga kelestarian populasi burung walet. *Supplier* eksportir sarang burung walet terutama di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah berperan dalam penyerapan dan pelatihan tenaga kerja dalam mengelola sarang burung walet dengan kualitas yang baik untuk berbagai pasar, khususnya pasar ekspor. Kegiatan utama *supplier* eksportir selain melakukan produksi, menampung dan mencuci sarang burung walet juga melakukan kegiatan pembentukan sarang burung walet yang sudah dicuci kemudian melakukan pengemasan dan pemasaran hasil produk ke berbagai pembeli termasuk eksportir.



Sumber: Laporan Kajian Rantai Nilai dan Nilai Tambah Produk Pertanian di Provinsi NTB, diolah

Gambar Boks 1.1 Rantai Nilai Sarang Burung Walet dengan Pasar Ekspor

Rantai pasok komoditas walet cukup ideal yang tercermin dari tersedianya 3 pelaku utama dalam rantai nilai sarang burung walet di NTB, yaitu petani produsen, pengepul dan *supplier* eksportir. Sarang burung walet juga dibagi menjadi 3 kualitas, yaitu kualitas mangkok sempurna, kualitas sudut, dan kualitas patahan yang memiliki *gap* harga yang tinggi diantara masing-masing kualitas tersebut.



Sumber: Laporan Kajian Rantai Nilai dan Nilai Tambah Produk Pertanian di Provinsi NTB, diolah

Gambar Boks 2.1 Jenis Sarang Burung Walet

Peternak/produsen sarang burung walet sebagai salah satu aktor pada rantai nilai yang memperoleh tingkat keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan aktor lainnya. Hal tersebut dikarenakan peternak/produsen melakukan aktivitas pertambahan nilai yang banyak pada kegiatan pengelolaan sarang (perawatan) dan juga penarikan burung walet (budidaya) dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang cepat dan banyak serta baik, upaya tersebut mempengaruhi tingkat keuntungan yang

diperoleh peternak/produsen). Tabel di bawah menunjukkan persentase keuntungan yang diperoleh oleh peternak/produsen sarang burung walet yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku rantai nilai lainnya. Proporsi nilai tambah di tingkat pengepul cukup kecil, karena kegiatan yang dilakukan hanya melakukan proses pembelian dan distribusi dari produsen ke *supplier* eksportir. *Supplier* eksportir melakukan kegiatan pasca panen yaitu pembersihan, pembentukan ulang terjadi pengurangan bobot sarang burung walet hingga 25%. Harga ekspor sarang burung walet relatif tinggi pada tingkat eksportir terutama jika bentuk sarang tersebut utuh dan bersih. Dengan harga yang tinggi ini, maka pasar yang bisa dimasuki produk dari NTB terbatas pada tiga negara, yaitu Tiongkok, Singapura, dan Australia.

Tabel Boks 2.1 Persentase Nilai Tambah Pelaku Terhadap Total Rantai Nilai

No	Pelaku	Peternak/produsen – Pengepul - <i>Supplier</i> Eksportir	
		Keuntungan Pada Rantai Nilai (%)	Nilai Tambah Pelaku Terhadap Total Rantai Nilai (%)
1	Peternak/produsen	92,79	68,8
2	Pengepul	88,86	6,8
3	<i>Supplier</i> Eksportir	83,81	24,4

Sumber: Laporan Kajian Rantai Nilai dan Nilai Tambah Produk Pertanian di Provinsi NTB, diolah

BAB 2

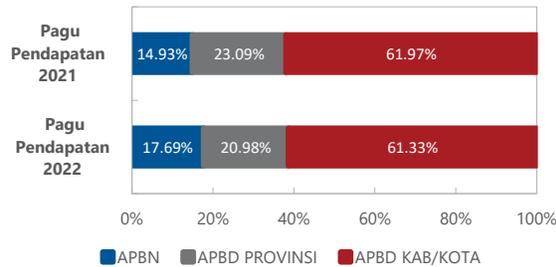
KEUANGAN PEMERINTAH

Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi NTB mengalami peningkatan pada triwulan III 2022 yang tercermin dari peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja, masing-masing sebesar 7,29% (yoy) dan 0,51% (yoy). Realisasi pendapatan total Pemerintah NTB hingga triwulan III 2022 mencapai Rp18,28 triliun atau sebesar 70,87% dari pagu anggaran 2022. Peningkatan realisasi pendapatan utamanya didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan APBN dan total APBD Kabupaten/Kota pada triwulan III 2022, di mana masing-masing tumbuh 26,83% (yoy) dan 6,48% (yoy). Selanjutnya, realisasi belanja total Pemerintah NTB juga mencapai Rp30,23 triliun atau sebesar 63,74% dari pagu anggaran tahun 2022. Peningkatan realisasi belanja utamanya didorong oleh realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota pada triwulan III 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 5,79% (yoy), sejalan dengan peningkatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

2.1 PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DI WILAYAH NTB

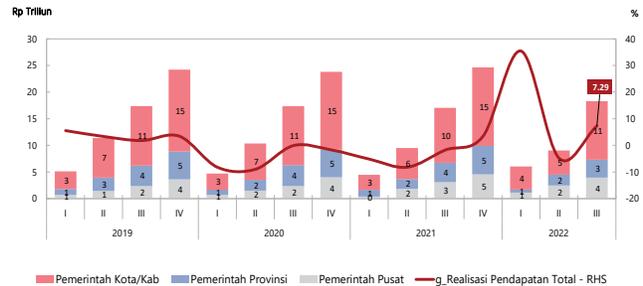
Anggaran Pendapatan total Pemerintah NTB tahun 2022 mencapai Rp25,80 triliun, meningkat sebesar 3,79% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp24,86 triliun. Realisasi pendapatan total Pemerintah NTB hingga triwulan III 2022 juga telah mencapai Rp18,28 triliun atau sebesar 70,87% dari total pagu anggaran. Berdasarkan nominal dan pangsa, APBD Kabupaten/Kota mendominasi anggaran pendapatan pemerintah NTB dengan anggaran sebesar Rp15,82 triliun atau memiliki pangsa 61,33%. Selanjutnya APBD Provinsi NTB tercatat sebesar Rp5,41 triliun dengan pangsa 20,98%, dan terendah adalah APBN yang sebesar Rp4,56 triliun dengan pangsa 17,69%. Peningkatan total pagu pendapatan Pemerintah NTB didorong oleh peningkatan pada pagu pendapatan APBN dan APBD Kabupaten/Kota tahun 2022 yang masing-masing tumbuh sebesar 22,92% dan 2,71% (yoy). Selanjutnya, nominal dan realisasi pendapatan juga tumbuh mencapai 7,29% (yoy) yang didorong oleh peningkatan pendapatan APBN dan APBD Kabupaten/Kota, masing-masing sebesar 26,83% dan 6,48% (yoy). Peningkatan pendapatan APBN sejalan dengan perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan penerimaan yang berasal PPh, PPN, PBB Cukai, Bea Keluar/Pendapatan Ekspor, Cukai, dan PNBK. Sedangkan peningkatan APBD Kabupaten/Kota sejalan dengan peningkatan PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Realisasi pendapatan total Pemerintah NTB didominasi

oleh APBD Kabupaten/Kota (Rp10,98 triliun dengan pangsa 60,04%), diikuti dengan APBN (Rp3,94 triliun dengan pangsa 21,57%), serta nominal dan pangsa terendah yaitu APBD Provinsi NTB (Rp3,36 triliun dengan pangsa 18,39%).



Sumber: BPKAD Prov. NTB dan DJPb Kanwil NTB, diolah

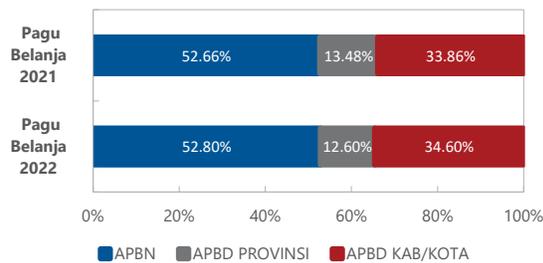
Grafik 2.1 Pagu Pendapatan Pemerintah Nusa Tenggara Barat



Sumber: BPKAD Prov. NTB, diolah

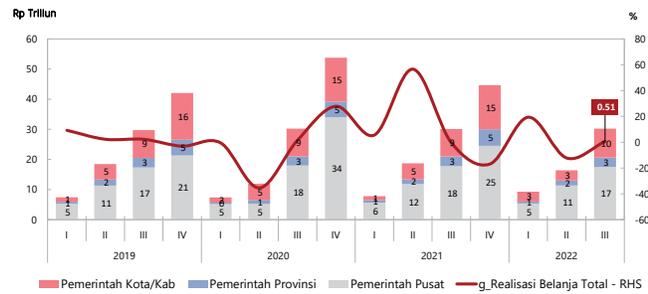
Grafik 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Nusa Tenggara Barat

Anggaran belanja total Pemerintah NTB tahun 2022 mencapai Rp47,43 triliun, meningkat sebesar 0,21% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp47,33 triliun. Realisasi belanja total Pemerintah NTB hingga triwulan III 2022 juga telah mencapai Rp30,23 triliun atau sebesar 63,74% dari total pagu anggaran. Berdasarkan nominal dan pangasanya, APBN mendominasi anggaran pengeluaran pemerintah NTB (Rp25,04 triliun dengan pangsa 52,80%), diikuti dengan APBD Kabupaten/Kota (Rp16,41 triliun dengan pangsa 34,60%), dan terendah adalah APBD Provinsi NTB (Rp5,98 triliun dengan pangsa 12,60%). Peningkatan total pagu belanja didorong oleh peningkatan pada pagu pendapatan APBN dan APBD Kabupaten/Kota tahun 2022 yang masing-masing tumbuh sebesar 22,92% dan 2,71% (yoy). Selanjutnya, nominal dan realisasi belanja tumbuh mencapai 0,51% (yoy) yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota sebesar 5,79% (yoy) sejalan dengan realisasi gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Juli 2022, serta Belanja Modal dalam rangka mendukung proyek *Mandalika Urban Tourism and Infrastructure* (MUTIP). Realisasi belanja total Pemerintah NTB didominasi oleh APBN (Rp17,48 triliun dengan pangsa 57,83%), diikuti dengan APBD Kabupaten/Kota (Rp9,58 triliun dengan pangsa 31,67%), serta yang terendah diikuti oleh APBD Provinsi NTB (Rp3,17 triliun dengan pangsa 10,50%).



Sumber: BPKAD Prov. NTB dan DJPb Kanwil NTB, diolah

Grafik 2.3 Pagu Belanja Pemerintah Nusa Tenggara Barat



Sumber: BPKAD Prov. NTB, diolah

Grafik 2.4 Realisasi Belanja Pemerintah Nusa Tenggara Barat

2.2 APBD PROVINSI NTB TAHUN 2022

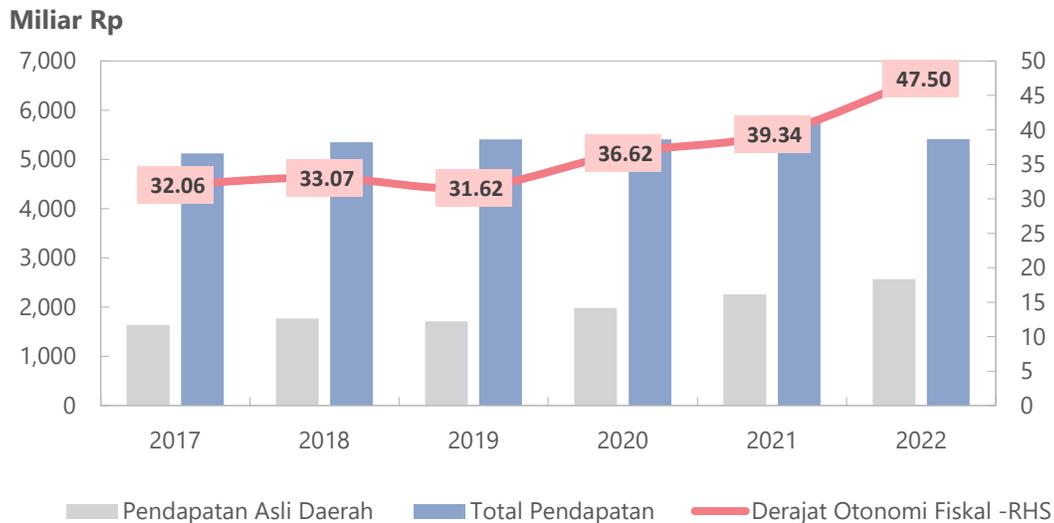
Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja APBD Provinsi NTB pada triwulan III tahun 2022 menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang masing-masing terkontraksi sebesar 5,68% dan 6,33% (yoy). Pagu pendapatan APBD Provinsi NTB hanya mencapai Rp5,41 triliun, sedangkan pagu belanja mencapai Rp5,98 triliun pada triwulan III tahun 2022. Angka ini relatif mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2021 yang masing-masing mencapai Rp5,74 triliun dan Rp6,38 triliun.

2.2.1 Risiko Fiskal dari Pendapatan Pemerintah Daerah

Secara nominal, anggaran pendapatan APBD Provinsi NTB tahun 2022 mengalami penurunan hingga 5,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan anggaran pendapatan didorong oleh menurunnya Pendapatan Transfer dan dana Pendapatan Hibah. Penurunan pagu anggaran pendapatan yang lebih dalam relatif tertahan oleh meningkatnya estimasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 13,88% (yoy) yang didorong oleh proyeksi peningkatan sebagian besar komponen PAD antara lain Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah termasuk pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan PAD Lainnya.

Meningkatnya target PAD pada APBD Provinsi NTB mendorong peningkatan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) APBD Provinsi NTB pada tahun 2022. Derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan. DOF dihitung dari proporsi PAD terhadap total pendapatan. DOF tahun 2022 diperkirakan sebesar 47,50%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 39,34%. Peningkatan estimasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp740,95 miliar atau

tumbuh 31,50% dibandingkan anggaran tahun 2021 menjadi salah satu komponen perhitungan terbesar yang menyebabkan anggaran PAD Provinsi NTB tahun 2022 menjadi lebih tinggi.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.5 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi NTB

Realisasi pendapatan APBD Provinsi NTB sampai dengan triwulan III 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan triwulan III 2022 sebesar Rp3,36 triliun atau terkontraksi sebesar -7,18% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp3,62 triliun. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan pada komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Retribusi Daerah, di mana masing-masing komponen terkontraksi sebesar -26,61% dan -3,53% (yoy). Penurunan realisasi pendapatan lebih lanjut relatif tertahan oleh peningkatan sebagian komponen PAD pada triwulan III 2022, yaitu komponen Pajak Daerah (18,96% yoy), komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (1,94% yoy), komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (118,67% yoy), serta komponen Pendapatan Hibah (203,41% yoy).

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Triwulan III 2021 dan 2022

No	Uraian	PAGU APBD Prov. NTB			REALISASI APBD				g_Realisasi III 2022 (%YOY)
		2021 (Milyar Rp)	2022 (Milyar Rp)	% Perubahan	Realisasi Tw III 2021		Realisasi Tw III 2022		
					(Milyar Rp)	%Pagu	(Milyar Rp)	%Pagu	
I.	PENDAPATAN								
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,258,283	2,571,637	▲ 114	1,182,023	52.34	1,548,145	60.20	▲ 30.97
1.1.1	Pajak Daerah	1,601,354	1,726,236	▲ 108	977,725	61.06	1,163,079	67.38	▲ 18.96
1.1.2	Retribusi Daerah	47,220	44,104	▲ 93	6,530	13.83	6,299	14.28	▼ (3.53)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	46,264	60,349	▲ 130	45,996	99.42	46,890	77.70	▲ 1.94
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	563,446	740,949	▲ 132	151,772	26.94	331,877	44.79	▲ 118.67
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,426,899	2,817,765	▲ 82	2,430,071	70.91	1,783,424	63.29	▼ (26.61)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	3,425,156	2,817,765	▲ 82	2,430,071	70.95	1,783,424	63.29	▼ (26.61)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	1,743	-	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	54,781	22,594	▲ 41	10,106	18.45	30,664	135.72	▲ 203.41
1.3.1	Pendapatan hibah	54,781	22,594	▲ 41	10,106	18.45	30,664	135.72	▲ 203.41
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	5,739,963	5,411,996	▼ (6)	3,622,201	63	3,362,232	62	▼ (7.18)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi NTB

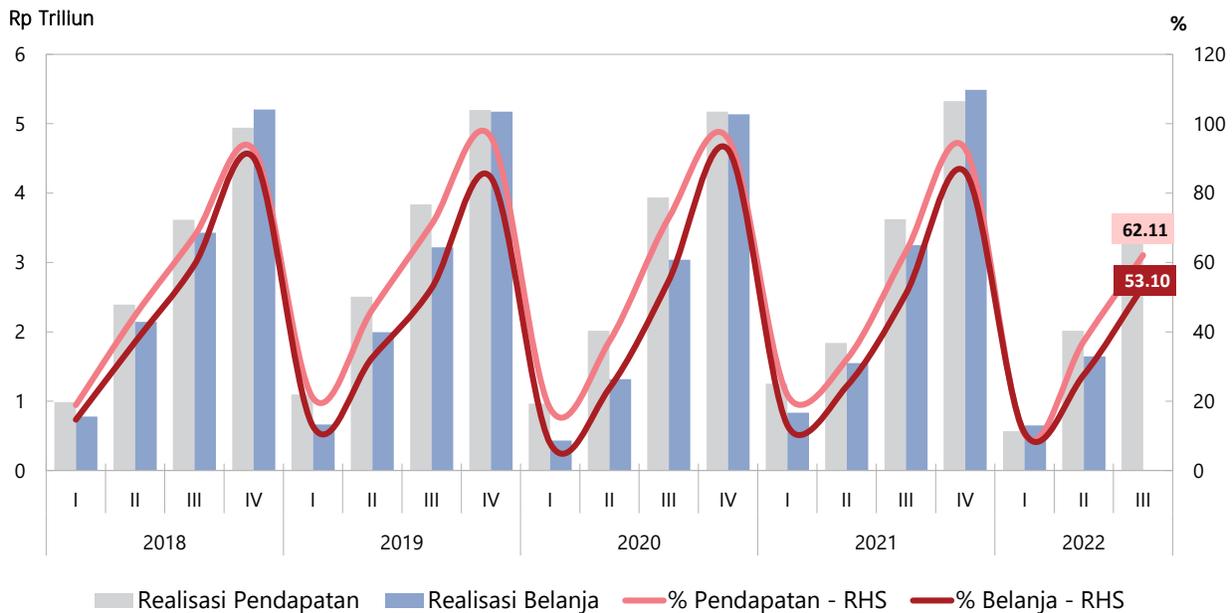
Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2022 secara nominal sebesar Rp5,98 triliun atau lebih rendah 6,33% (yoy) dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Penurunan anggaran belanja disebabkan oleh komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga yang masing-masing sebesar -8,35%; -4,26%; dan -98,54% (yoy). Penurunan pada Belanja Modal disebabkan oleh kontraksi pada komponen Belanja Subsidi (-47,67% yoy), Belanja Hibah (-79,76% yoy), dan Belanja Bantuan Sosial (-9,95% yoy). Kondisi yang sama juga terjadi untuk komponen Modal yang disebabkan oleh penurunan pada komponen Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar -54,42% (yoy). Di sisi lain, salah satu komponen anggaran belanja Provinsi NTB mengalami peningkatan, yaitu Transfer yang didorong oleh peningkatan pada komponen Bagi Hasil Pajak (8,28% yoy) dan komponen Bagi Hasil Pendapatan Lainnya (296,52% yoy).

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB Triwulan III 2021 dan 2022

No	Uraian	PAGU APBD Prov. NTB			REALISASI APBD				g_Realisasi III 2022 (%YOY)
		2021 (Milyar Rp)	2022 (Milyar Rp)	% Perubahan	Realisasi Tw III 2021		Realisasi Tw III 2022		
					(Milyar Rp)	%Pagu	(Milyar Rp)	%Pagu	
II.	BELANJA								
2.1	BELANJA OPERASI	4,315,298	3,955,157	▼ (8.35)	2,580,886	59.81	2,176,359	55.03	▼ (15.67)
2.1.1	Belanja Pegawai	1,541,661	1,854,046	▲ 20.26	1,069,388	69.37	1,173,746	63.31	▲ 9.76
2.1.2	Belanja Barang	1,467,450	1,778,295	▲ 21.18	680,409	46.37	851,187	47.87	▲ 25.10
2.1.3	Belanja Bunga	5,056	53,335	▲ 954.91	-	-	22,436	42.07	▲ 100.00
2.1.4	Belanja Subsidi	396	207	▼ (47.67)	208	52.40	158	76.20	▼ (23.91)
2.1.5	Belanja Hibah	1,292,086	261,486	▼ (79.76)	828,219	64.10	128,359	49.09	▼ (84.50)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8,649	7,789	▼ (9.95)	2,662	30.78	472	6.07	▼ (82.26)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA MODAL	1,247,827	1,194,632	▼ (4.26)	261,018	20.92	468,901	39.25	▲ 79.64
2.2.1	Belanja Tanah	1,500	9,850	▲ 557	52,829	3,521.93	9,474	96.18	▼ (82.07)
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	297,885	335,763	▲ 12.72	30,248	10.15	71,488	21.29	▲ 136.34
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	328,735	532,237	▲ 61.90	177,008	53.85	187,726	35.27	▲ 6.05
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	598,292	272,717	▼ (54.42)	933	0.16	190,683	69.92	▲ 20,344.49
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	21,416	44,065	▲ 105.76	-	-	9,530	21.63	▲ 100.00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	58,607	856	▼ (98.54)	8,007	13.66	417	48.74	▼ (94.79)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	58,607	856	▼ (98.54)	8,007	13.66	417	48.74	▼ (94.79)
2.4	TRANSFER	758,584	825,515	▲ 8.82	401,296	52.90	527,615	63.91	▲ 31.48
2.4.1	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	758,584	825,515	▲ 8.82	401,296	52.90	527,615	63.91	▲ 31.48
JUMLAH BELANJA		6,380,317	5,976,159	▼ (6.33)	3,251,207	50.96	3,173,293	53.10	▼ (2.40)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi NTB pada triwulan III 2022 sebesar Rp3,17 triliun atau sebesar 53,10% terhadap total pagu anggaran belanja tahun 2022. Secara keseluruhan, realisasi belanja Pemerintah Provinsi NTB triwulan III 2022 lebih rendah 2,40% (yoy) dibandingkan realisasi triwulan III 2021. Hal ini disebabkan oleh penurunan realisasi untuk komponen Belanja Operasi (-15,67% yoy) dan Belanja Tak Terduga (-94,79% yoy). Penurunan komponen Belanja Operasi disebabkan oleh penurunan pada komponen Belanja Subsidi (-23,91% yoy), Belanja Hibah (-84,50% yoy), serta Belanja Bantuan Sosial (-82,26% yoy). Di sisi lain, penurunan realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi NTB lebih dalam masih tertahan oleh peningkatan pada beberapa komponen, yaitu komponen Belanja Modal dan Belanja Transfer yang masing-masing meningkat sebesar 79,64% (yoy) dan 31,48% (yoy).

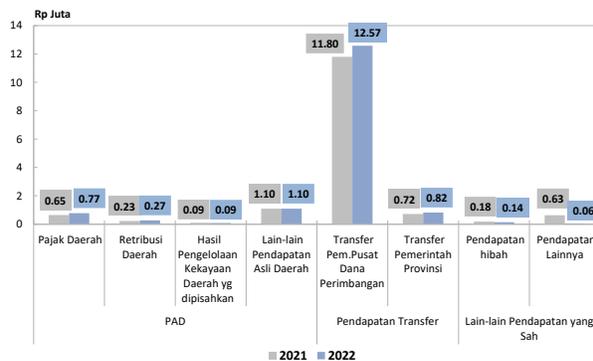


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.6 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB

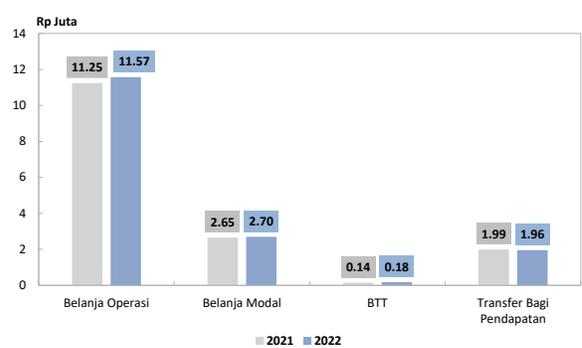
2.3 APBD 10 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NTB TAHUN 2022

Secara keseluruhan, total Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja untuk seluruh Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Total Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota tahun 2022 mencapai Rp15,82 triliun atau meningkat 2,71% (yoy). Peningkatan ini utamanya didorong oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (7,42% yoy) dan Pendapatan Transfer (7,03% yoy). Secara khusus, peningkatan Pendapatan Asli Daerah didorong oleh sebagian komponennya, terutama Pajak Daerah (18,43% yoy) dan Retribusi Daerah (18,35% yoy). Sedangkan peningkatan Pendapatan Transfer didorong oleh peningkatan pada komponen Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Provinsi. Selanjutnya, total Anggaran Belanja Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp16,41 triliun atau meningkat 2,39% (yoy). Peningkatan ini juga didorong oleh sebagian besar komponen Belanja, yaitu komponen Belanja Operasi (2,89% yoy), Belanja Modal (1,80% yoy), serta Belanja Tak Terduga (29,15% yoy). Kenaikan pagu anggaran tahun 2022 ini diharapkan berdampak pada penurunan defisit anggaran dari Rp622,22 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp588,09 miliar di tahun 2022.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.7 Perkembangan Pagu Pendapatan APBD Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

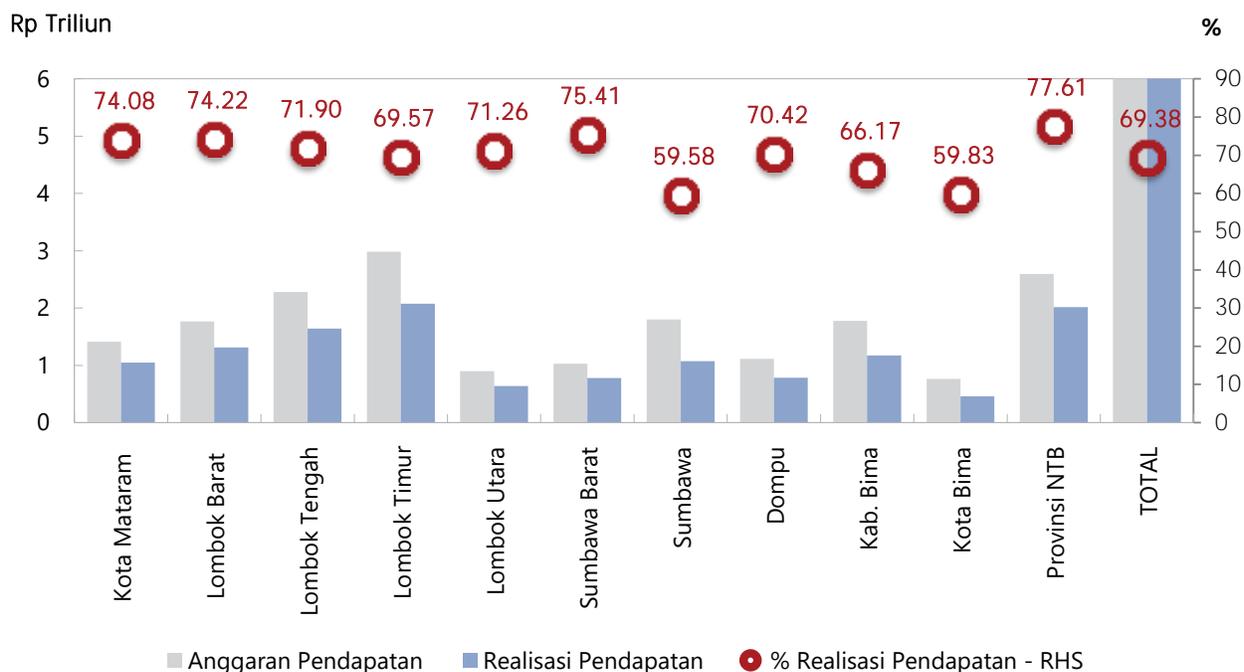
Grafik 2.8 Perkembangan Pagu Belanja APBD Kabupaten/Kota di NTB

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota NTB

Anggaran Pendapatan daerah 10 Kabupaten/Kota di wilayah NTB didominasi oleh Pendapatan Transfer, utamanya Transfer Pemerintah Pusat yang mencapai 84,66% terhadap total pagu Anggaran Pendapatan. Pangsa anggaran Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten/Kota meningkat dari 13,47% pada tahun 2021 menjadi 14,08% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan perkiraan perbaikan ekonomi NTB pada tahun 2022 seiring dengan peningkatan jumlah vaksinasi masyarakat NTB, sehingga berdampak positif terhadap mobilitas dan Pendapatan Daerah yang mayoritas diperoleh dari Pajak Daerah (pajak hotel dan restoran), serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, penyelenggaraan *event-event* internasional tahun 2022 diharapkan juga memberikan sumbangan bagi PAD Kabupaten/Kota, khususnya di Pulau Lombok. Apabila dilihat secara spasial, target anggaran pendapatan daerah tertinggi tahun 2022 ada di Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp2,98 triliun atau 18,84% dari total anggaran pendapatan daerah. Sementara itu, Kota Bima memiliki porsi pendapatan daerah yang terkecil yaitu sebesar Rp763,42 miliar atau 4,82% dari total anggaran pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan keseluruhan Kabupaten/Kota di NTB pada triwulan III 2022 sebesar Rp10,98 triliun atau sebesar 69,38% dari total target Anggaran Pendapatan tahun 2022. Realisasi ini tercatat lebih tinggi 6,48% (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer pada triwulan III 2022 yang masing-masing mencapai 8,61% dan 10,29% (yoy) dibandingkan realisasi pada triwulan III 2021. Peningkatan realisasi pendapatan tertahan oleh satu

komponen yang mengalami penurunan realisasi, yaitu Lain-lain Pendapatan yang Sah di mana terkontraksi sebesar 78,82% (yoy). Secara spasial, nominal realisasi pendapatan tertinggi pada periode triwulan III 2022 dicatatkan oleh Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp2,07 triliun, sedangkan capaian persentase realisasi pendapatan tertinggi diperoleh Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 75,41% dari pagu anggaran. Nominal realisasi pendapatan terendah dicatatkan oleh Kota Bima yang mencapai Rp456,75 miliar, sedangkan capaian persentase realisasi pendapatan terendah diperoleh Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 59,58% dari pagu anggaran.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

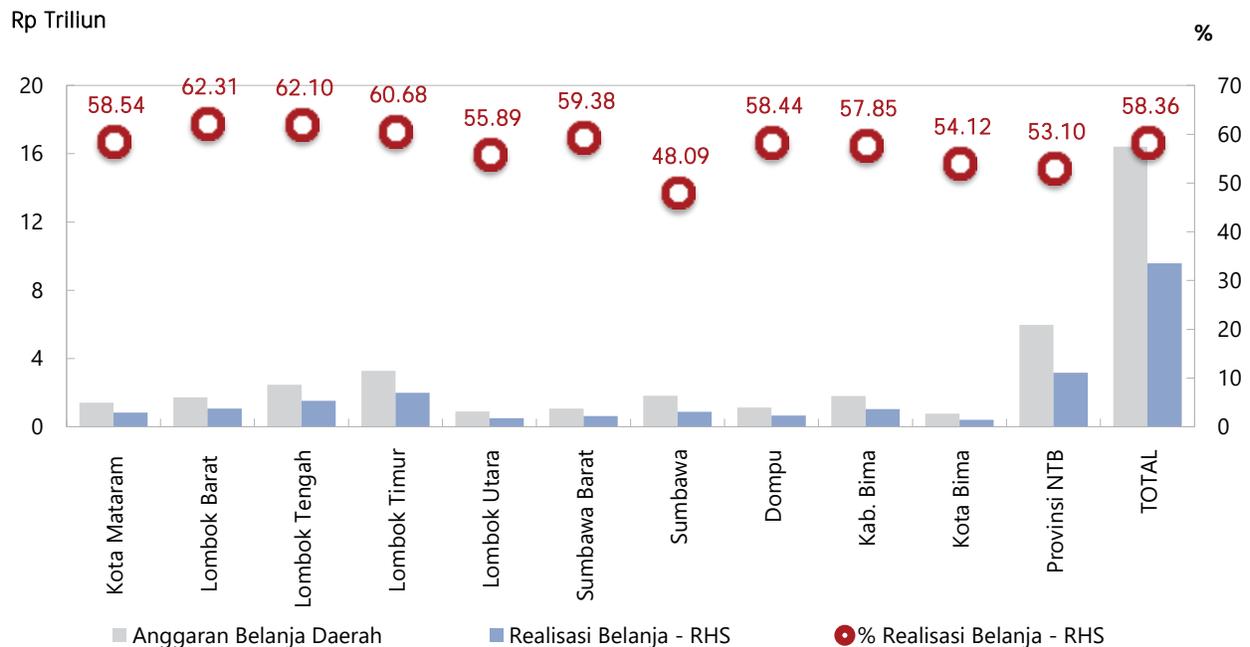
Grafik 2.9 Perkembangan Pendapatan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota NTB

Total pagu Anggaran Belanja keseluruhan Kabupaten/Kota di wilayah NTB tahun 2022 mencapai Rp16,41 triliun atau mengalami kenaikan 2,39% dibandingkan pagu anggaran tahun 2021, sejalan dengan kenaikan pagu anggaran untuk beberapa komponen belanja. Sebagian besar komponen Belanja APBD total Kabupaten/Kota di NTB tumbuh pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh komponen Belanja Operasi (pangsa 70,52% dari total belanja) mengalami kenaikan sebesar 2,89% (yoy), yang didorong oleh kenaikan pada seluruh komponennya, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja

Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, serta Belanja Bantuan Sosial. Komponen belanja lainnya yang turut mengalami kenaikan yaitu Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga yang masing-masing sebesar 1,80% (yoy) dan 29,15% (yoy). Kenaikan anggaran Belanja Modal utamanya didorong oleh kenaikan anggaran Belanja Tanah, serta Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sejalan dengan peningkatan kebutuhan pengadaan dan beberapa proyek sarana dan prasarana yang akan direalisasikan pada tahun 2022. Apabila dilihat secara spasial, anggaran belanja triwulan III 2022 didominasi oleh Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp3,28 triliun (19,98% dari total Anggaran Belanja total Kabupaten/Kota). Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Lombok Timur yang juga terbesar di antara Kabupaten/Kota lain di wilayah NTB, sehingga mempengaruhi beberapa komponen belanja, utamanya belanja Bantuan Sosial yang lebih besar. Sementara itu, Anggaran Belanja tahun 2022 terendah diduduki oleh Kota Bima yang hanya sebesar Rp776,43 miliar (4,73% dari total Anggaran Belanja total Kabupaten/Kota).

Kinerja serapan realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota di wilayah NTB terhadap anggaran yang ditetapkan sebesar 58,36% pada triwulan III 2022. Realisasi belanja daerah keseluruhan Kabupaten/Kota pada triwulan III 2022 mencapai Rp9,58 triliun atau meningkat sebesar 5,79% (yoy). Kenaikan realisasi belanja triwulan III 2022 didorong oleh hampir seluruh komponen belanja, yaitu Belanja Operasi (73,49% dari total pagu anggaran), Belanja Modal (13,06% dari total pagu anggaran), dan Belanja Tak Terduga (0,48% dari total pagu anggaran) di mana masing-masing komponen tersebut mengalami kenaikan realisasi sebesar 3,44%; 49,87%; serta 26,41% (yoy). Peningkatan realisasi belanja APBD total Kabupaten/Kota di NTB tertahan oleh penurunan realisasi Transfer Bagi Pendapatan sebesar -9,85% (yoy). Secara spasial, nominal realisasi belanja tertinggi pada periode triwulan III 2022 yaitu Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp1,99 triliun, sedangkan persentase capaian realisasi tertinggi yaitu Kabupaten Lombok Barat sebesar 62,31% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kota Bima menjadi daerah dengan nominal realisasi belanja terendah yaitu sebesar Rp420,17 miliar. Daerah dengan persentase capaian terendah diperoleh Kabupaten Sumbawa sebesar 48,09% dari anggaran yang telah ditetapkan.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.10 Perkembangan Belanja APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB

2.4 APBN DI PROVINSI NTB TAHUN 2022

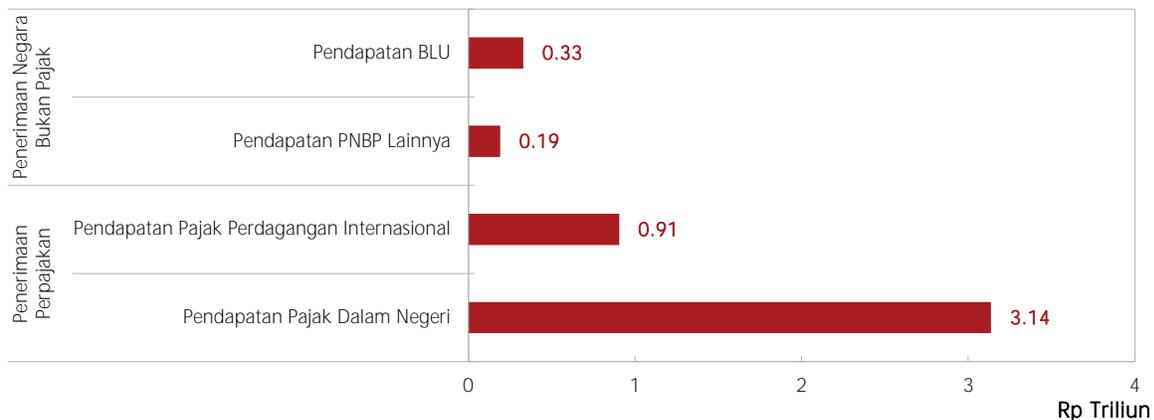
Target (anggaran) Pendapatan APBN di Provinsi NTB triwulan III tahun 2022 mencapai Rp4,56 triliun atau meningkat sebesar 22,92% (yoy), sementara Alokasi Belanja APBN juga mencapai Rp25,04 triliun atau meningkat 0,49% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pemerintah Pusat mengalokasikan sejumlah anggaran APBN untuk direalisasikan di Provinsi NTB pada tahun 2022. Anggaran belanja APBN disalurkan melalui Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTB. Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk membayar gaji pegawai kementerian atau instansi Pemerintah Pusat yang berada di NTB, proyek-proyek infrastruktur strategis, serta program-program kementerian yang dilaksanakan di Provinsi NTB. Sementara itu, anggaran penerimaan APBN berasal dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah.

2.4.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan APBN di Provinsi NTB

Total target penerimaan APBN di Provinsi NTB tahun 2022 sebesar Rp4,56 triliun atau tumbuh hingga 22,92% (yoy) dari target penerimaan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp3,71 triliun.

Komposisi penerimaan terbesar berasal dari Penerimaan Perpajakan yang mencapai Rp4,15 triliun, yang terdiri dari 90,95% penerimaan pajak dan sisanya dari penerimaan bukan pajak. Dari komponen penerimaan pajak, komposisi yang paling besar yaitu Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2,91 triliun atau 63,82% dari total penerimaan pajak, dan sisanya sebesar Rp1,24 triliun atau 27,13% dari total penerimaan pajak merupakan Pajak Perdagangan Internasional.

Kinerja realisasi pendapatan APBN di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh 26,83% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan APBN triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp3,94 triliun atau 86,43% terhadap total pagu pendapatan tahun 2022. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp834,25 miliar atau 26,83% (yoy). Kenaikan realisasi ini didukung oleh Penerimaan Perpajakan yang mencapai Rp3,46 triliun (83,32% dari total pagu pendapatan) atau tumbuh sebesar 27,83% (yoy). Secara nominal, realisasi penerimaan pajak tersebut didominasi oleh Pendapatan Pajak Dalam Negeri yang mencapai Rp2,35 triliun. Komponen penerimaan ini tumbuh sebesar 15,77% (yoy). Selain itu, penerimaan bukan pajak mencapai Rp485,98 miliar yang juga turut menyumbang kenaikan realisasi pendapatan APBN pada triwulan III 2022.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.11 Jumlah Komponen Anggaran Pendapatan APBN 2022

2.4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi NTB

Pagu anggaran belanja APBN di Provinsi NTB tahun 2022 lebih tinggi 0,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang utamanya didorong oleh peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Anggaran Belanja APBN di Provinsi NTB tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp25,04 triliun, mengalami peningkatan sebesar 0,49% (yoy) sejalan dengan peningkatan anggaran Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 1,68% (yoy). Sementara itu anggaran Belanja Operasi tercatat mengalami kontraksi hingga -1,47% (yoy) sejalan dengan penurunan pada komponen Belanja Modal sebesar -16,35% (yoy).

Realisasi kumulatif belanja APBN Provinsi NTB pada triwulan III 2022 sebesar Rp17,48 triliun atau sebesar 69,81% dari total pagu anggaran tahun 2022. Secara nominal, realisasi tersebut lebih rendah -1,64% dibandingkan realisasi di periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan realisasi disebabkan oleh turunnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), khususnya untuk Belanja Modal pada triwulan III 2022. Penurunan Belanja Modal disebabkan oleh mundurnya realisasi pengadaan akibat keterlambatan persetujuan, belum dibukanya blokir belanja modal gedung dan di beberapa bangunan Kab. Lombok Tengah (ga perlu tll rinci), serta perkembangan fisik pekerjaan pada pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan jadwal kontrak. Sementara itu, Realisasi TKDD di Provinsi NTB sampai dengan triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp11,56 triliun atau 73,46% dari pagu anggaran. Kinerja penyaluran TKDD tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 atau tumbuh sebesar 2,02% (yoy).

2.5 RISIKO FISKAL PEMERINTAH DAERAH

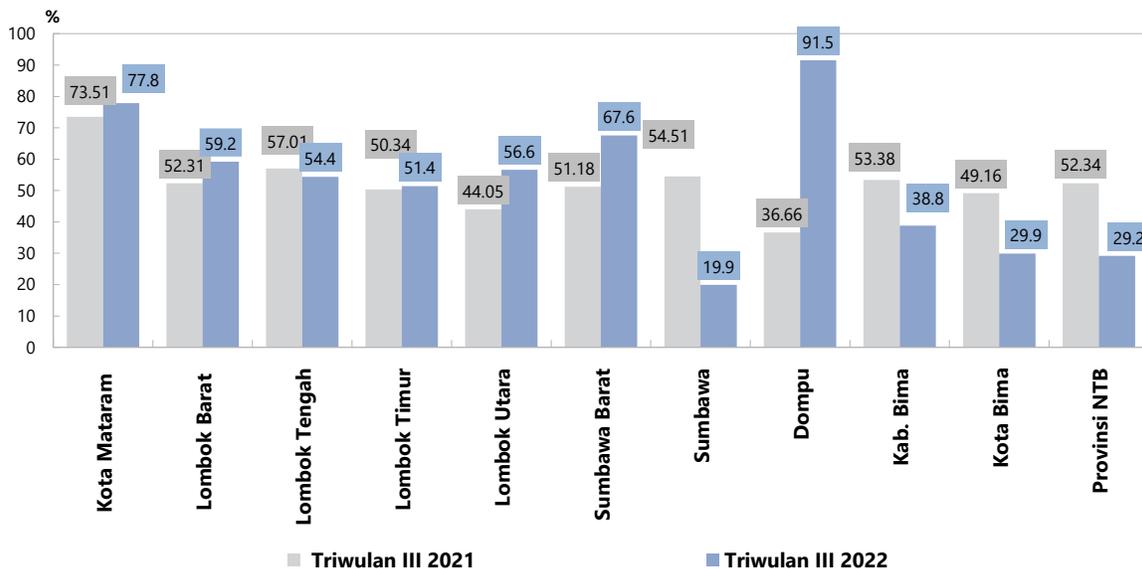
2.5.1 Risiko Fiskal dari Pendapatan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan daerah Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten di Provinsi NTB didominasi oleh Pendapatan Transfer. Pendapatan daerah di Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten Provinsi NTB terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan sudut pandang risiko, APBD akan memiliki ketahanan fiskal yang baik apabila pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dari Pemerintah Pusat. Daerah dengan pendapatan yang berasal dari PAD dengan rasio efektivitas minimal 100% dan rasio kemandirian yang besar (>50%) akan memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik. Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri, terutama dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD.

Rasio Efektivitas

Sebanyak enam Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang mengalami peningkatan rasio efektivitas pada triwulan III 2022 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu. Rasio efektivitas merupakan rasio antara

Realisasi PAD dan Target PAD. Rasio efektivitas total Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten mencapai 41,50%. Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi NTB secara keseluruhan memiliki rasio efektivitas 55,73%, lebih tinggi dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang memiliki rasio sebesar 29,16%. Rasio efektivitas fiskal Pemerintah Kota/Kabupaten yang lebih tinggi tersebut menunjukkan bahwa kinerja fiskal Kota/Kabupaten di Provinsi NTB dalam realisasi PAD relatif lebih baik. Secara spasial, Kota/Kabupaten yang memiliki rasio efektivitas tertinggi adalah Kabupaten Dompu dengan rasio sebesar 91,53%, diikuti oleh Kota Mataram dengan rasio sebesar 77,8%.



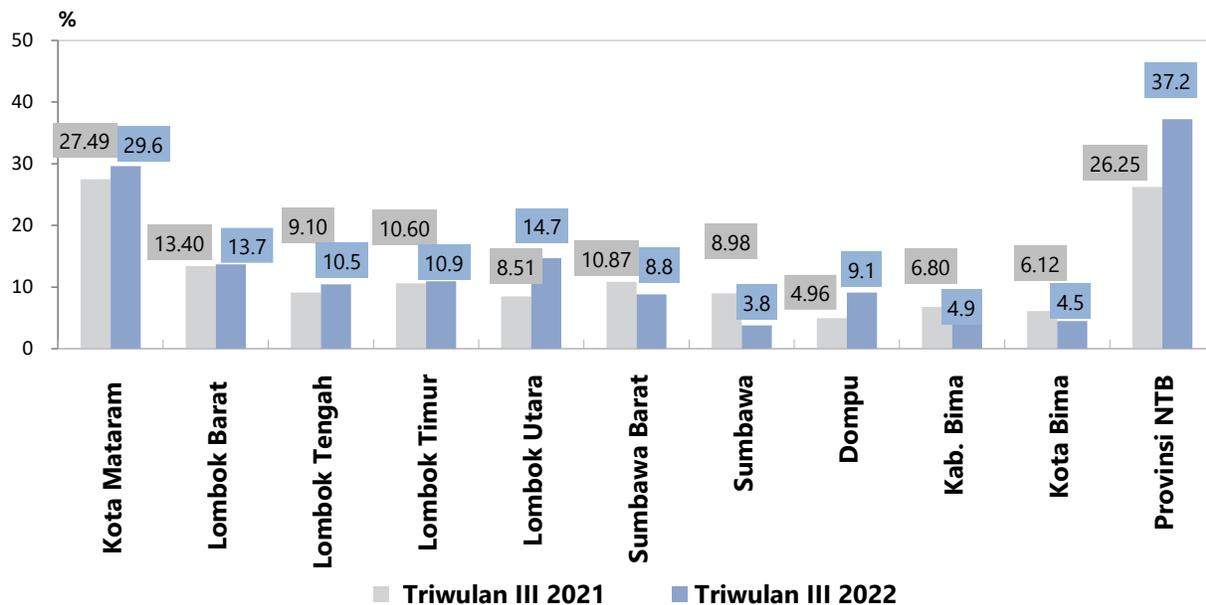
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.12 Rasio Efektivitas Provinsi NTB Triwulan III 2022

Rasio Kemandirian

Keuangan Provinsi NTB dan enam Kabupaten/Kota (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Dompu) mengalami peningkatan rasio kemandirian pada triwulan III 2022 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio kemandirian adalah perbandingan antara Realisasi PAD dan Realisasi Total Pendapatan. Rasio kemandirian yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dan tidak bergantung kepada bantuan eksternal (Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi). Rasio kemandirian yang semakin tinggi juga menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, salah satunya tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan

retribusi daerah. Rasio kemandirian Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten secara keseluruhan pada triwulan III 2022 sebesar 15,33%, menurun dibandingkan triwulan III 2021 yang sebesar 15,70%. Provinsi NTB memiliki rasio kemandirian sebesar 37,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan rasio Kota/Kabupaten di Provinsi NTB yang hanya sebesar 11,31%. Secara spasial, Kota/Kabupaten yang memiliki rasio kemandirian tertinggi adalah Kota Mataram yang sebesar 29,63%. Hal ini menandakan Kota Mataram memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghasilkan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lainnya.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.13 Rasio Kemandirian Provinsi NTB Triwulan III 2022

2.5.2 Risiko Fiskal dari Belanja Pemerintah Daerah

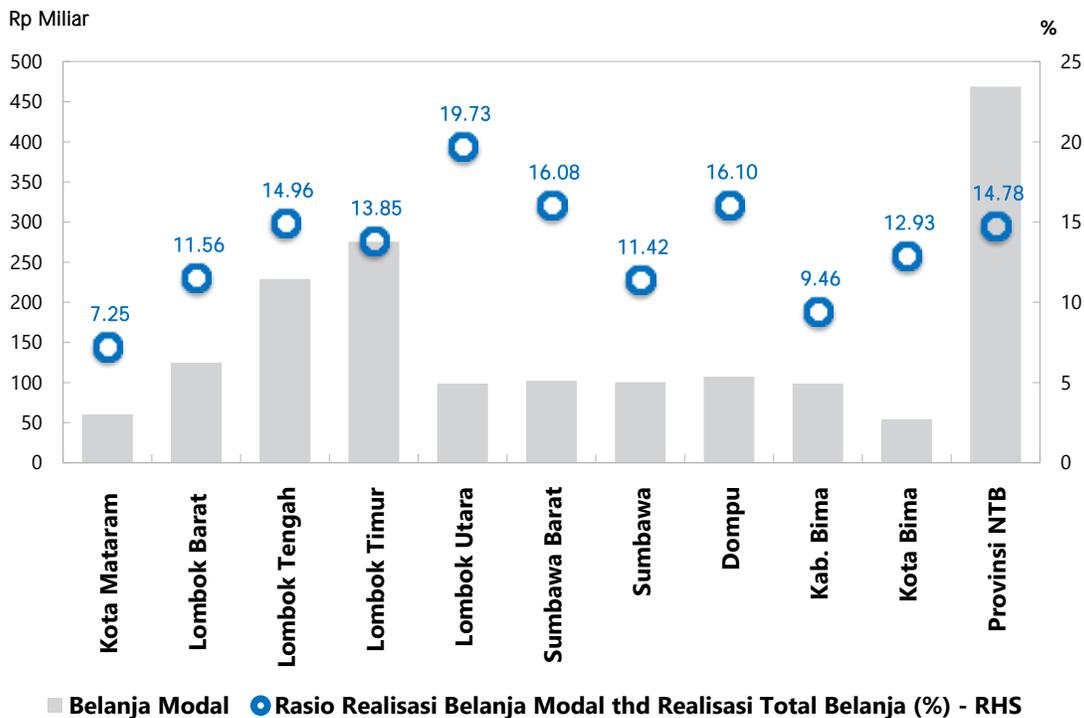
Belanja Modal APBD Total NTB mencapai Rp1,72 triliun, di mana Belanja Modal Provinsi NTB menyumbang sebanyak Rp468,90 miliar, sedangkan APBD Kabupaten/Kota menyumbang sebanyak Rp1,25 triliun. Sama halnya seperti pendapatan, belanja juga merupakan sumber risiko fiskal. Pertumbuhan belanja yang semakin tinggi tanpa dukungan pendapatan yang memadai akan meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh daerah. Pemerintah daerah akan memperoleh manfaat yang berkelanjutan apabila belanja diarahkan pada jenis belanja modal. Hal ini disebabkan belanja modal diperkirakan memiliki *multiplier effects* yang lebih panjang dan berdampak pada sektor-sektor yang lebih luas.

Pangsa penyerapan Belanja Pegawai pada total APBD NTB mencapai **43,94%** dari total realisasi belanja total APBD pada triwulan III 2022. Belanja Pegawai Provinsi NTB berkontribusi sebesar 22,67% dari total Belanja Pegawai pada APBD NTB secara keseluruhan pada triwulan III 2022, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota menyumbang 77,63% dari total Belanja Pegawai APBD NTB secara keseluruhan. Berbeda dengan Belanja Modal yang digunakan untuk kepentingan publik, Pemerintah Daerah menggunakan Belanja Pegawai untuk membiayai operasional pemerintahan.

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Modal terhadap realisasi belanja total APBD NTB pada triwulan III 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio Belanja Modal terhadap belanja total APBD sebesar 13,49%, meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang mencapai 8,91%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pengadaan dan beberapa proyek sarana dan prasarana yang akan direalisasikan pada tahun 2022, seperti mendukung proyek *Mandalika Urban Tourism and Infrastructure* (MUTIP), dan sebagainya. Komponen belanja ini dapat menstimulasi pergerakan ekonomi dalam jangka waktu lebih panjang serta *magnitude* lebih besar dibandingkan Belanja Operasional. Realisasi Belanja Modal yang optimal akan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Rasio penyerapan Belanja Modal APBD Pemerintah Provinsi NTB mencapai **14,78%** dari total belanja, sedangkan rasio penyerapan Belanja Modal APBD Pemerintah Kota/Kabupaten mencapai **13,06%** dari total belanja. Belanja Modal Provinsi NTB tercatat sebesar Rp468,90 miliar yang didorong paling besar oleh Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kontribusi sebesar Rp190,68 miliar atau 40,67% dari total Belanja Modal Provinsi NTB), sedangkan Belanja Modal Kabupaten/Kota secara agregat dikontribusikan paling besar oleh komponen Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kontribusi sebesar Rp682,39 miliar atau 54,54% dari total Belanja Modal agregat Kabupaten/Kota). Secara spasial, Kabupaten Lombok Utara mempunyai rasio realisasi Belanja Modal terhadap total belanja tertinggi di antara Kota/Kabupaten lain di Provinsi NTB dengan rasio sebesar 19,73%, sedangkan Kota Mataram dengan rasio terendah, yaitu hanya mencapai 7,25%.

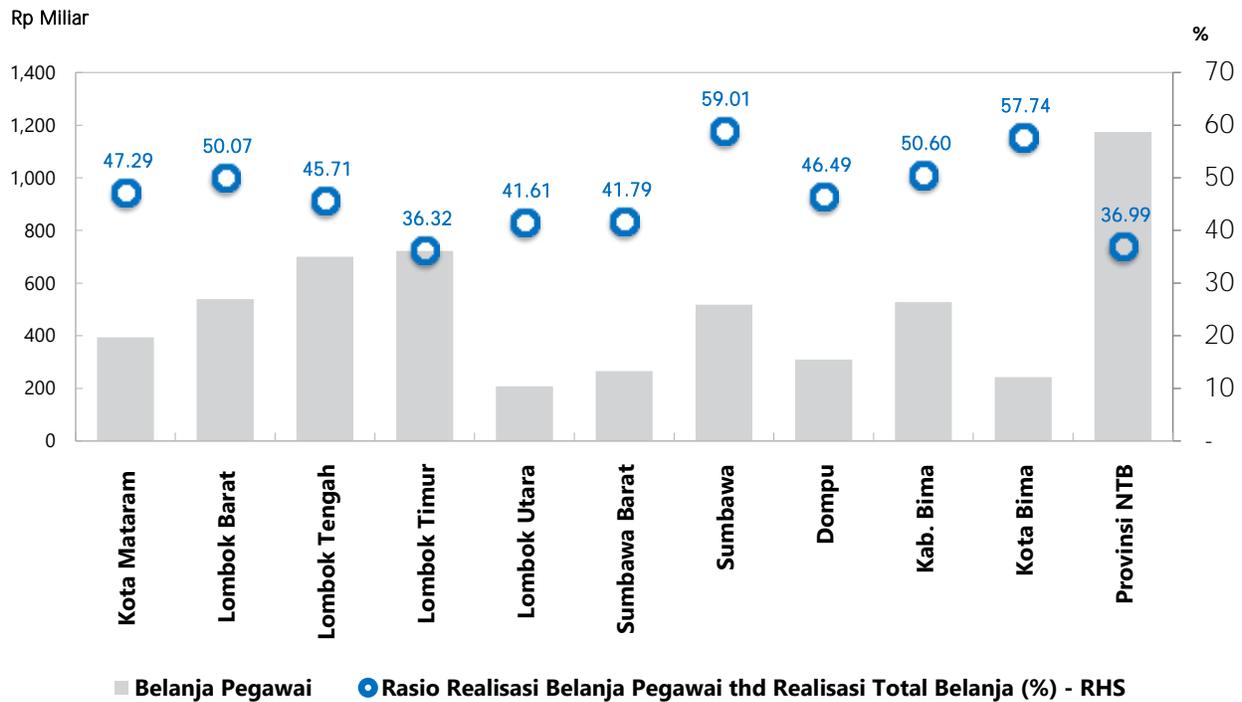


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.14 Penyerapan Belanja Modal Kota/Kabupaten di Provinsi NTB Triwulan III 2022

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Pada triwulan III 2022, rasio penyerapan Belanja Pegawai terhadap penyerapan total belanja APBD NTB sebesar **43,94%**. Pencapaian ini lebih rendah dibandingkan rasio pada triwulan III 2021 yang mencapai 44,31%. Secara spesifik, rasio penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi NTB tercatat sebesar 36,99% dari total belanja, sedangkan rasio penyerapan Belanja Pegawai Pemerintah Kota/Kabupaten NTB sebesar 46,25% dari total belanja. Secara spasial, Kabupaten Sumbawa memiliki rasio penyerapan Belanja Pegawai terhadap total belanja tertinggi sebesar 59,01%, sedangkan Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan rasio penyerapan terendah sebesar 36,32%.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTB, diolah

Grafik 2.15 Penyerapan Belanja Pegawai Kota/Kabupaten di Provinsi NTB Triwulan III 2022

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan PAD Total NTB untuk membiayai Belanja Pegawai dari PAD menurun pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Rasio Belanja Pegawai terhadap PAD menggambarkan alokasi PAD yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pegawai. Rasio Belanja Pegawai terhadap PAD Provinsi NTB dan Kota/Kabupaten secara agregat pada triwulan III 2022 mencapai 257,28%, mencerminkan bahwa belanja pegawai masih lebih besar dibandingkan PAD. Secara spasial, rasio penyerapan Belanja Pegawai terhadap PAD di masing-masing Kota/Kabupaten tercatat lebih dari 100%. Hal ini mencerminkan bahwa seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi NTB belum mampu membiayai belanja pegawai melalui PAD, sehingga perlu ditopang dana transfer untuk mendukung pemenuhan Belanja Pegawai.

BAB 3

INFLASI

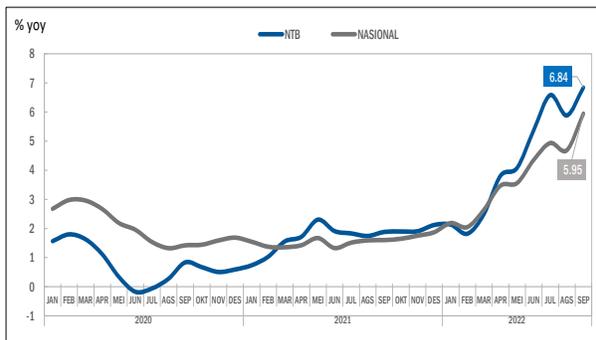
Provinsi NTB pada triwulan III 2022 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi triwulan III 2022 utamanya dipengaruhi oleh kelompok Transportasi serta kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Sementara kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang menyumbangkan penurunan harga (deflasi) secara tahunan pada triwulan III 2022. Secara spasial, inflasi di Kota Mataram dan Kota Bima tercatat sebesar 7,04% (yoy) dan 6,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 5,52% (yoy) dan 4,85% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 diperkirakan berpotensi di atas rentang target inflasi nasional yakni $3\pm 1\%$ (yoy) seiring dengan tren kenaikan harga energi dan komoditas global, serta adanya kebijakan penyesuaian tarif untuk sejumlah komoditas. Upaya penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu terus dilakukan untuk memastikan terkendalinya tekanan inflasi ke depan.

3.1 KONDISI UMUM

Provinsi NTB pada triwulan III 2022 secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,84% (yoy). Tekanan inflasi triwulan III 2022 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 5,37% (yoy). Lebih lanjut, capaian inflasi Provinsi NTB pada triwulan III 2022 lebih tinggi dari capaian inflasi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,89% (yoy) dan inflasi nasional triwulan III 2022 sebesar 5,95% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi triwulan III 2022 utamanya dipengaruhi oleh kelompok Transportasi serta kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Sementara kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang menyumbangkan penurunan harga (deflasi) secara tahunan pada triwulan III 2022.

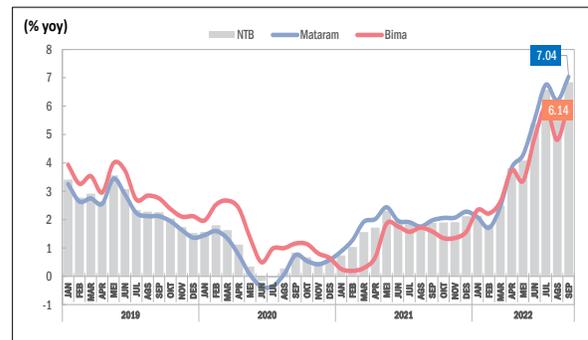
Meningkatnya inflasi kelompok transportasi triwulan III 2022 utamanya bersumber dari kenaikan tekanan harga sub kelompok Jasa Angkutan Penumpang. Komoditas angkutan udara pada triwulan III 2022 tercatat mengalami inflasi 83,73% (yoy), terus mengalami peningkatan setelah

pada triwulan sebelumnya mencapai 70,02% (yoy). Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia pada September 2022, rata-rata terjadi kenaikan harga tarif pesawat hingga 90,37% (yoy) baik untuk rute ke Pulau Jawa maupun Bali. Kondisi ini sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara sebagai dampak dari penerapan *fuel surcharge* oleh maskapai serta tingkat permintaan yang tinggi.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Spasial

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami peningkatan tekanan harga yang disumbang oleh naiknya harga komoditas rokok kretek filter, telur ayam ras, dan tongkol diawetkan. Harga rokok kretek filter tercatat terus mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya harga bahan baku tembakau serta dampak dari peningkatan tarif cukai rokok sebesar 12% sejak awal tahun 2022 dan kenaikan tarif PPN per 1 April 2022. Kenaikan harga telur ayam antara lain dikarenakan terjadinya kenaikan biaya produksi sebagai dampak kenaikan harga pakan unggas, kenaikan permintaan utamanya dari segmen hotel, restoran, dan kafe (horeka) sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, kapasitas produksi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dan terdapat peningkatan permintaan untuk bansos non-tunai (sembako). Sedangkan komoditas tongkol diawetkan mengalami kenaikan harga sejalan dengan cuaca yang kurang kondusif berdampak pada hasil tangkapan ikan yang mengalami penurunan.

Secara spasial, peningkatan tekanan inflasi triwulan III 2022 terjadi baik di Kota Mataram maupun Kota Bima. Pada triwulan III 2022, inflasi di Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing tercatat sebesar 7,04% (yoy) dan 6,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang

masing-masing 5,52% (yoy) dan 4,85% (yoy). Adapun penyumbang inflasi terbesar Kota Mataram adalah kelompok Transportasi sedangkan penyumbang inflasi terbesar Kota Bima adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Tabel 3.1 Komoditas Penyumbang Inflasi Tahunan Provinsi NTB pada Triwulan III 2022

No	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
Komoditas Penyumbang Inflasi			
1	ANGKUTAN UDARA	ANGKUTAN UDARA	ANGKUTAN UDARA
2	BAWANG MERAH	ROKOK KRETEK FILTER	BENSIN
3	MINYAK GORENG	TONGKOL DIAWETKAN	ROKOK KRETEK FILTER
4	TONGKOL DIAWETKAN	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	TELUR AYAM RAS
5	ROKOK KRETEK FILTER	CABAI MERAH	TONGKOL DIAWETKAN
Komoditas Penyumbang Deflasi			
1	TELEPON SELULER	TOMAT	TOMAT
2	BERAS	TELEPON SELULER	TELEPON SELULER
3	DAGING SAPI	BERAS	DAGING SAPI
4	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	DAGING SAPI	TELEVISI BERWARNA
5	TELEVISI BERWARNA	TELEVISI BERWARNA	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG

3.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA

Berdasarkan kelompok komoditas, kenaikan tekanan harga tahunan di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 utamanya didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi. Kelompok transportasi tercatat mengalami kenaikan harga signifikan sebesar 24,57% (yoy) pada triwulan III 2022 setelah pada triwulan sebelumnya tercatat 13,32% (yoy). Kelompok lainnya yang mendorong kenaikan inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (7,84%, yoy), kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya (2,95%, yoy), serta kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran (4,12%, yoy). Di sisi lain, kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan tercatat deflasi 1,06% (yoy).

Tabel 3.2 Ringkasan Perkembangan Inflasi Provinsi NTB

INFLASI KOMODITAS	IHK 2022			MTM 2022			TW III 2022		
	JUL	AGS	SEP	JUL	AGS	SEP	QTQ	YTD	YOY
NASIONAL	124.95	125.95	126.95	0.64	-0.21	1.17	1.60	5.92	6.84
UMUM	112.01	111.12	112.24	1.24%	-0.79%	1.01%	1.45%	6.1%	6.84%
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	118.35	115.95	115.95	1.83%	-2.03%	0.00%	-0.23%	6.5%	7.84%
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	110.66	110.73	110.80	0.41%	0.07%	0.06%	0.54%	2.7%	2.98%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	105.28	105.50	105.72	0.36%	0.20%	0.21%	0.77%	2.7%	2.95%
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	110.43	110.49	111.05	0.15%	0.05%	0.51%	0.71%	3.9%	4.71%
KESEHATAN	107.05	107.47	107.60	0.01%	0.40%	0.11%	0.53%	0.7%	0.76%
TRANSPORTASI	121.34	119.40	128.33	4.19%	-1.60%	7.48%	10.19%	22.4%	24.57%
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	96.56	96.54	96.32	-0.28%	-0.02%	-0.23%	-0.52%	-0.7%	-1.06%
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	107.17	107.28	107.91	0.10%	0.10%	0.59%	0.80%	1.3%	2.12%
PENDIDIKAN	98.65	98.65	98.98	0.94%	0.00%	0.34%	1.28%	2.3%	2.87%
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	107.42	107.42	107.92	0.05%	0.00%	0.47%	0.52%	3.7%	4.12%
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	117.66	118.04	117.41	0.17%	0.32%	-0.53%	-0.04%	2.8%	2.80%

3.2.1 Makanan, Minuman dan Tembakau

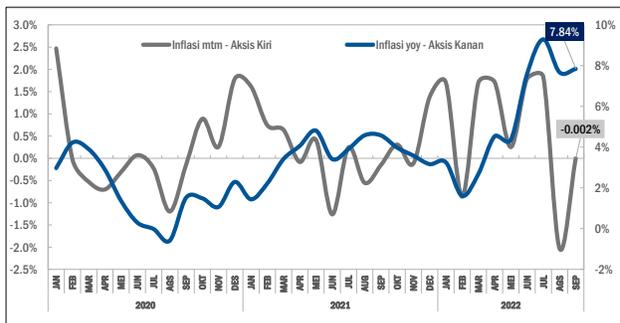
Kelompok komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau pada triwulan III 2022 mengalami inflasi 7,84% (yoy), sedikit meningkat dibanding triwulan II 2022 yang sebesar 7,59% (yoy). Dari kelompok komoditas ini, sub-kelompok Makanan menyumbang inflasi terbesar. Kenaikan harga sub-kelompok ini disumbang oleh naiknya harga komoditas telur ayam ras, tongkol diawetkan dan cabai rawit. Komoditas telur ayam ras mengalami kenaikan sebesar 25,84% (yoy) pada triwulan III 2022, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,59% (yoy). Kenaikan harga telur ayam antara lain dikarenakan terjadinya kenaikan biaya produksi sebagai dampak kenaikan harga pakan unggas, kenaikan permintaan utamanya dari segmen hotel, restoran, dan kafe (horeka) sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata, kapasitas produksi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi, dan terdapat peningkatan permintaan untuk bansos non-tunai (sembako).

Komoditas tongkol diawetkan mengalami inflasi 51,32% (yoy) pada triwulan III 2022. Harga tongkol yang diawetkan meningkat akibat gelombang tinggi yang menghalangi nelayan melaut sehingga terjadi penurunan jumlah tangkapan ikan. BMKG memperkirakan gelombang di kisaran 2,5 sampai dengan 4 meter terjadi di perairan selatan Sumbawa-Sumba dan gelombang yang sangat tinggi di kisaran 4 sampai dengan 6 meter terjadi di perairan Selat Bali-Lombok bagian selatan dan Samudra Hindia Selatan Jawa-NTB. Gelombang tinggi dihasilkan dari angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari Timur-Tenggara dengan kecepatan berkisar 5-20 knot.

Komoditas cabai rawit mengalami inflasi 151,68% (yoy) pada triwulan III 2022. Kenaikan harga yang signifikan dipengaruhi oleh faktor cuaca, hasil panen di sentra Jawa yang kurang optimal, serta kenaikan harga BBM. Cuaca yang kurang kondusif mempengaruhi produktivitas hortikultura di dalam Provinsi NTB khususnya cabai rawit. Cuaca buruk dan serangan hama lalat juga membuat petani cabai rawit di sentra produksi Jawa yaitu Kab. Blitar gagal panen sehingga terdapat peningkatan permintaan pengiriman ke luar daerah yang mengurangi ketersediaan pasokan di wilayah NTB. Selain itu, adanya kenaikan harga BBM pada 1 September 2022 turut mendorong kenaikan harga cabai rawit akibat adanya kenaikan biaya pengangkutan. Lebih lanjut, harga nasional cabai yang tinggi turut mempengaruhi tingkat harga cabai di Provinsi NTB karena sebagian petani/pedagang menggunakan pergerakan harga nasional sebagai referensi penetapan harga untuk pasar di NTB.

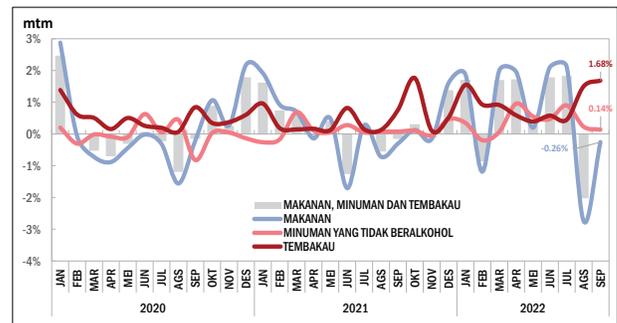
Selain sub-kelompok Makanan, sub-kelompok Tembakau juga mendorong peningkatan inflasi. Hal ini utamanya pada komoditas rokok kretek filter yang tercatat terus mengalami peningkatan sejalan dengan naiknya harga bahan baku tembakau serta dampak dari peningkatan tarif cukai rokok

sebesar 12% sejak awal tahun 2022 dan kenaikan tarif PPN per 1 April 2022. Per September 2022, harga rokok kretek filter tumbuh 12,90% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,12% (yoy). Sampai dengan bulan September 2022, harga rokok telah mengalami inflasi sebesar 10,07% dibandingkan Desember 2021. Kenaikan harga rokok kretek filter diperkirakan akan tetap terjadi sampai dengan akhir tahun.



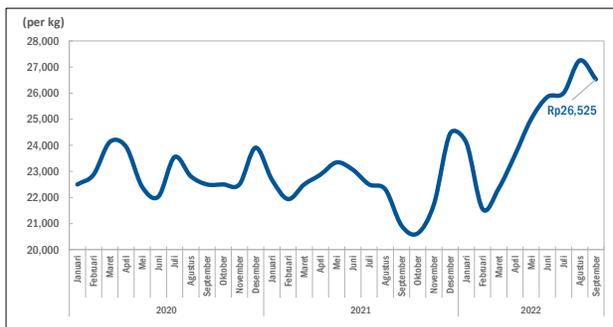
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau



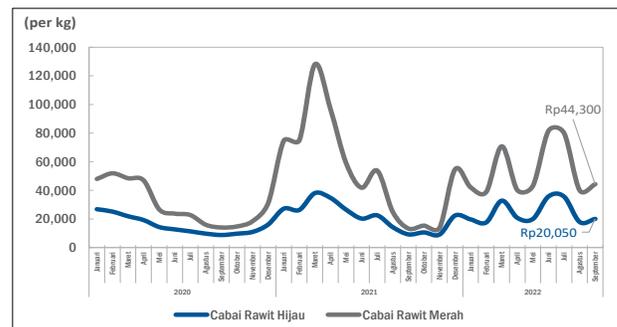
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Makanan, Minuman dan Tembakau



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Harga Komoditas Telur Ayam Ras Provinsi NTB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

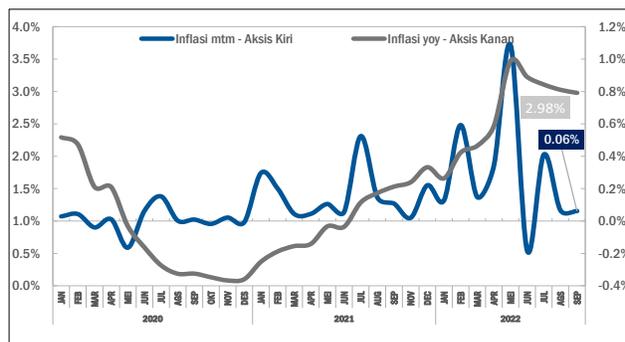
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Komoditas Cabai Rawit Provinsi NTB

Tabel 3.3 Perkembangan Harga Komoditas Bahan Pangan Provinsi NTB

Komoditas	Satuan	Triwulan II						Triwulan III					
		Apr-21	May-21	Jun-21	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Jul-22	Aug-22	Sep-22
Cabai Merah Besar	Rp/kg	Rp39,800	Rp32,250	Rp19,500	Rp31,688	Rp36,625	Rp53,100	Rp15,750	Rp15,875	Rp12,650	Rp63,938	Rp51,313	Rp39,700
Cabai Merah Keriting		Rp49,250	Rp41,563	Rp28,438	Rp32,813	Rp39,688	Rp59,650	Rp29,750	Rp16,563	Rp12,400	Rp76,875	Rp55,313	Rp50,000
Cabai Rawit Hijau		Rp34,750	Rp26,500	Rp20,250	Rp20,750	Rp20,000	Rp35,750	Rp22,500	Rp14,250	Rp9,200	Rp35,625	Rp17,875	Rp20,050
Cabai Rawit Merah		Rp96,750	Rp59,063	Rp41,813	Rp40,125	Rp43,125	Rp81,550	Rp53,750	Rp24,875	Rp13,300	Rp80,000	Rp40,000	Rp44,300
Bawang Merah		Rp28,500	Rp27,000	Rp25,313	Rp30,000	Rp32,125	Rp42,100	Rp25,500	Rp26,250	Rp21,600	Rp52,188	Rp32,063	Rp26,050
Tomat Sayur		Rp9,450	Rp10,563	Rp7,563	Rp9,250	Rp8,313	Rp16,800	Rp15,125	Rp16,938	Rp10,200	Rp19,188	Rp9,125	Rp4,250

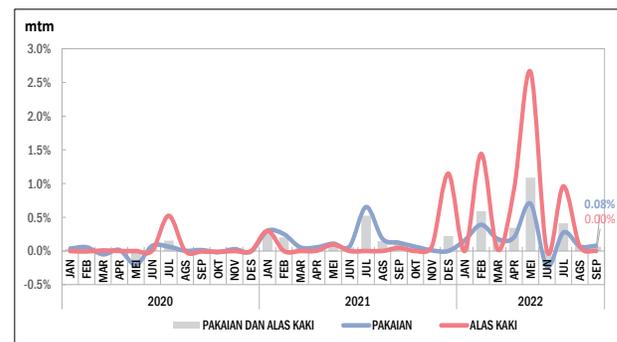
3.2.2 Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki pada triwulan III 2022 mengalami inflasi 2,98% (yoy), menurun dibandingkan triwulan II 2022 (Grafik 3.8). Tekanan harga terutama berasal dari komoditas sepatu dan seragam sekolah sejalan dengan diberlakukannya kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Kenaikan permintaan ini terjadi secara nasional, yang terlihat dari utilisasi industri kulit, barang jadi kulit dan alas kaki nasional yang mengalami kenaikan sebesar 84,49% pada bulan Juli 2022 apabila dibandingkan dengan utilisasi sebelum pandemi sekitar 80,18%. Komoditas penyumbang kenaikan tekanan inflasi selanjutnya adalah komoditas jilbab/kerudung jelang perayaan Maulid Nabi di awal Oktober 2022. Perayaan Maulid Nabi sendiri di Provinsi NTB dirayakan dalam jangka waktu satu bulan. Selain karena peningkatan permintaan, kenaikan harga pakaian dan alas kaki tersebut seiring dengan kenaikan harga bahan baku global. Per triwulan III 2022, harga Fiber US Textile tumbuh 3,32% (yoy), melanjutkan pertumbuhan di triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 10,01% (yoy). Kenaikan harga fiber ini diindikasikan merupakan transmisi dari kenaikan harga minyak global.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Komoditas Pakaian dan Alas Kaki



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

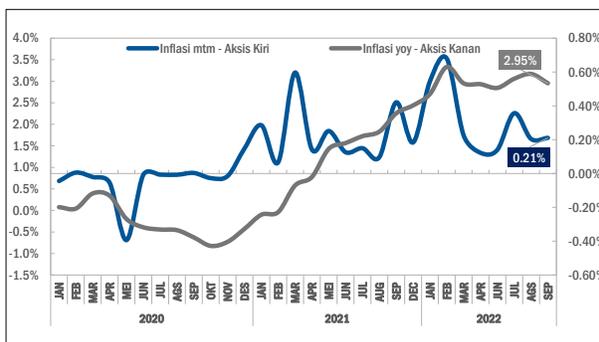
Grafik 3.8 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Pakaian dan Alas Kaki

3.2.3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya pada triwulan III 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,95% (yoy), tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,84% (yoy). Meningkatnya tekanan harga pada kelompok ini terutama disebabkan oleh sub-kelompok Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya akibat kenaikan harga komoditas Bahan Bakar

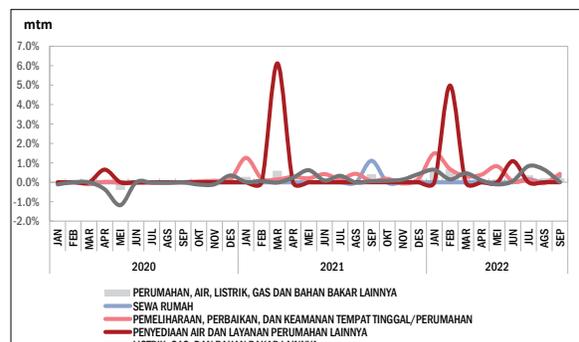
Rumah Tangga. Komoditas ini menyumbang inflasi sebesar 0,20% (yoy) pada September 2022, lebih tinggi dibandingkan bulan Juni 2022 yang sebesar 0,15% (yoy). Kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga ini terjadi secara nasional seiring dengan kenaikan harga bahan baku minyak di tingkat global. Pada tahun 2022, normalisasi permintaan dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina telah menaikkan harga minyak dunia dalam kisaran 90-100 USD per barel, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang berada dalam kisaran 50-80 USD per barel.

Kelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal/Perumahan turut mendorong kenaikan tekanan harga yang lebih tinggi. Kenaikan harga terjadi di semua komoditas di sub-kelompok ini, kecuali Keramik, utamanya di upah Tukang Bukan Mandor yang menyumbang 0,06% (yoy). Kenaikan upah ini mengikuti kenaikan upah minimum di Provinsi NTB. Pada tahun 2022, Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB mengalami kenaikan sebesar 1,07%. Sedangkan di ibukota provinsi yaitu kota Mataram, upah minimum mengalami kenaikan sebesar 10,64% dibandingkan tahun 2021. Selain kenaikan upah tukang, komoditas lain seperti cat, semen, pasir, paku dan sebagainya juga mengalami kenaikan harga dibandingkan tahun lalu akibat kenaikan permintaan sejalan dengan *recovery* ekonomi serta kenaikan harga bahan baku global.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.10 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya

3.2.4 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

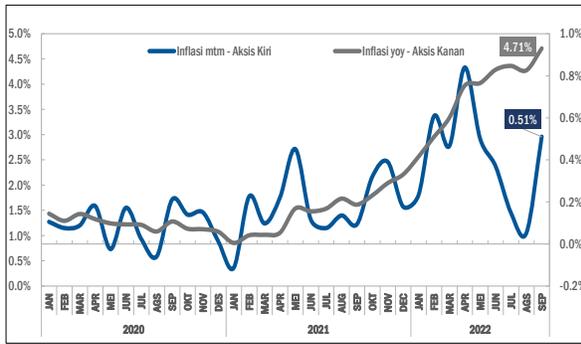
Inflasi kelompok komoditas Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga meningkat pada triwulan III 2022 dengan capaian inflasi 4,71% (yoy), lebih tinggi dibanding 4,28% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kenaikan tekanan inflasi didorong oleh sub-kelompok

Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan Rumah Tangga Rutin, yaitu komoditas sabun detergen bubuk/cair yang mengalami peningkatan harga yang dipicu oleh tren kenaikan harga CPO (*crude palm oil*). Produk sabun dan deterjen terbuat dari bahan oleokimia yang juga merupakan produk turunan atau hilirisasi dari minyak sawit sehingga hal ini juga berdampak pada kenaikan biaya produksi yang selanjutnya dibebankan pada konsumen. Harga CPO di level dunia di tahun 2022 sudah meningkat dari awal tahun yaitu 52,79% (yoy) di triwulan I 2022 dan 45,99% (yoy) di triwulan II 2022. Pada triwulan III 2022, harga sudah menurun menjadi -16,24% (yoy), namun transmisi penurunan harga CPO belum terjadi di manufaktur barang jadi.

Sub-kelompok Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum menyumbang inflasi terbesar selanjutnya dengan inflasi 6,95% (yoy). Sub-kelompok ini terdiri dari komoditas penunjang kegiatan makanan dan minuman seperti Panci, Gelas dan Piring. Kenaikan harga komoditas tersebut sejalan dengan peningkatan kegiatan tempat makan dan restoran semenjak menurunnya kasus COVID-19. Hal ini terlihat dari pergerakan masyarakat di kawasan *retail* dan rekreasi menurut Google Mobility Index yang telah mencapai angka rata-rata 32,49 di atas *baseline* sebelum pandemi, meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang rata-rata sebesar 26,13.

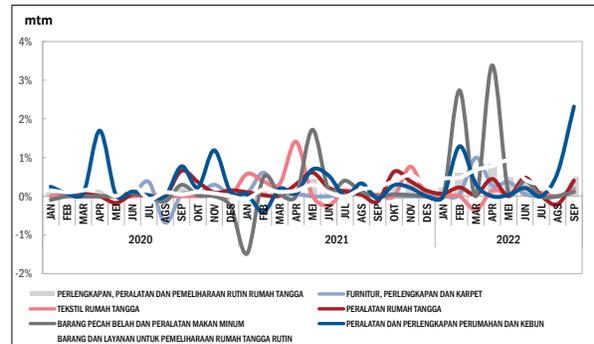
3.2.5 Kesehatan

Kelompok Kesehatan pada triwulan III 2022 mengalami inflasi sebesar 0,76% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,50% (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok tersebut disebabkan oleh kenaikan harga Tarif Dokter Spesialis, Obat Dengan Resep dan Vitamin. Peningkatan harga komoditas ini seiring dengan penambahan kasus COVID-19 pada triwulan III 2022 dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2022, di Provinsi NTB terdapat 157 kasus baru COVID-19, meningkat dari 133 kasus di triwulan II 2022. Selain itu, kenaikan harga obat dan vitamin terjadi secara global. Gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menyebabkan adanya kekurangan bahan baku. Selanjutnya, hambatan pasokan energi global menyebabkan lonjakan biaya listrik dan gas alam dunia. Faktor-faktor ini ditambah dengan kenaikan biaya pengiriman, bencana cuaca, dan konflik Rusia-Ukraina mengakibatkan lonjakan harga yang besar untuk bahan baku. Di Indonesia, pada tahun 2022 Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia memperkirakan harga obat akan meningkat di kisaran 15% sampai dengan 20% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan di Provinsi NTB, harga obat telah meningkat 0,68% per September 2022 dibandingkan Desember 2021, demikian pula dengan vitamin yang telah meningkat 1,30%.



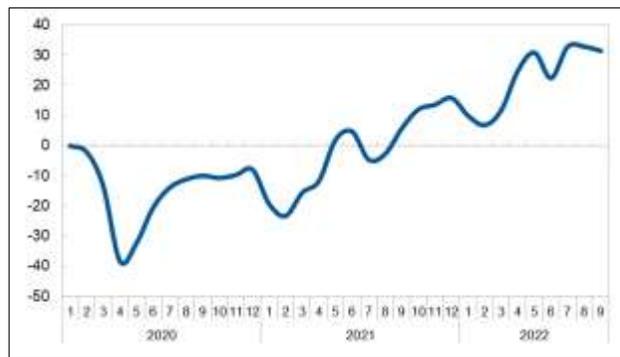
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Komoditas Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga



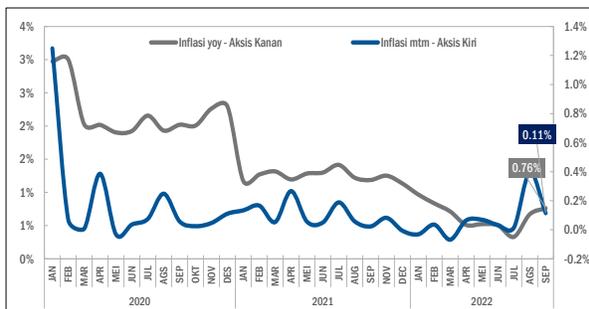
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Komoditas Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga



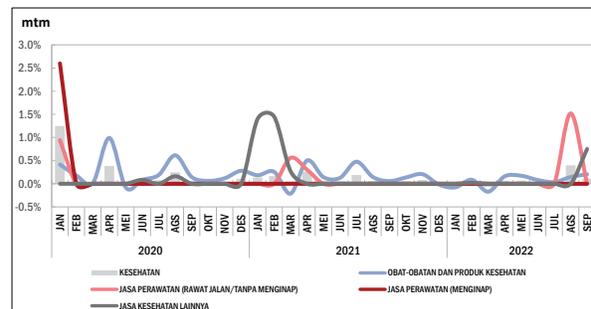
Sumber: Google Mobility Index

Grafik 3.13 Perkembangan Mobilitas Masyarakat di tempat Ritel dan Rekreasi



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Inflasi Komoditas Kesehatan



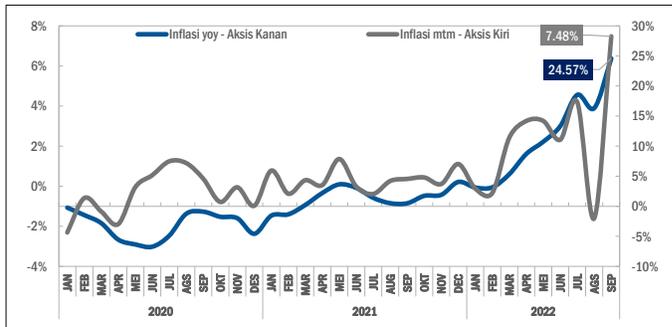
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.15 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Kesehatan

3.2.6 Transportasi

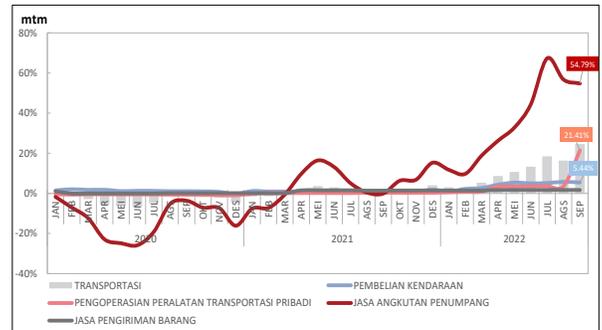
Kelompok Transportasi pada triwulan III 2022 mengalami inflasi sebesar 24,57% (yoy), melanjutkan peningkatan setelah pada triwulan sebelumnya tercatat inflasi 13,32% (yoy), sejalan dengan kenaikan tarif Angkutan Udara. Peningkatan inflasi didominasi oleh sub-kelompok Jasa Angkutan Penumpang yang didorong oleh kenaikan harga Angkutan Udara. Kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi oleh penyesuaian biaya (*fuel surcharge*) oleh maskapai. Kenaikan harga avtur telah diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (*Fuel Surcharge*) yang mulai berlaku sejak 18 April 2022. Pertumbuhan harga pada triwulan III 2022 juga terpengaruh *base effect*, dikarenakan mobilitas pesawat pada triwulan III 2021 mengalami penurunan signifikan akibat merebaknya varian delta COVID-19. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia, pada triwulan III 2022 tarif angkutan udara *low-cost carrier* dari Pulau Lombok naik 104,98% (yoy), meningkat dari triwulan II 2022 yang tumbuh 65,17% (yoy). Kenaikan harga pesawat tidak menyurutkan jumlah permintaan. Jumlah penumpang datang dan berangkat dari Bandara Internasional Lombok pada triwulan III 2022 masih meningkat 1,57% dari triwulan II 2022. Secara tahunan, jumlah penumpang meningkat 252,08% (yoy) dibandingkan triwulan III 2021.

Tekanan inflasi sub-kelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi adalah penyumbang inflasi kelompok Transportasi terbesar kedua. Inflasi pada sub-kelompok ini didorong oleh kenaikan harga komoditas bensin dengan sumbangan inflasi sebesar 1,10% (yoy) sejalan dengan dengan kebijakan kenaikan BBM subsidi dan non subsidi (Pertalite, Pertamina, Solar) secara serentak per 3 September 2022. Harga BBM Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter, harga Solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter dari Rp5.150 per liter, dan harga Pertamina non-subsidi menjadi Rp14.500 per liter dari Rp12.500 per liter. Meski sempat terjadi penurunan harga Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada 1 September 2022, namun dari sisi dampak tercatat masih relatif terbatas karena pangsa konsumsi produk-produk tersebut di NTB relatif kecil.



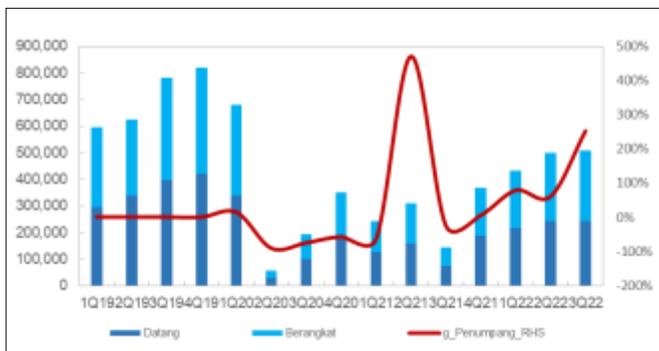
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.16 Perkembangan Inflasi Komoditas Transportasi



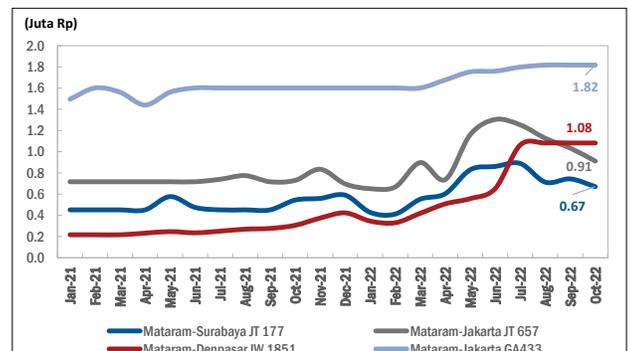
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.17 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Transportasi



Sumber: AP2 Lombok, diolah

Grafik 3.18 Pertumbuhan Penumpang Pesawat Bandara Internasional Lombok



Sumber: Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia

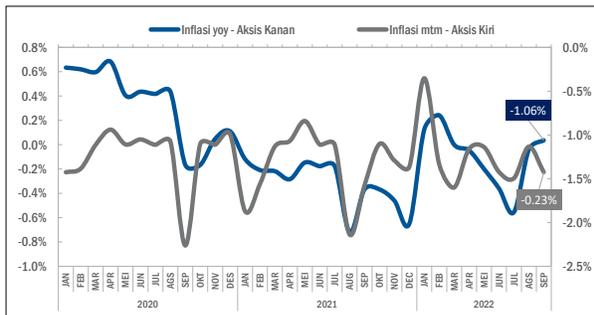
Grafik 3.19 Perkembangan Tarif Tiket Pesawat

3.2.7 Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan pada triwulan III 2022 kembali mencatatkan deflasi sebesar 1,06% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya juga mengalami deflasi 1,61% (yoy). Deflasi terbesar disumbang oleh sub-kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi yang utamanya didorong oleh penurunan harga Telepon Seluler. Penurunan harga ini didorong oleh penurunan permintaan setelah pemerintah melonggarkan aturan PPKM dan mengizinkan masyarakat untuk melakukan perjalanan setelah pembatasan dalam dua tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya biaya perjalanan, masyarakat menghabiskan lebih sedikit uang untuk membeli gawai dibandingkan tahun lalu. Selain itu, belanja konsumen bergeser ke area lain seperti

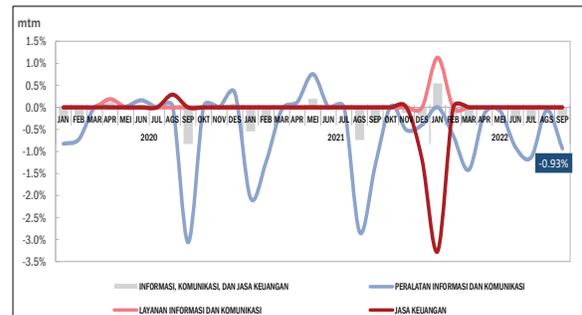
makanan dan transportasi, seiring dengan aktivitas yang kembali normal. Penurunan permintaan ini terjadi secara global, menurut data perusahaan analisis teknologi global yaitu Canalis, pasar ponsel global pada triwulan III 2022 menurun 9% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu.

Deflasi sub-kelompok Jasa Keuangan menjadi penyumbang deflasi selanjutnya. Komoditas Biaya Administrasi Transfer Uang menyumbang deflasi terbesar di sub-kelompok ini. Penurunan ini sejalan dengan mulai diluncurkannya sistem BI-Fast per 21 Desember 2021. BI-Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran ritel sepanjang waktu dan seketika (*real time*). Sampai dengan Juni 2022 sudah terdapat 52 bank yang menjadi peserta BI-Fast. Sistem ini membuat biaya transfer antarbank menurun menjadi maksimal Rp 2.500 per transaksi dari yang sebelumnya Rp 6.500 per transaksi. Dengan penurunan Biaya Administrasi Transfer Uang, sub-kelompok Jasa Keuangan tercatat menyumbang deflasi 0,02% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.20 Perkembangan Inflasi Komoditas Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan



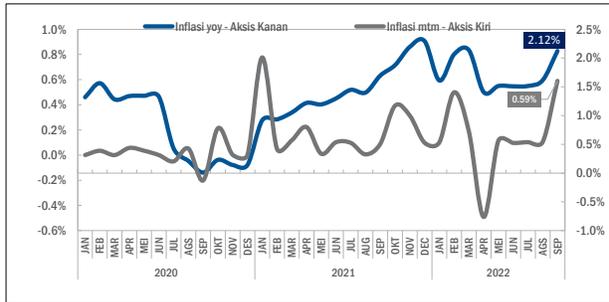
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.21 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

3.2.8 Rekreasi, Olahraga dan Budaya

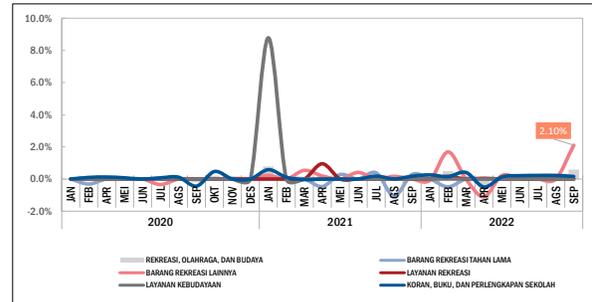
Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya pada triwulan III 2022 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,51% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi tersebut didorong oleh sub-kelompok Koran, Buku, Dan Perlengkapan Sekolah yang tercatat mengalami inflasi 0,02% (yoy) yang didorong oleh dengan kenaikan harga Buku Tulis Bergaris, Buku Pelajaran SD, dan Tas Sekolah. Kenaikan harga komoditas tersebut didorong oleh kenaikan permintaan di tahun ajaran baru 2022/2023 yang sudah berjalan normal seperti biasa secara tatap muka setelah dua tahun terakhir dilakukan secara daring. Selain itu, sub-kelompok Barang Rekreasi Lainnya menyumbang inflasi

terbesar kedua di kelompok komoditas ini. Komoditas Mainan Anak dan Sepeda Anak utamanya mendorong kenaikan harga di sub-kelompok tersebut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.22 Perkembangan Inflasi Komoditas Rekreasi, Olahraga dan Budaya

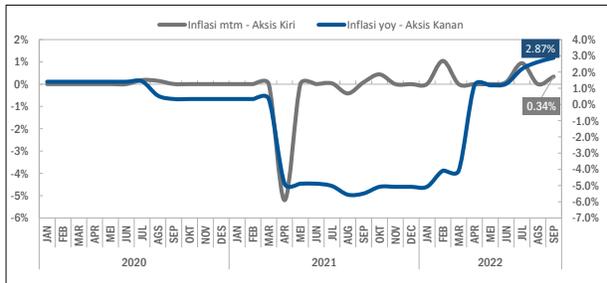


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.23 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

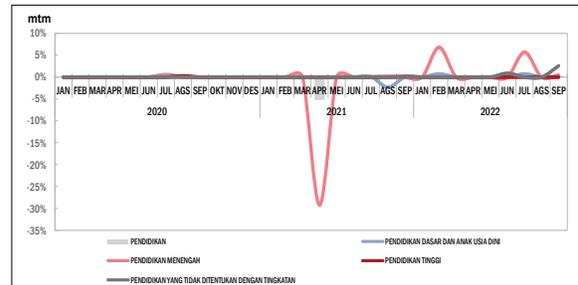
3.2.9 Pendidikan

Kelompok Pendidikan pada triwulan III 2022 tercatat mengalami inflasi 2,87%, meningkat setelah pada triwulan sebelumnya mengalami inflasi 1,27% (yoy). Sub-kelompok yang menyumbang inflasi tertinggi adalah Pendidikan Menengah, utamanya Sekolah Menengah Atas (SMA). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, biaya pendidikan SMA di Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 18,29% (yoy). Selanjutnya, sub-kelompok Pendidikan Dasar dan Anak Dini menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua. Inflasi sub-kelompok ini didorong oleh kenaikan biaya Sekolah Dasar (SD). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, biaya pendidikan SD di Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 6,22% (yoy). Peningkatan biaya pendidikan terjadi seiring dengan kenaikan aktivitas pembelajaran yang didorong oleh pembelajaran tatap muka dan penghapusan keringanan pembayaran 50 persen untuk (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) BPP yang pada tahun 2021 dihimbau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grifik 3.24 Perkembangan Inflasi Komoditas Pendidikan

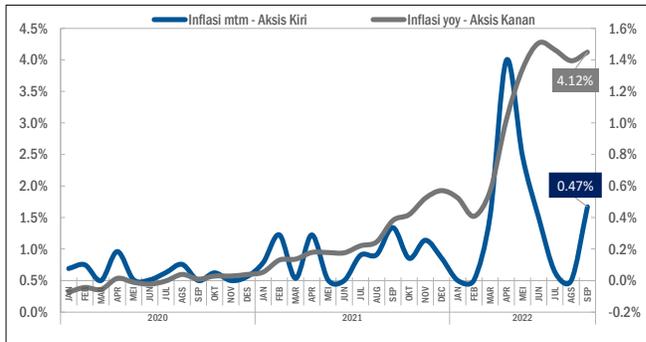


Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grifik 3.25 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pendidikan

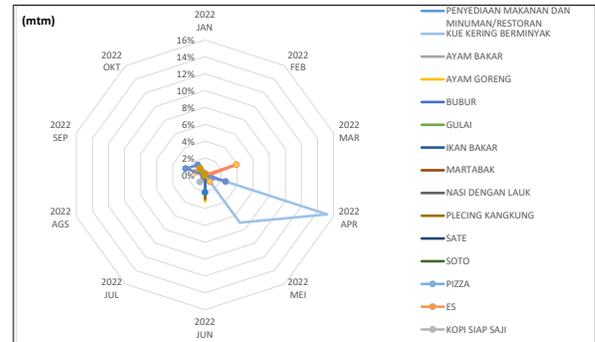
3.2.10 Penyediaan Makan dan Minuman/Restoran

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada triwulan III 2022 mengalami inflasi sebesar 4,12 (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 4,27 (yoy). Inflasi kelompok ini merupakan indikasi peningkatan konsumsi makanan jadi di Provinsi NTB, yang merupakan salah satu indikator positif perbaikan kinerja ekonomi NTB pada periode laporan. Peningkatan intensitas penyediaan makanan dan minuman/restoran juga tercermin pada peningkatan kinerja Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tercatat mengalami pertumbuhan 38,79% (yoy). Meningkatnya harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran pada triwulan III 2022 turut didorong oleh perbaikan kedatangan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara sejalan dibukanya kembali rute *direct flight* internasional ke Lombok, serta kembali meningkatnya kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE). Permintaan sektor hotel, restoran, dan café terindikasi mulai menguat seiring dengan kebijakan pelonggaran level PPKM yang berdampak pada diperbolehkannya kembali makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas normal sehingga turut mendorong *demand* penyediaan makanan/minuman. Selain itu dampak kenaikan harga komoditas minyak goreng dan bahan bakar secara tidak langsung juga turut mendorong peningkatan biaya produksi sehingga berdampak pada kenaikan harga makanan jadi.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.26 Perkembangan Inflasi Komoditas Penyediaan Makan dan Minuman/Restoran



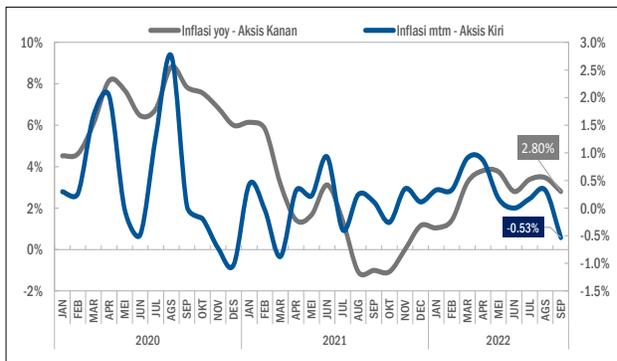
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Tabel 3.27 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Penyediaan Makan dan Minuman/Restoran

3.2.11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

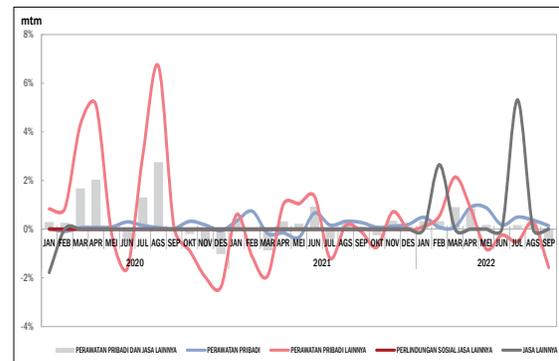
Kelompok komoditas Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya pada triwulan III 2022 mengalami inflasi sebesar 2,80% (yoy), stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tercatat inflasi 2,80% (yoy). Sub-kelompok Perawatan Pribadi menyumbang inflasi terbesar di kelompok ini. Peningkatan harga utamanya didorong oleh komoditas sabun mandi, shampo, dan pasta gigi akibat peningkatan harga dari produsen sejalan dengan tren peningkatan harga CPO global juga berpengaruh terhadap naiknya harga jual minyak sawit mentah yang menjadi bahan dasar penyusun beragam jenis komoditas tersebut. Salah satu produsen produk perawatan pribadi terbesar di Indonesia, menyatakan kenaikan harga komoditas yang terjadi memengaruhi komponen biaya sebesar 15-20%.

Di sisi lain, penurunan harga emas di sub-kelompok Perawatan Pribadi Lainnya menahan peningkatan inflasi kelompok yang lebih tinggi. Penurunan tekanan harga komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global. Emas perhiasan memberikan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24% (yoy) pada triwulan III 2022, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi 1,76% (yoy). Per bulan September 2022, rata-rata harga emas perhiasan di NTB adalah Rp825.625/gram, relatif menurun dibandingkan dengan harga Juni 2022 sebesar Rp860.950/gram.



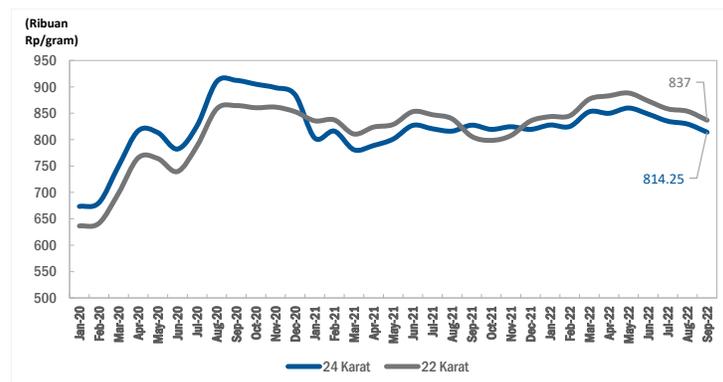
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.28 Perkembangan Inflasi Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.29 Perkembangan Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya



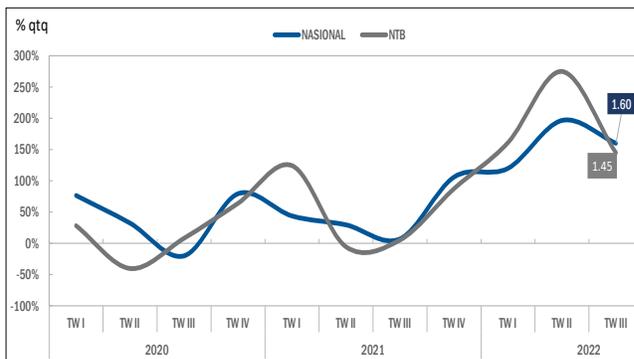
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.30 Perkembangan Harga Emas Perhiasan

3.3 Inflasi Triwulanan

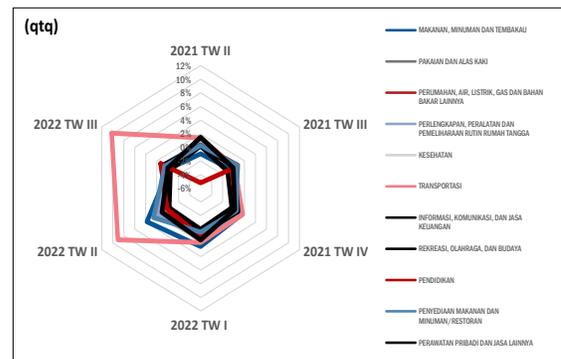
Pada triwulan III 2022, secara triwulanan Provinsi NTB tercatat mengalami inflasi sebesar 1,45% (qtq), menurun dibandingkan dengan triwulan II 2022 yang mengalami inflasi sebesar 2,75% (qtq). Secara triwulanan, inflasi pada triwulan III 2022 terutama disebabkan oleh kelompok Transportasi, terutama komoditas bensin yang mengalami peningkatan harga pada 3 September 2022. Harga BBM Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp7.650 per liter, harga Solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter dari Rp5.150 per liter, dan harga Pertamina nonsubsidi menjadi Rp14.500 per liter dari Rp12.500 per liter.

Sub-Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya menjadi penyumbang inflasi triwulanan terbesar kedua. Komoditas Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi pendorong utama inflasi di kelompok ini. Kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga ini terjadi secara nasional seiring dengan kenaikan harga bahan baku global yaitu minyak. Pada tahun 2022, normalisasi permintaan dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina telah menaikkan harga minyak dunia dalam kisaran 90-100 USD per barel, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang berada dalam kisaran 50-80 USD per barel.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.31 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 3.32 Perkembangan Inflasi Triwulanan Provinsi NTB Berdasarkan Komoditas

3.4 INFLASI SPASIAL

Secara tahunan, Kota Mataram dan Kota Bima mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan III 2022. Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 7,04% (yoy) dan Kota Bima mengalami inflasi sebesar 6,14% (yoy), relatif meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang masing-masing tercatat inflasi sebesar 5,52% (yoy) dan 4,85% (yoy). Inflasi di kedua kota melanjutkan tren kenaikan inflasi seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi bersamaan dengan penurunan kasus COVID-19.

Inflasi di Kota Mataram pada triwulan III 2022 didorong oleh meningkatnya harga kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 9,09% (yoy) dengan sumbangan utama dari komoditas Tongkol Diawetkan (sumbangan: 0,31%, yoy), Rokok Kretek Filter (sumbangan: 0,27%, yoy), dan Telur Ayam Ras (sumbangan: 0,25% yoy). Kenaikan harga tongkol

diawetkan disebabkan oleh cuaca yang kurang kondusif sehingga berdampak pada hasil tangkapan ikan yang mengalami penurunan. Sedangkan kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh kenaikan bea cukai rokok yang ditransmisikan kepada harga produk. Adapun kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh kenaikan harga pakan yang tinggi. Selain kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Transportasi menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar di Kota Mataram. Komoditas bensin menjadi pendorong inflasi dalam kelompok tersebut sejalan dengan kenaikan harga bensin secara nasional pada tanggal 3 September 2022. Inflasi Kota Mataram yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan tekanan harga kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yang didorong oleh penurunan harga telepon seluler seiring dengan penurunan permintaan.

Inflasi di Kota Bima pada triwulan III 2022 didorong oleh meningkatnya harga kelompok Transportasi yang didorong oleh komoditas Angkutan Udara. Komoditas Angkutan Udara mengalami inflasi 100,57% (yoy) pada triwulan III 2022, akibat peningkatan permintaan serta kenaikan biaya bahan bakar angkutan udara. Selain itu, komoditas Bensin menjadi penyumbang inflasi berikutnya seiring dengan peningkatan harga bensin secara nasional. Di kota Bima, bensin mengalami inflasi sebesar 26,38% (yoy). Rokok kretek filter juga turut menjadi penyumbang inflasi seiring transmisi kenaikan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 12,5% per 1 Januari 2022 yang masih terus berlanjut secara *gradual*. Tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh turunnya harga tomat seiring dengan pasokan yang meningkat akibat masa panen.

Tabel 3.4 Perkembangan Inflasi Spasial per Kelompok Pengeluaran

INFLASI KOMODITAS	MATARAM (YOY)			BIMA (YOY)		
	APR	MEI	JUN	APR	MEI	JUN
UMUM	3.83%	4.29%	5.52%	3.74%	3.36%	4.85%
MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	4.78%	5.03%	8.23%	3.71%	2.22%	5.51%
PAKAIAN DAN ALAS KAKI	2.85%	4.24%	3.91%	1.50%	1.52%	1.49%
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	3.17%	3.14%	3.14%	1.52%	0.98%	1.06%
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	4.63%	4.68%	4.86%	2.21%	2.26%	2.76%
KESEHATAN	0.28%	0.33%	0.30%	1.15%	1.07%	1.07%
TRANSPORTASI	7.82%	9.94%	12.57%	11.20%	13.01%	15.49%
INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	-2.56%	-2.84%	-3.13%	3.34%	3.36%	3.36%
REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	1.05%	1.18%	1.05%	2.83%	2.83%	3.32%
PENDIDIKAN	1.32%	1.32%	1.44%	0.55%	0.55%	0.55%
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	3.80%	4.81%	5.25%	0.11%	0.11%	0.41%
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	3.69%	3.77%	2.68%	4.18%	3.71%	3.19%

Sumber : BPS, diolah

3.5 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama Satgas Pangan NTB secara intensif memantau dan melakukan upaya pengendalian harga, terutama untuk menekan kenaikan harga komoditas bahan pangan strategis. Sepanjang triwulan III 2022, TPID Provinsi NTB bersama Satgas Pangan NTB terus melakukan pemantauan harga dan stok komoditas di pasar, koordinasi secara rutin dengan dinas/instansi terkait, dan pasar murah untuk kebutuhan pokok (pangan).

Upaya-upaya yang telah dilakukan TPID Provinsi NTB untuk memperkuat pengendalian harga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Langkah Pengendalian Inflasi Provinsi NTB

No	Aspek	Langkah Pengendalian
1	Ketersediaan Pasokan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengakselerasi program GERDAL OPT (Gerakan Pengendalian) dan pelayanan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang telah dialokasikan di beberapa desa yang merupakan sentra bawang merah di Provinsi NTB. b. Mengakselerasi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk menanam cabai di lahan pekarangan anggotanya. c. Melakukan pengecekan ke pasar hewan dan Rumah Potong Hewan (RPH) dengan bekerja sama dengan Polres Lombok Tengah, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan terkait dengan antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK). d. Melanjutkan upaya Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mengatasi surplus defisit bahan pangan. e. Mengakselerasi Program "Kampung Unggas" yang merupakan salah satu program industrialisasi di Sektor peternakan. f. Memfokuskan peningkatan populasi sapi melalui pemeliharaan sapi di <i>food estate</i> Labangka dengan bekerjasama dengan pihak swasta terkait dengan pengembangbiakan dan penggemukan sapi. g. Melakukan penyerapan jagung langsung dari petani untuk menjaga pasokan jagung berdasarkan MoU antara BULOG dan Dinas Pertanian Kab. Dompu.

Tabel 3.5 Langkah Pengendalian Inflasi Provinsi NTB

No	Aspek	Langkah Pengendalian
		h. Bekerja sama dengan Bulog untuk melakukan pengadaan bahan pokok yang sedang mengalami kekurangan pasokan misalnya minyak goreng, gula pasir, dan kedelai.
2	Kelancaran Distribusi	<p>a. Pemantauan arus distribusi pangan keluar masuk Prov. NTB melalui enumerator yang ada di Pelabuhan Badas, Lembar, Bima dan Serumbung secara berkala untuk mengantisipasi adanya barang masuk/keluar secara ilegal yang dapat membuat pasokan di dalam NTB berkurang/berlebihan.</p> <p>b. Koordinasi intens dengan Bandara Internasional Lombok (PT Angkasa Pura I, Persero) untuk menjamin kelancaran arus logistik.</p> <p>c. TPID melalui Disperindag terus mengawal distribusi minyak goreng supaya tidak terjadi penimbunan dan kelangkaan stok.</p> <p>d. Monitoring kelancaran arus pengiriman barang jadi (komoditas manufaktur) dari Jawa Timur & Bali.</p>
3	Keterjangkauan Harga	<p>a. Melakukan pemantauan harga secara rutin (Sidak Pasar), baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Pemantauan tersebut merupakan sinergi antara Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Bulog Divre, dan Satgas Pangan.</p> <p>b. Mengadakan Operasi Pasar Murah (OPM) untuk komoditas pangan strategis bekerja sama dengan instansi/OPD terkait di empat pasar setiap hari di bulan September 2022 dengan total 124 kali frekuensi OPM.</p> <p>c. Melaksanakan Operasi Pasar minyak goreng curah bekerjasama dengan Bulog NTB sesuai HET sebanyak 200.000 liter untuk menjaga ketersediaan minyak goreng curah dan menekan harga.</p> <p>d. Mendukung Gerakan SITEBEL (Silak Te Belanje Le Warung Kodek), program mendukung pengolahan hasil pertanian ke berbagai produk yang disinergikan langsung dengan pembentukan desa wisata.</p> <p>e. Menyusun kalender musim produksi tahun 2022 yang mencatat jadwal produksi bahan pangan serta keadaan surplus/defisit</p>

Tabel 3.5 Langkah Pengendalian Inflasi Provinsi NTB

No	Aspek	Langkah Pengendalian
		<p>komoditas Kabupaten/Kota di Provinsi NTB untuk memperkuat ketahanan pangan provinsi dan kestabilan harga.</p> <p>f. Melaksanakan sidak ke Pasar Kebon Roek didampingi oleh Wakil Walikota Mataram untuk mengobservasi perkembangan harga pada tanggal 5 Agustus 2022.</p>
4	Komunikasi	<p>a. Penyelenggaraan <i>High Level Meeting</i> dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB untuk membahas tantangan dan strategi tindak lanjut pengendalian inflasi serta koordinasi ketersediaan bahan pokok menjelang penyelenggaraan WSBK.</p> <p>b. Menyampaikan himbauan dalam bentuk infografis kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama di area publik.</p> <p>c. Melakukan rapat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya mengendalikan tekanan inflasi pada sejumlah komoditas pangan strategis.</p> <p>d. Melanjutkan Program Revitalisasi Kampung Tanggap Inflasi di Kota Mataram dalam rangka membangun pemahaman dan kesadaran terkait inflasi di masyarakat.</p> <p>e. Membentuk <i>Roadmap</i> Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 yang sesuai dengan Roadmap Pengendalian Inflasi TPIN 2022 untuk efisiensi upaya pengendalian inflasi secara multisektoral.</p>

3.6 TRACKING INFLASI TRIWULAN IV 2022

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 diperkirakan akan berada di atas rentang target inflasi nasional yakni $3\pm 1\%$ (yoy) seiring dengan tren kenaikan harga komoditas global dan kebijakan kenaikan tarif secara nasional. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi dan daya beli masyarakat yang mulai menguat meski masih terbatas sehingga turut mendukung pertumbuhan harga komoditas kelompok makanan. Pada Oktober 2022, Provinsi NTB mengalami inflasi sebesar 6,57% (yoy), relatif meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 1,90% (yoy).

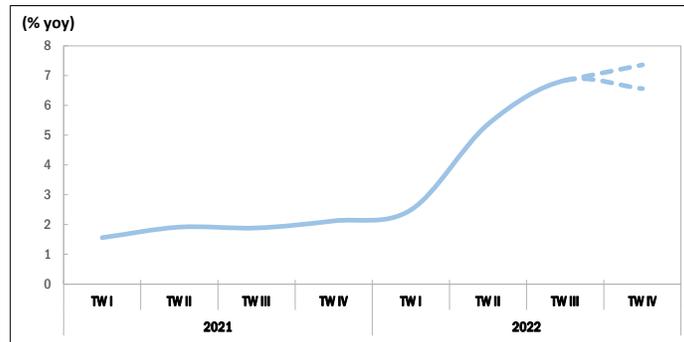
Kelompok komoditas angkutan udara dan bensin menjadi penyumbang utama kenaikan tekanan harga. Rata-rata tarif angkutan udara Mataram-Denpasar per November 2022 tercatat mengalami kenaikan 189,63% dibandingkan rata-rata November 2021 sejalan dengan normalisasi permintaan di tengah jumlah pesawat yang masih terbatas, aktivitas pariwisata dan dinas pemerintah/instansi yang mulai meningkat, serta penyesuaian harga oleh maskapai sejalan dengan kebijakan *fuel surcharge* per April 2022. Harga bensin di Provinsi NTB sampai dengan bulan Oktober 2022, meningkat 26,82% (yoy) setelah di sepanjang tahun 2022 harga bensin mengalami beberapa kali kenaikan. Seiring dengan penyesuaian harga bensin, harga minyak tanah juga turut mengalami peningkatan. Harga minyak tanah pada November 2022 tercatat Rp20.750/liter, meningkat 52,15% dibandingkan November 2021 yang sebesar Rp13.638/liter.

Komoditas rokok turut mendorong inflasi. Berdasarkan data Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia Kota Mataram pada November 2022 rata-rata harga rokok kretek filter tercatat sebesar Rp21.500/pak, meningkat dibandingkan bulan November 2021 yang sebesar Rp18.750/pak sejalan dengan penyesuaian tarif cukai rokok per 10-12,5% per Januari 2022, sehingga produsen cenderung melakukan penyesuaian harga rokok secara bertahap sepanjang tahun 2022.

Harga LPG dan listrik juga turut mengalami kenaikan. Harga LPG 3 kg pada November 2022 tercatat Rp17.250, meningkat dibandingkan November 2021 yang sebesar Rp17.000. LPG 12 kg pada November 2022 tercatat sebesar Rp219.000, meningkat 39,05% dibandingkan November 2021 yang sebesar Rp157.500. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan kenaikan harga LPG non subsidi per 27 Februari 2022 dan 1 Juli 2022 serta kenaikan permintaan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat dan kegiatan pariwisata yang sudah mulai pulih. Kenaikan tarif dasar listrik untuk golongan 3.500 Volt Ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah per Juli 2022 turut meningkatkan tekanan inflasi dan berpotensi berimbas pada harga makanan jadi seiring dengan meningkatnya biaya listrik industri/ pelaku usaha.

Inflasi bahan pangan khususnya didorong oleh harga hortikultura. Beberapa harga bahan pangan mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dibandingkan tahun lalu. Cabai rawit mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia, rerata harga cabai rawit merah pada November 2022 mencapai Rp26.125/kg dari Rp13.688/kg pada November 2021, bawang merah juga tercatat mengalami kenaikan signifikan pada November 2022 mencapai Rp32.750/kg atau meningkat 72,37% (yoy). Komoditas VF lainnya yang turut mengalami kenaikan yaitu cabai rawit hijau yang sesuai SPH bulan November 2022

mencapai Rp13.313/kg, meningkat 46,90% (yoy) dan telur ayam ras sebesar Rp26.375/kg, meningkat 21,33% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi NTB, Estimasi Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.33 Proyeksi Perkembangan Inflasi Tahunan Triwulan IV 2022 Provinsi NTB

BOKS 2 : Kolaborasi Bank Indonesia dan TPID Dalam GNPIP

Melihat tekanan *Administered Prices* (AP) yang tinggi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama *stakeholders* terus berupaya untuk mengatasi kondisi tersebut dengan menekan laju inflasi *Volatile Foods* (VF) untuk men-*set off* kenaikan tekanan harga secara keseluruhan dan menjaga kestabilan harga. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTB merupakan 7 program strategis yang merupakan *flagship strategy* untuk langkah-langkah pengendalian pasokan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Program *Kick Off* Program GNPIP Provinsi NTB dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2022 bersama dengan Gubernur Provinsi NTB dan jajaran TPID Provinsi NTB. Program GNPIP diharapkan dapat menurunkan tekanan inflasi dan membantu masyarakat mempertahankan daya belinya.

No	Program GNPIP	Keberlanjutan
1	Program 77 Desa Berdaya dan Tanggap Inflasi	Sudah terdapat desa yang telah ditetapkan yaitu di Kelurahan Pagutan (Kota Mataram), Kelurahan Karang Baru (Kota Mataram), untuk desa yang lainnya segera ditetapkan
2	Program Penanaman 7.700 Bibit Cabai Rawit dan Hortikultura (Urban Farming)	Sudah terealisasi 12.000 Bibit Cabai
3	Program Gerakan Tanam Cabai di 7 Perguruan Tinggi	Sudah Terealisasi di 7 Perguruan Tinggi/ Universitas negeri dan swasta di NTB
4	Program Gerakan Tanam Cabai di 7 Pondok Pesantren	Sudah terealisasi semua di 7 Pondok Pesantren di NTB
5	Program Operasi Pasar Murah Berkala di Seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sudah terealisasi setiap hari di pasar utama NTB dan Pemukiman Warga
6	Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) komoditas pangan strategis	Sudah dilaksanakan dengan Kabupaten Bangli (Prov. Bali), Provinsi Papua, Kab. Pati (Prov. Jawa Tengah), Kab. Blitar dan Kab. Mojokerto (Prov. Jatim), dan Kota Jakarta Timur.
7	Gerakan Edukasi Publik Literasi Pengendalian Inflasi.	Sudah terlaksana dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> • Baliho • Iklan layanan masyarakat • Publikasi konten di media sosial

Selain dari kegiatan yang tertera di dalam piagam GNPIP tersebut, Bank Indonesia juga menyalurkan tambahan bibit cabai sejumlah 12.000 (masing-masing 3.000) untuk 4 kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang meraih juara lomba Kampung Tanggap Inflasi yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram.



Gambar Boks 2.1 Kick-Off Program GNPIP Bersama Gubernur Provinsi NTB pada 17 Agustus 2022



Gambar Boks 2.2 Penyerahan simbolis bantuan bibit cabai kepada pengurus Ponpes Darul Lughah Wat-tahfiz Sekarbela



Gambar Boks 2.3 Penyerahan Bibit Cabai oleh Deputy Gubernur Senior kepada Ponpes Thohir Yasin dan Nurul Islam

BAB 4

STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan III 2022 terpantau mengalami perbaikan, dengan risiko tetap terjaga sejalan dengan perbaikan ekonomi yang terus berlanjut. Penghimpunan DPK tercatat tumbuh 19,75% (yoy) pada triwulan III 2022, setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 13,71% (yoy). Kenaikan DPK turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan kredit pada triwulan III 2022 yang mencapai Rp74,49 Triliun atau tumbuh 26,54% (yoy), meningkat secara signifikan dibandingkan capaian pertumbuhan kredit triwulan sebelumnya yang sebesar 6,05% (yoy). Sementara itu risiko kredit secara umum masih terjaga dengan Rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,84%, berada di bawah batas ketentuan NPL (<5%). Loan at Risk (LAR) pada triwulan III 2022 juga tercatat menurun menjadi sebesar 9,88% dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 10,67%. Risiko sektor rumah tangga pada triwulan III 2022 juga relatif terjaga, tercermin dari agregat rasio NPL kredit konsumsi yang tercatat sebesar 1,18%, menurun dibandingkan rasio NPL kredit konsumsi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 1,26%. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit UMKM triwulan III 2022 relatif melambat dengan pertumbuhan kredit UMKM tercatat 12,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,42% (yoy).

4.1 ASESMEN LEMBAGA KEUANGAN

4.1.1 Kondisi Umum

Di tengah peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan pelonggaran mobilitas, stabilitas sistem keuangan Provinsi NTB triwulan III 2022 terpantau tetap terjaga. Kondisi tersebut tercermin dari aset perbankan, Dana Pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit yang tercatat mengalami pertumbuhan pada triwulan III 2022. Aset perbankan triwulan III 2022 mencatatkan pertumbuhan 1,70% (yoy), sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,11% (yoy). Berdasarkan kegiatan perbankan, perlambatan pertumbuhan aset pada triwulan III 2022 terjadi

baik bank konvensional maupun bank syariah yang masing-masing tercatat sebesar 1,65% (yoy) dan 3,63% (yoy), setelah pada triwulan II 2022 mampu tumbuh 5,47% (yoy) dan 15,76% (yoy).

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan aset bank secara keseluruhan, pertumbuhan aset bank pemerintah dan bank swasta pada triwulan III 2022 juga tumbuh melandai. Pertumbuhan aset pada bank pemerintah dan bank swasta pada triwulan III 2022 masing-masing sebesar 1,93% (yoy) dan 0,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2022 yang mampu tumbuh 7,96% (yoy) dan 3,20% (yoy). Bank pemerintah masih menjadi pemegang aset bank umum terbesar di Provinsi NTB dengan nilai Rp54,96 Triliun atau 82,73% dari total aset bank umum. Di sisi lain, porsi aset bank umum swasta sedikit mengalami peningkatan dari 17,27% di triwulan II 2022 menjadi 17,81% pada triwulan III 2022. Pangsa aset perbankan masih didominasi oleh bank milik pemerintah sebesar 82,19% sedangkan sisanya yaitu bank swasta sebesar 17,81%. Adapun pangsa bank asing dan campuran di NTB masih tercatat 0%, sejalan dengan telah ditutupnya kantor cabang bank asing dan campuran di Provinsi NTB sejak triwulan IV-2019.

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Bank Umum di Provinsi NTB

Indikator Bank Umum (Rp Milyar)	2019				2020				2021				2022	
	Tw 1	Tw 2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw 2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2
Aset	48,191	47,515	48,677	52,851	58,032	56,381	59,202	60,216	60,620	62,049	62,284	63,345	64,804	66,461
Kredit - Berdasarkan Lokasi Bank	39,304	40,060	41,264	45,035	50,454	48,466	50,140	50,679	51,110	52,579	53,080	53,696	54,403	55,779
- Kredit Modal Kerja	11,397	11,785	12,467	15,736	19,798	18,662	19,694	20,145	20,416	21,234	21,509	21,855	21,911	22,634
- Kredit Investasi	8,417	8,416	8,452	8,400	9,437	8,613	8,737	8,463	8,536	8,614	8,484	8,415	8,689	8,872
- Kredit Konsumsi	19,490	19,860	20,345	20,899	21,219	21,191	21,709	22,072	22,158	22,731	23,087	23,426	23,802	24,273
Kredit UMKM	12,225	12,678	13,177	13,575	14,056	13,811	14,400	14,998	15,005	15,636	15,894	17,327	17,362	17,835
Dana Pihak Ketiga	30,449	30,208	30,006	31,111	30,457	30,893	32,361	33,364	33,962	36,131	34,312	35,410	37,198	41,084
- Giro	6,199	6,647	5,754	5,428	5,494	5,383	6,349	5,421	7,736	8,667	7,658	7,005	9,747	12,381
- Tabungan	17,034	16,429	16,047	17,654	15,759	16,393	17,179	18,449	16,565	18,239	17,608	18,644	17,286	18,870
- Deposito	7,216	7,132	8,205	8,030	9,204	9,118	8,833	9,494	9,661	9,225	9,047	9,761	10,165	9,833
NPL (%)	1,30	1,35	1,36	1,06	1,06	1,12	1,02	1,03	1,02	1,12	1,27	1,37	1,48	1,65
LDR (%)	129,08	132,62	137,52	144,76	165,66	156,88	154,94	151,90	150,49	145,52	154,70	151,64	146,25	135,77
Kredit - Berdasarkan Lokasi Proyek	52,274	53,973	55,258	57,736	61,973	64,500	67,793	67,478	68,330	70,019	58,868	70,468	70,996	74,257
- Kredit Modal Kerja	13,704	14,026	14,912	16,980	16,104	21,342	23,465	23,784	24,484	25,159	19,390	25,521	25,230	27,565
- Kredit Investasi	17,894	18,896	19,013	18,657	23,927	21,379	22,087	21,106	21,185	21,278	15,524	20,695	20,966	21,415
- Kredit Konsumsi	20,677	21,051	21,333	22,100	21,942	21,778	22,241	22,588	22,662	23,583	23,954	24,252	24,800	25,277

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berbeda arah dengan aset perbankan, pertumbuhan DPK dan kredit triwulan III 2022 mencatatkan peningkatan. DPK triwulan III 2022 tercatat tumbuh 19,75% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,71% (yoy). Sejalan dengan kondisi tersebut, total penyaluran kredit di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 juga tercatat tumbuh signifikan sebesar 26,54% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya hanya mampu tumbuh 6,05% (yoy).

4.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

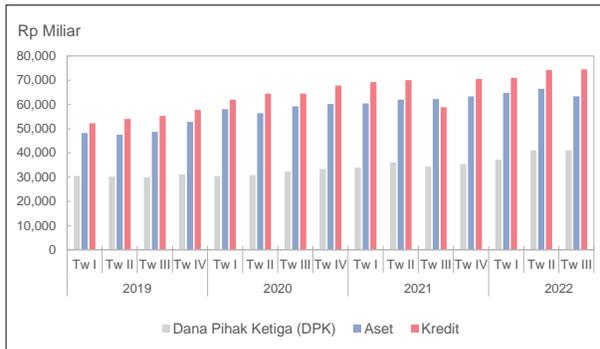
Penghimpunan DPK triwulan III 2022 mencapai Rp41,09 Triliun atau tumbuh 19,75% (yoy), melanjutkan peningkatan dari triwulan sebelumnya yang telah tumbuh 13,71% (yoy). Struktur DPK bank umum di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tidak mengalami perubahan dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Porsi terbesar DPK di Provinsi NTB masih didominasi oleh Tabungan dengan pangsa sebesar 46,74%, diikuti oleh Giro sebesar 29,22%, dan Deposito sebesar 24,05%. Peningkatan pertumbuhan DPK triwulan III 2022 utamanya didorong oleh ketiga komponen tersebut yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan tabungan dan deposito pada triwulan III 2022 sejalan dengan peningkatan porsi dana murah atau CASA (*current account and saving account*) yang terus berlanjut. Pada triwulan III 2022, tabungan dan deposito masing-masing tercatat tumbuh 9,06% (yoy) dan 9,21% (yoy) setelah pada periode sebelumnya tercatat sebesar 3,46% (yoy) dan 6,59% (yoy). Secara khusus, kenaikan penghimpunan DPK di triwulan III 2022 diindikasikan sejalan dengan keberlanjutan strategi sejumlah perbankan yang mendorong peningkatan porsi dana murah (CASA). Secara keseluruhan, rasio dana murah (CASA) di perbankan Provinsi NTB mengalami sedikit peningkatan pada 2 (dua) triwulan terakhir yaitu mencapai 76% pada triwulan II dan III 2022 setelah pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 73%. Peningkatan CASA menunjukkan bahwa komposisi dana murah dapat semakin menekan biaya dana (*cost of fund*) menjadi lebih rendah sehingga *Net Interest Margin* (NIM) perbankan dapat terjaga. Sejalan dengan tabungan dan deposito, komponen giro juga tercatat tumbuh meningkat 56,77% (yoy) dari periode sebelumnya yang sebesar 42,85% (yoy) didorong oleh peningkatan giro swasta. Selain itu, tren kenaikan BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) yang mulai terjadi pada Agustus 2022 secara gradual mempengaruhi peningkatan suku bunga tabungan, deposito, dan giro.

Berdasarkan kepemilikan, DPK masih didominasi oleh DPK perseorangan (53,58%) dan korporasi swasta (28,72%), sementara DPK pemerintah hanya mencapai 16,87%. Pada periode laporan, kenaikan pertumbuhan DPK utamanya disebabkan oleh pertumbuhan golongan nasabah perseorangan dan pemerintah. DPK perseorangan dan pemerintah pada triwulan III 2022 tercatat masing-masing tumbuh 1,28% (yoy) dan 3,78% (yoy).

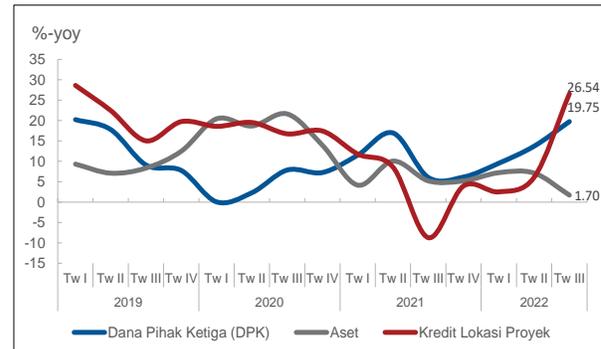
Secara spasial, penghimpunan dana di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 masih didominasi oleh Kota Mataram (72,13%) sebagai ibu kota provinsi dan pusat perdagangan. DPK Kota

Mataram tercatat meningkat dari periode sebelumnya yang sebesar 18,17% (yoy) menjadi 24,24% (yoy) pada triwulan III 2022. Pertumbuhan penghimpunan dana tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pertumbuhan penghimpunan dana terendah tercatat berada di Kabupaten Bima yang mengalami kontraksi 14,37% (yoy).



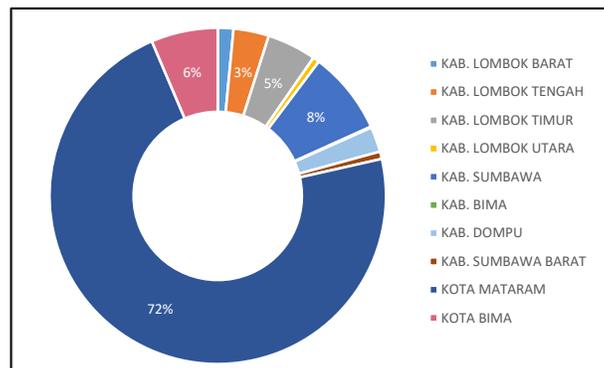
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Perkembangan Nominal Aset, DPK, dan Kredit Bank Umum di Provinsi NTB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum di Provinsi NTB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Proporsi DPK Secara Spasial Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

4.1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit

Peningkatan kinerja kredit triwulan III 2022 didorong oleh meningkatnya seluruh jenis kredit. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek yang ada di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tercatat mencapai Rp74,49 Triliun atau tumbuh 26,54% (yoy) dari yang sebelumnya hanya 6,05% (yoy). Berdasarkan kegiatan usaha bank, peningkatan penyaluran kredit terjadi baik kredit dari perbankan konvensional maupun syariah. Pada triwulan III 2022, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Provinsi NTB tumbuh sebesar 32,79% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh 30,07% (yoy). Sementara itu, kredit bank umum konvensional triwulan III 2022 tumbuh signifikan mencapai 25,10% (yoy) dari yang sebelumnya hanya tumbuh 1,72% (yoy). Sedangkan berdasarkan jenis penggunaannya, struktur kredit secara keseluruhan didominasi oleh kredit modal kerja dengan pangsa 37,70%, diikuti kredit konsumsi 34,96% dan kredit investasi 27,34%. Kredit modal kerja dan kredit investasi triwulan III 2022 tumbuh signifikan masing-masing mencapai 44,82% (yoy) dan 31,20% (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 9,56% (yoy) dan 0,65% (yoy). Sementara itu, kredit konsumsi triwulan laporan terpantau tumbuh 8,72% (yoy), meningkat terbatas dari triwulan II 2022 yang sebesar 7,19% (yoy).

Pertumbuhan kredit modal kerja dan investasi sejalan dengan terus berlanjutnya pemulihan ekonomi di Provinsi NTB pasca pelonggaran mobilitas di tengah pandemi yang semakin terkendali. Lebih lanjut, peningkatan kredit investasi sejalan dengan hasil *liaison* Bank Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan *likert scale* komponen investasi dari 0,71 di triwulan II 2022 menjadi 1,00 di triwulan laporan. Sementara itu, peningkatan kredit modal kerja diindikasikan sebagai dampak meningkatnya aktivitas perekonomian sehingga banyak pelaku usaha yang mulai menambah permodalan melalui kredit. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia triwulan III 2022 yang menunjukkan peningkatan nilai SBT sebesar 65,57% dari periode sebelumnya sebesar 56,85%. Selanjutnya, peningkatan penyaluran kredit konsumsi sejalan dengan peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan III 2022 yang juga tercatat tumbuh 4,34% (yoy).

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan penyaluran kredit di Provinsi NTB didorong oleh peningkatan kredit LU Pertambangan dan LU Transportasi. Kredit LU Pertambangan triwulan III 2022 tercatat tumbuh 101,30% (yoy) sejalan dengan kinerja LU Perdagangan yang juga mencatatkan peningkatan dengan tumbuh sebesar 23,68% (yoy). Selanjutnya, kredit LU Transportasi triwulan III 2022 tumbuh membaik menjadi 7,31% (yoy) setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 4,20% (yoy). Perbaikan kredit LU Transportasi sejalan dengan kinerja LU Transportasi triwulan III yang juga tercatat membaik seiring dengan pelonggaran mobilitas dan peningkatan aktivitas pariwisata.

Peningkatan penyaluran kredit diikuti oleh perbaikan kualitas kredit yang tercermin dari terjaganya *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Loan at Risk* (LaR) yang semakin menurun. NPL triwulan III 2022 tercatat sebesar 1,84%, masih relatif terjaga meskipun sedikit meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,65%. Rasio NPL perbankan di Provinsi NTB yang tetap terjaga pada kisaran 1% menggambarkan risiko kredit masih dalam batas aman. Sementara itu, LaR triwulan III 2022 terpantau sebesar 9,88%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 10,67%. Secara khusus, penurunan LaR didorong oleh penurunan kredit yang direstrukturisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan kemampuan membayar debitur secara gradual seiring dengan tren perbaikan dan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.

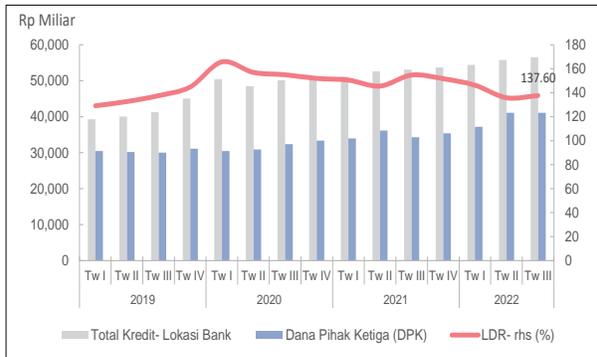
4.1.4 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Intermediasi bank umum masih sangat tinggi ditunjukkan dengan indikator *Loan to Deposit Ratio (LDR)* yang berada di atas 100%. LDR Perbankan di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 137,60%, relatif meningkat dibandingkan LDR pada triwulan II 2022 yang sebesar 135,77%. LDR di atas 100% tersebut didorong oleh masih tingginya penyaluran kredit yang belum bisa diimbangi oleh penghimpunan DPK. Rasio LDR di atas 100% menandakan bahwa bank umum di Provinsi NTB masih membutuhkan sumber dana selain dari penghimpunan DPK yang umumnya dipenuhi dari sumber pembiayaan dari pusat atau luar daerah.

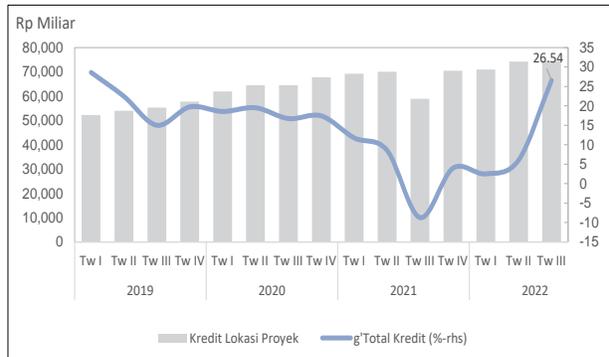
4.2 ASESMEN KETAHANAN KORPORASI

4.2.1 Kondisi Rentabilitas dan Likuiditas Korporasi

Kondisi rentabilitas atau kemampuan untuk menghasilkan laba korporasi di Provinsi NTB terpantau mengalami perbaikan sejalan dengan kinerja perekonomian yang terus membaik. Data SBT SKDU Bank Indonesia menunjukkan rentabilitas triwulan III 2022 sebesar 48,51%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 43,56%. Pangsa korporasi dengan kondisi rentabilitas kategori lebih baik dan tetap mencapai 85,15% dari total responden korporasi. Sebagian besar korporasi mengalami perbaikan rentabilitas, tercermin dari penurunan pangsa korporasi kondisi lebih buruk yang pada triwulan sebelumnya sebesar 25,74%, pada triwulan III 2022 menjadi 14,85%. Hal ini mengindikasikan kinerja dan ketahanan korporasi yang semakin membaik sejalan dengan kinerja perekonomian triwulan III 2022 yang juga tumbuh meningkat.



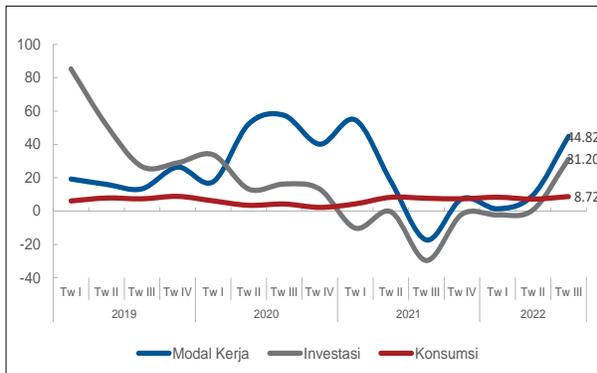
Sumber: Bank Indonesia, diolah



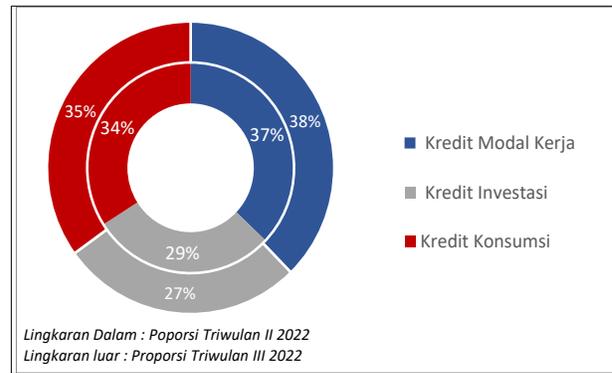
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Perkembangan Kredit, DPK, dan LDR Bank Umum di Prov. NTB

Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit di Prov. NTB



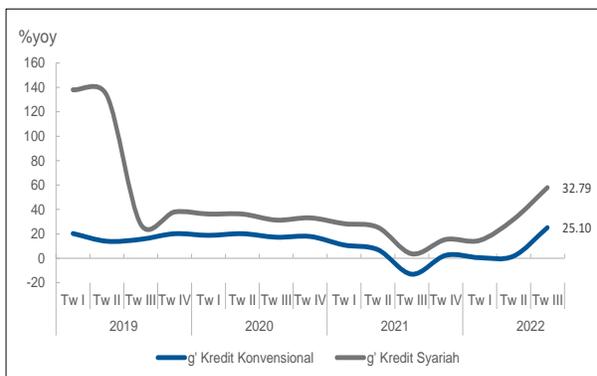
Sumber: Bank Indonesia, diolah



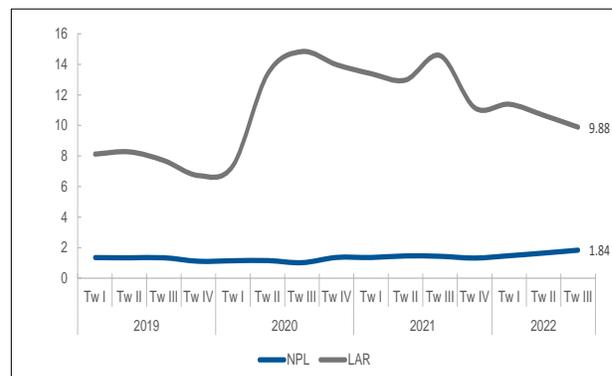
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Perkembangan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

Grafik 4.7 Proporsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

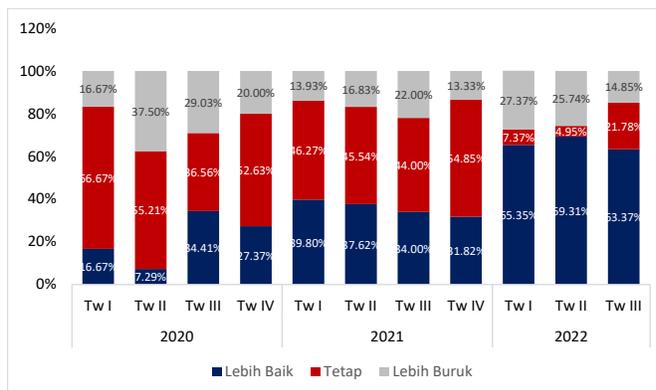


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Kredit Perbankan Konvensional dan Syariah

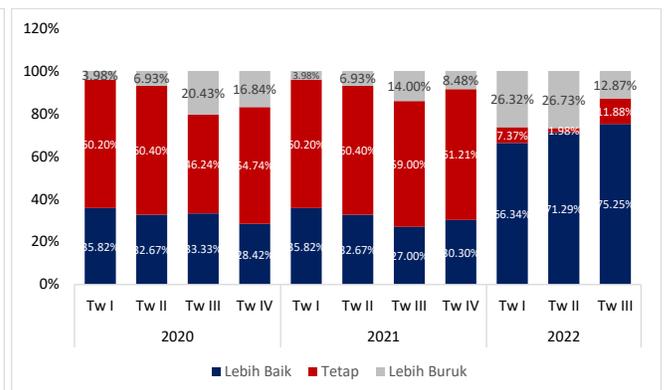
Grafik 4.9 Perbandingan Perkembangan NPL dan LaR

Sejalan dengan kondisi rentabilitas, kondisi likuiditas korporasi triwulan III 2022 juga mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia, pada triwulan III 2022 pangsa korporasi yang tercatat dengan kondisi likuiditas lebih baik dan tetap sebesar 87,13%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 73,27% seiring dengan pangsa korporasi dengan kondisi likuiditas lebih buruk mengalami penurunan dari yang sebelumnya 26,73% pada triwulan II 2022 menjadi 12,87% di triwulan III 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan korporasi dalam membayar kewajiban/hutang terus mengalami perbaikan dibandingkan periode sebelumnya.



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Kondisi Rentabilitas Korporasi Provinsi NTB



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Kondisi Likuiditas Korporasi Provinsi NTB

4.2.2 Penyaluran Kredit Korporasi¹

Penyaluran kredit ke korporasi pada triwulan III 2022 tercatat mengalami peningkatan, terutama korporasi yang bergerak di usaha pertambangan (pangsa kredit korporasi: 76,45%). Nominal kredit korporasi yang disalurkan pada triwulan III 2022 mencapai Rp31,00 Triliun atau tumbuh 71,11% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 4,88% (yoy). Kondisi tersebut didorong oleh kinerja penyaluran kredit korporasi yang bergerak di LU Pertambangan mencatatkan pertumbuhan signifikan dari triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 4,63% (yoy), menjadi 101,93% (yoy) pada triwulan laporan. Membaiknya kredit LU Pertambangan sejalan dengan kinerja LU Pertambangan pada triwulan III 2022 yang tercatat tumbuh 23,68% (yoy),

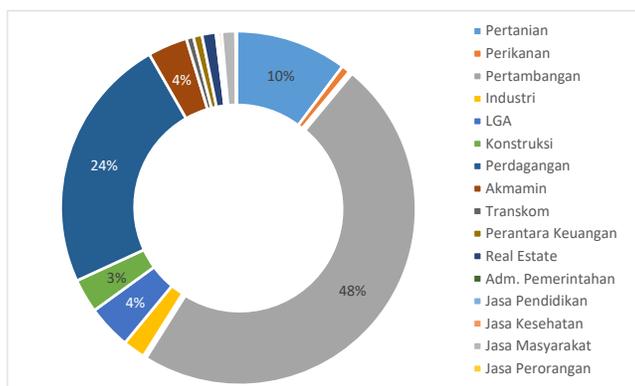
¹ Korporasi non keuangan

terus melanjutkan tren positif. Sementara itu, kredit ke korporasi yang bergerak di usaha perdagangan juga tercatat tumbuh membaik 13,77% (yoy) di triwulan laporan setelah pada triwulan sebelumnya hanya tumbuh 5,34% (yoy). Tren perbaikan tersebut mengindikasikan peningkatan upaya pelaku usaha perdagangan untuk melakukan ekspansi usahanya seiring dengan mulai membaiknya aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat yang tercermin dari hasil survei konsumen untuk Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) triwulan III 2022 mencapai 108,11 (telah berada di level optimis di atas 100).

Tabel 4.2 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi di Provinsi NTB

Indikator Bank Umum (Rp Milyar)	2019				2020				2021				2022		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Pertanian	2.344	2.251	2.138	2.301	2.747	2.659	3.005	3.401	3.638	3.746	4.002	4.486	4.692	4.792	4.956
Perikanan	111	146	162	211	322	326	348	357	363	355	357	353	347	356	372
Pertambangan	12.303	13.275	13.479	14.514	17.971	21.384	23.619	22.325	23.346	23.121	11.532	22.409	21.874	24.165	23.214
Industri	588	596	828	1.013	970	944	905	900	946	1.012	1.043	981	1.009	1.030	992
LGA	2.535	2.472	2.585	2.496	2.774	2.477	2.514	2.330	2.329	2.227	2.122	1.986	1.973	1.947	1.957
Konstruksi	1.027	1.130	1.268	1.300	1.215	1.152	1.158	1.240	1.145	1.195	1.332	1.285	1.275	1.440	1.514
Perdagangan	8.973	9.277	9.497	9.679	9.888	9.685	10.073	10.340	10.618	10.788	10.854	10.852	11.125	11.320	11.435
Akmamin	1.360	1.353	1.379	1.475	1.512	1.572	1.607	1.647	1.653	1.685	1.723	1.783	1.748	1.752	1.758
Transkom	284	317	352	379	369	361	363	347	312	313	297	296	298	300	319
Perantara Keuangan	156	164	251	283	255	216	189	220	210	181	149	134	147	327	386
Real Estate	854	839	869	863	903	864	836	822	830	840	638	790	791	634	619
Adm. Pemerintahan	49	50	48	46	43	41	7	44	44	40	40	40	40	33	33
Jasa Pendidikan	38	42	50	49	54	53	49	49	50	53	52	76	75	76	82
Jasa Kesehatan	149	182	206	227	209	204	188	162	176	173	167	152	164	150	141
Jasa Masyarakat	794	782	764	744	747	694	603	621	630	634	540	534	577	598	611
Jasa Perorangan	29	45	48	45	43	42	42	42	42	43	61	58	59	59	58

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

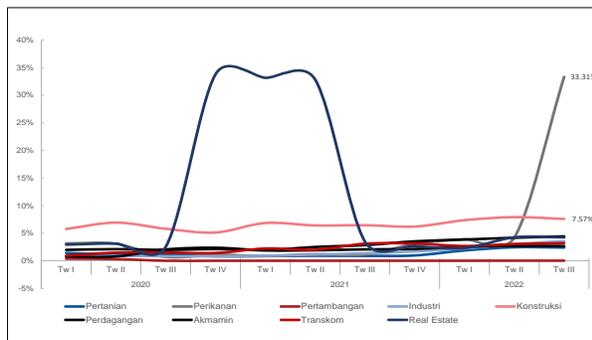


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.12 Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi Produktif

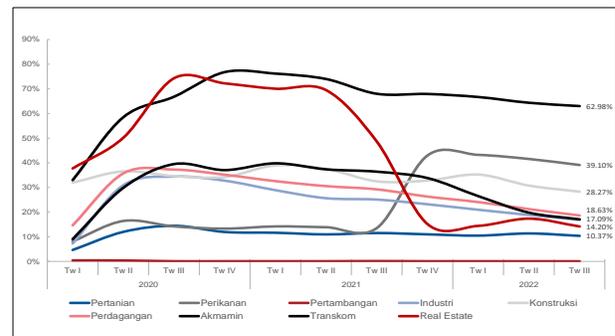
Ketahanan sektor korporasi triwulan III 2022 relatif terjaga. NPL dan LaR sektor pertambangan sebagai penyumbang pangsa kredit korporasi terbesar, masing-masing tercatat hanya 0,01% dan 0,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapabilitas korporasi terkait tergolong baik dalam

memenuhi kewajiban kreditnya. Meskipun secara keseluruhan kualitas kredit korporasi membaik, beberapa sektor yang masih mencatatkan NPL yang relatif tinggi antara lain sektor pertanian (subsektor perikanan) dan konstruksi yang masing-masing sebesar 33,31% dan 7,60%. Kedua sektor masih perlu terus diwaspadai karena masih memiliki NPL melebihi 5%. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum mencatatkan LaR tertinggi yaitu sebesar 62,98% sejalan dengan masih tingginya restrukturisasi kredit untuk pelaku usaha dari sektor yang paling terdampak pandemi.



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

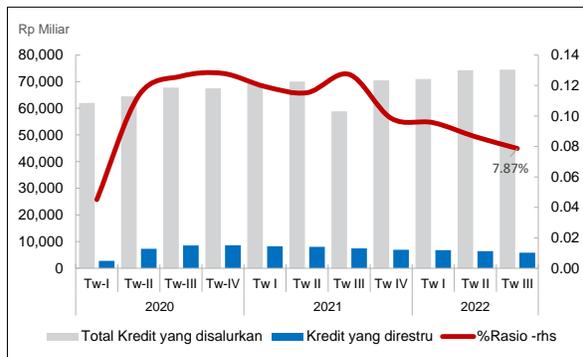
Grafik 4.13 Perkembangan NPL Lapangan Usaha Utama Provinsi NTB



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

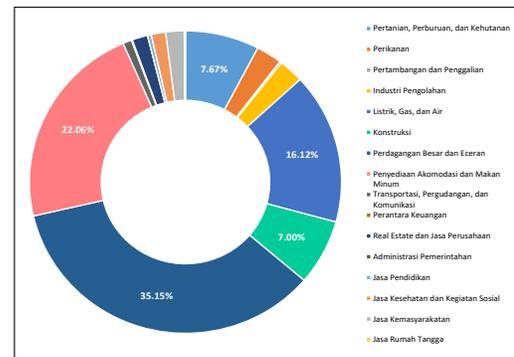
Grafik 4.14 Perkembangan LaR Lapangan Usaha Utama Provinsi NTB

Pandemi COVID-19 berdampak pada bertumbuhnya pangsa kredit yang direstrukturisasi. Sebelumnya pangsa kredit yang direstrukturisasi terjaga pada kisaran 4-5% sepanjang tahun 2019 hingga triwulan I 2020. Pangsa kredit yang direstrukturisasi mulai meningkat relatif signifikan di triwulan II 2020 sejalan dengan kebijakan program restrukturisasi kredit yang dimulai pada Maret 2020. Dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi, program restrukturisasi kembali diperpanjang, dari yang sebelumnya akan berakhir pada triwulan I 2022 menjadi triwulan I 2023. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian, pangsa kredit yang direstrukturisasi terus mengalami penurunan, pada posisi triwulan III 2022 sebesar 7,87%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,64%. Penurunan porsi kredit yang direstrukturisasi menunjukkan terjadi perbaikan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kredit seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin menguat.



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.15 Perkembangan Kredit yang Direstrukturisasi



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.16 Pangsa Kredit Produktif yang Direstrukturisasi Berdasarkan Sektor/LU

Pangsa kredit produktif yang direstrukturisasi pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 81,80% dari total kredit yang direstrukturisasi atau setara dengan Rp4,79 Triliun, relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp5,23 Triliun. LU produktif dengan nilai restrukturisasi paling tinggi adalah LU Perdagangan Besar dan Eceran (LU Perdagangan) yang mencatatkan restrukturisasi kredit produktif sebesar Rp1,68 Triliun atau setara dengan 35,15% dari pangsa kredit produktif yang direstrukturisasi. Nilai ini sudah semakin menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 36,90%. LU produktif dengan nilai restrukturisasi tertinggi kedua dengan pangsa 22,06% adalah LU Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman (LU Akmamin) dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp1,06 Triliun, sejalan dengan aktivitas pariwisata yang belum sepenuhnya pulih. Dampak pandemi yang begitu berat pada LU Perdagangan dan LU Akmamin berdampak pada upaya *recovery* yang juga relatif lambat seiring dengan masih adanya *scarring effect*. LU lainnya yang juga tercatat memiliki nominal restrukturisasi tinggi antara lain LU Listrik, Gas dan Air serta LU Pertanian dengan nilai total restrukturisasi masing-masing sebesar Rp772,73 Miliar, atau 16,12% dari total kredit yang direstrukturisasi, dan Rp367,73 Miliar, atau 7,67% dari total kredit yang direstrukturisasi.

4.3 ASESMEN KETAHANAN RUMAH TANGGA

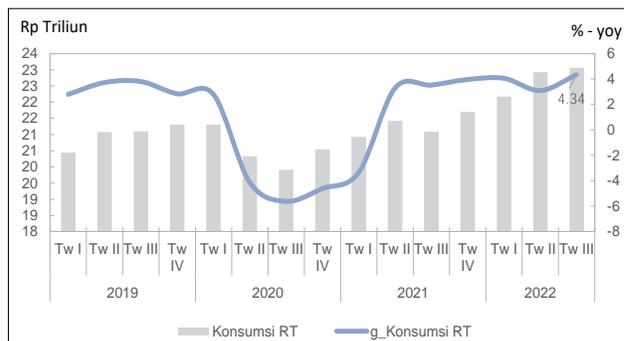
4.3.1 Perkembangan Kondisi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di triwulan III 2022 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Rumah Tangga di triwulan III 2022 tercatat sebesar

Rp 14,95 triliun, atau tumbuh 4,34% (yoy) dengan kontribusi sebesar 56,96% dari total PDRB Provinsi NTB, relatif meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh sebesar 3,10% (yoy) dengan kontribusi sebesar 58,43% dari total PDRB Provinsi NTB.

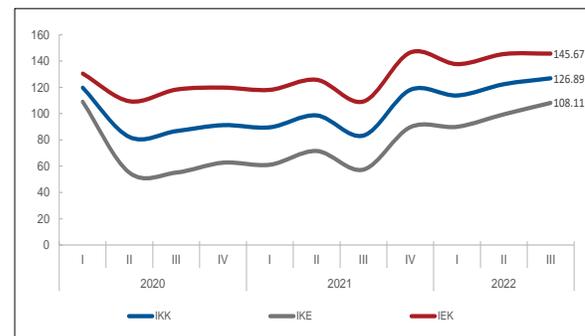
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) secara rata-rata triwulan III 2022 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. IKK triwulan III 2022 tercatat sebesar 126,89, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (122,39) dan berada di atas level optimis sejalan dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari hasil SK pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 108,11, membaik dan sudah mencapai level optimis dibanding IKE triwulan sebelumnya yang sebesar 99,44. IKE relatif mengalami tren penurunan sejak triwulan II 2020 sejalan dengan terjadinya kondisi pandemi COVID-19 yang telah mendisrupsi kegiatan ekonomi yang berdampak pada penurunan penghasilan rutin dan omzet usaha serta penurunan jumlah lapangan kerja. Meskipun dampak *scarring effect* pandemi masih terasa sampai dengan triwulan III 2022, optimisme perbaikan ekonomi sudah mulai terbangun dan berpotensi terus membaik ke depannya.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

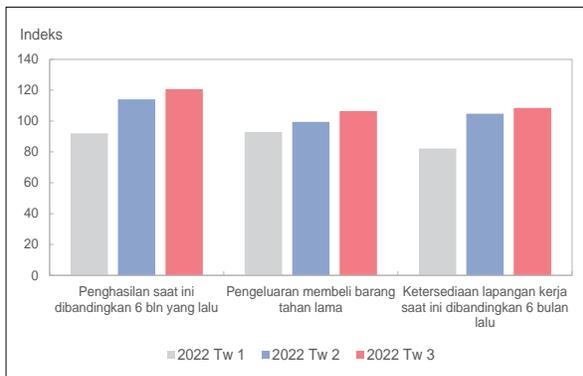
Grafik 4.17 Perkembangan Rumah Tangga dalam Produk Domestik Regional Bruto Prov. NTB



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

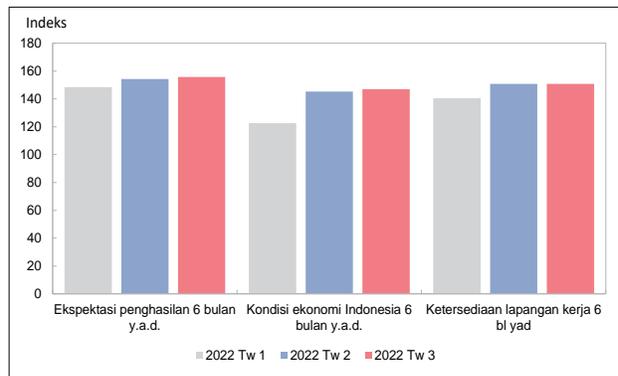
Grafik 4.18 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen

Pada triwulan III 2022 Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) secara rata-rata juga tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. IEK triwulan III 2022 sebesar 145,67, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022 yang tercatat sebesar 145,33. Perbaikan ini didorong oleh peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan kondisi perekonomian, tingkat penghasilan, serta tingkat ketersediaan lapangan kerja pada periode 6 (enam) bulan yang akan datang.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.19 Persepsi Rumah Tangga terhadap Ekonomi Saat Ini



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia, diolah

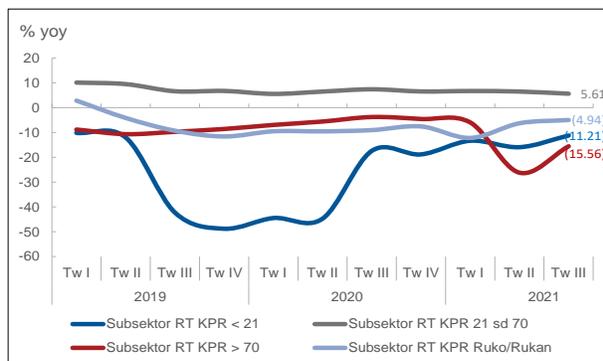
Grafik 4.20 Persepsi Rumah Tangga terhadap Ekspektasi Ekonomi

4.3.2 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Penyaluran kredit rumah tangga di Provinsi NTB triwulan III 2022 mengalami tren kenaikan didukung oleh peningkatan kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan kredit perumahan (KPR dan KPA). Kredit kendaraan roda dua dan roda empat pada triwulan laporan masing-masing tercatat tumbuh 5,63% (yoy) dan 4,82% (yoy), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing mengalami kontraksi 2,58% (yoy) dan 2,85% (yoy). Perbaikan KKB diindikasikan sejalan dengan pelonggaran mobilitas masyarakat yang mendorong pembelian masyarakat atau pelaku usaha transportasi untuk kembali melakukan pembelian kendaraan. Selanjutnya, pertumbuhan KPR rumah dengan luas di bawah 21 m² dan KPR rumah dengan luas di atas 70 m² tercatat mengalami perbaikan dari yang sebelumnya terkontraksi masing-masing 15,91% (yoy) dan 26,19% (yoy) menjadi terkontraksi 11,21% (yoy) dan 15,56% (yoy).

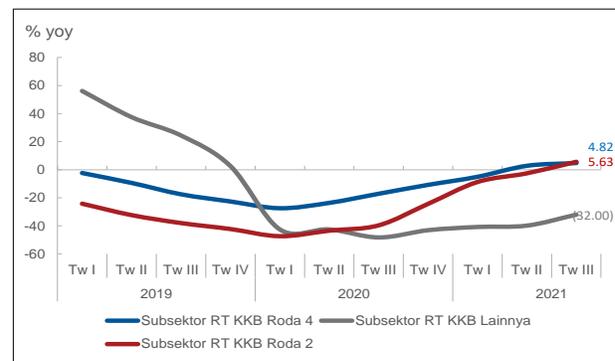
Risiko dari sisi kredit konsumsi di triwulan III 2022 masih relatif menurun dan pada level yang masih terjaga. Pada triwulan III 2022 agregat rasio NPL kredit konsumsi tercatat sebesar 1,18%, menurun dibandingkan rasio NPL kredit konsumsi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 1,28%, serta tergolong masih relatif rendah di bawah *threshold* NPL sebesar 5%. Nilai NPL yang tetap terjaga di bawah batas atas NPL sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencerminkan kondisi perbankan yang tetap kuat. Dari sisi jumlah *outstanding*, penyaluran kredit konsumsi di Provinsi NTB per triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp26,04 Triliun, tumbuh 8,72% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya.

Risiko KKB dan KPR relatif tetap terjaga di tengah peningkatan penyaluran kredit. NPL KPR tipe rumah luas di bawah 21 m² dan tipe rumah luas 21 s.d. 70 m² pada triwulan III 2022 tercatat masing-masing sebesar 0,73% dan 1,14%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,49% dan 1,23%. Selanjutnya dari sisi NPL kendaraan roda 4 juga terpantau melandai, dari yang sebelumnya sebesar 4,39% pada triwulan II 2022 menjadi 3,93% di triwulan III 2022. Penurunan NPL KPR lebih lanjut relatif tertahan oleh NPL KPR Ruko/Rukan yang pada triwulan III 2022 mencatatkan peningkatan menjadi 11,75% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 8,11%. Ke depannya potensi peningkatan NPL masih harus terus diwaspadai seiring dengan akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi di tahun 2023.



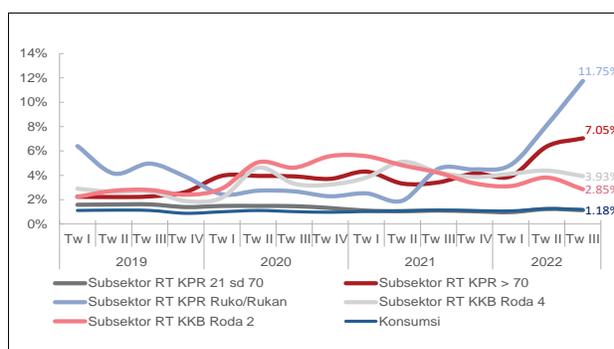
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.21 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)



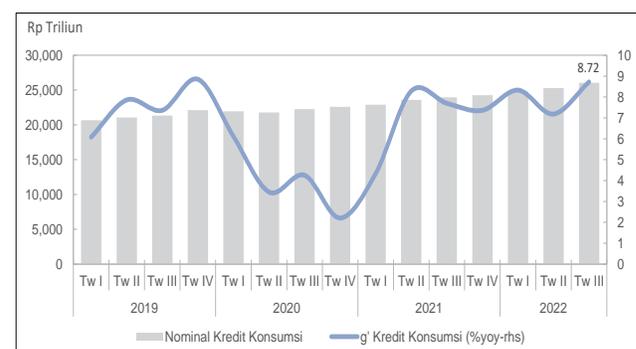
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Rasio NPL Kredit Konsumsi



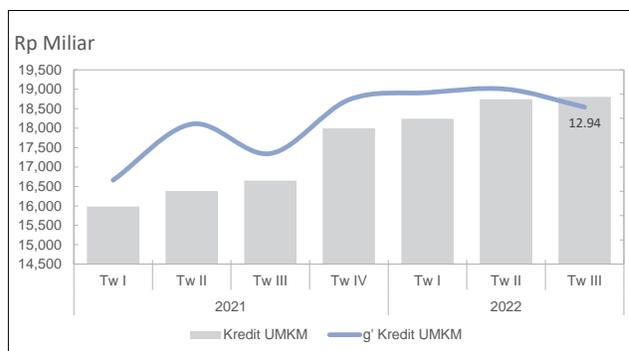
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Kredit Konsumsi

4.4 PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

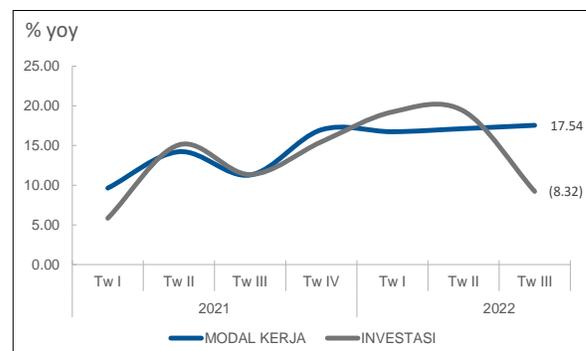
4.4.1 Kredit UMKM

Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit UMKM triwulan III 2022 tercatat sebesar 12,94% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 14,42% (yoy). Namun demikian, kredit UMKM secara nominal mengalami peningkatan dari triwulan II 2022 sebesar Rp 18,74 Triliun menjadi Rp18,80 Triliun di triwulan III 2022. Perlambatan kredit UMKM bersumber dari jenis penggunaan untuk investasi yang pada triwulan laporan tercatat berkontraksi 8,32% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 2,23% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja UMKM tercatat tumbuh sebesar 17,54% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh sebesar 17,12% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha UMKM mulai melakukan ekspansi usahanya sehingga diharapkan berdampak positif terhadap kinerja UMKM dan juga perekonomian NTB.



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Kredit UMKM



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.26 Perkembangan Kredit UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan

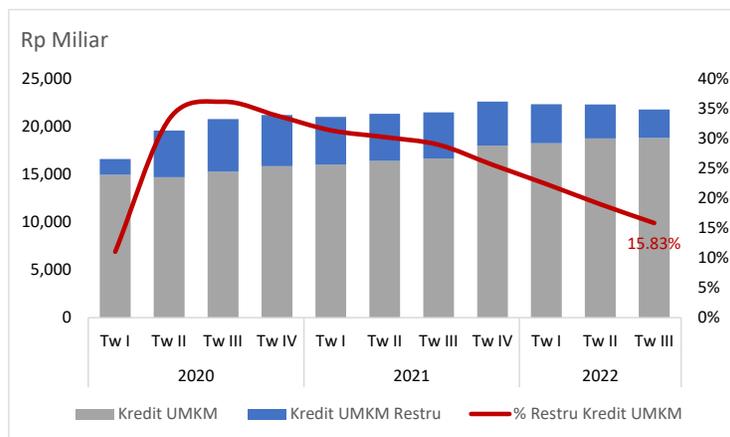
Kinerja kredit UMKM LU Perdagangan mengalami peningkatan terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2022 pangsa LU Perdagangan terhadap total kredit UMKM sebesar 55,34%, diikuti oleh LU Pertanian yang mencapai 21,98%. Pada triwulan III 2022 kredit UMKM ke LU Perdagangan tercatat meningkat dari 13,60% (yoy) menjadi 13,76% (yoy), sementara kredit ke LU Pertanian tercatat tumbuh 32,86% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 39,24% (yoy).

Tabel 4.3 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektorial

SEKTOR UMKM	2020				2021				2022		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Pendapatan, Pertumbuhan, dan Kehidupan	52,40	80,80	49,95	58,69	53,57	30,48	45,42	41,00	38,98	39,24	32,88
Perkembangan dan Penghasilan	155,62	134,27	108,57	89,45	8,23	11,60	10,27	3,30	-34,36	-29,67	-24,59
Pembangunan dan Penghasilan	-0,39	47,02	-50,65	-0,57	-13,86	-14,87	-12,91	-14,47	6,48	-4,94	61,35
Industri Pengolahan	36,47	25,35	21,63	16,78	8,31	18,43	17,38	34,37	21,44	36,52	37,79
Listrik, Gas, dan Air	-21,03	-21,76	-22,07	1,55	-1,65	-0,38	-13,38	-13,67	-14,81	-14,73	-48,37
Konstruksi	9,27	-9,88	-8,81	-8,31	10,44	8,68	23,60	13,45	1,91	6,12	-30,79
Pengadaan Besar dan Kecil	11,25	-4,77	5,54	5,10	1,82	5,51	3,01	11,82	13,60	13,76	13,76
Berdasarkan Aktivitas dan Mekanisme	7,24	7,88	2,38	5,56	-4,44	-6,66	7,32	10,70	1,59	-0,68	-2,17
Transportasi, Pengangkutan, dan Komunikasi	98,79	16,44	2,63	-5,20	-5,71	2,60	-5,95	-4,28	-4,43	-6,47	5,17
Perekayasa Khasiat	22,14	12,82	17,13	-24,04	-33,24	-50,46	-36,34	-5,19	-45,32	-31,78	-46,82
Real Estate dan Jasa Pemukiman	-3,60	-7,40	-13,83	-16,24	-7,20	5,27	-5,05	1,79	3,18	-10,98	-5,54
Administrasi Pemerintahan	127,90	111,10	96,48	15,91	105,28	15,30	-40,23	-14,44	-3,82	146,58	855,20
Jasa Persewaan	57,71	38,09	8,88	8,84	-0,91	7,48	10,38	60,75	54,87	47,59	59,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,96	8,58	-22,64	-40,55	-27,99	-21,93	-11,22	2,07	-6,83	-6,63	-6,55
Jasa Kemasyarakatan	-5,10	-9,45	-8,72	-4,41	-6,21	0,84	-17,01	-10,04	-9,02	-6,80	16,83
Jasa Rumah Tangga	47,94	-7,18	-11,50	-7,10	-0,62	3,26	46,60	39,77	38,88	39,54	-4,73

Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

NPL kredit UMKM pada triwulan III 2022 mengalami kenaikan. NPL Kredit UMKM triwulan III 2022 tercatat sebesar 4,12%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,99%. Selanjutnya, pada triwulan III 2022 kredit UMKM yang direstrukturisasi mencapai 15,83% dari total kredit UMKM. Pangsa ini relatif menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 18,97%.



Sumber : Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.27 Perkembangan Restrukturisasi Kredit UMKM

4.4.2 Program Pengembangan UMKM

Program pengembangan kluster dan/atau UMKM yang telah diupayakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPw BI NTB) selama triwulan III 2022, antara lain :

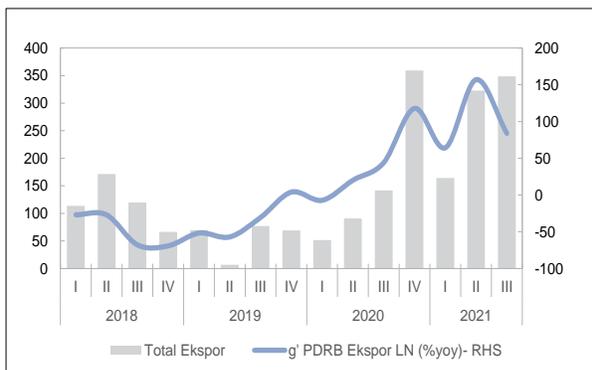
- Melaksanakan pelatihan pengolahan pupuk organik dengan Teknologi MA 11 bersama kelompok kluster Telur Ayam Ras serta mempersiapkan bahan antara lain: gula pasir, dedak halus, *handsprayer*, serta kotoran ternak yang sudah dipisahkan. Terdapat potensi peningkatan produksi pupuk mencapai 750 ton dan ketersediaan tersebut dapat dijadikan

- sumber pupuk mentah yang dapat diakses oleh klaster (bawang merah dan cabai) baik di Kab. Lombok Utara maupun di Kab. Lombok Timur.
- b. Melakukan pendampingan UMKM binaan Bank Indonesia antara lain CV Safir (Nutsafir) dan Indah Mutiara (IML). Adapun nilai sosial serta dampak dari usaha yang dikembangkan oleh masing-masing UMKM yang paling menonjol yaitu keterlibatan pekerja (karyawan) perusahaan yang telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.
 - c. Melakukan pendampingan dan survei pembangunan dan perbaikan UMKM mitra binaan Bank Indonesia, khususnya Kelompok Wanita Mutiara Laut di Kabupaten Lombok Timur yang mengembangkan Lobster. Kelompok Wanita Mutiara laut sebagian besar beranggotakan ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga yang selama ini menghidupi keluarga sehingga diperlukan pendampingan secara intensif untuk kelembagaan dalam pengembangan usaha yang dijalankan.
 - d. Melakukan koordinasi dengan UMKM kelompok Tetu-Tetu di Kabupaten Lombok Timur untuk mendukung pelatihan pengolahan produk turunan (jahe merah) di pondok pesantren Yatofa untuk peminjaman beberapa alat yang akan digunakan untuk pelatihan antara lain mesin oven, vakum siller, dan mesin peniris minyak.
 - e. Melakukan kunjungan dan monitoring UKM Kluster WUBI 2018 yaitu CV. Tri Utami Jaya (Teh Kelor) di Kota Mataram. Kunjungan ini dilakukan untuk monitoring perkembangan usaha UKM. Pengembangan usaha UKM CV. Tri Utami Jaya sudah berjalan cukup baik dan saat ini mengembangkan dua produk turunan baru selain teh kelor kemasan seperti Teh Kelor *Ready to Drink* dan *Face Mask*. Pasar yang sedang dikembangkan oleh UKM CV. Tri Utami Jaya saat ini adalah pasar lokal (*online* dan *offline*) dan pasar luar negeri (ekspor). Dari hasil kunjungan dan monitoring disampaikan beberapa potensi permintaan *buyer* dari Jerman untuk pengiriman kelor bubuk *Grade B* dalam kapasitas besar. Untuk mendapatkan bubuk kelor *Grade B* tersebut diperlukan perlakuan pengeringan dalam ruangan tertutup tanpa terkena sinar matahari (*indoor*GH).
 - f. Melakukan pendampingan kelompok UMKM binaan dalam kegiatan sosialisasi HAKI dengan UMKM KPwDN lainnya secara daring. Cakupan sosialisasi HAKI membahas mengenai pengertian dan manfaat pendaftaran merek dan hak cipta untuk pengembangan usaha UMKM, mekanisme pendaftaran serta biaya pendaftaran merek dan hak cipta, serta agenda pendampingan pendaftaran hak cipta dan merek.

- g. Melakukan kunjungan dan monitoring UKM Karya Mandiri (Gula Aren) di Lombok Barat untuk membahas mengenai perkembangan usaha UKM Karya Mandiri sekarang sudah *upgrade* menjadi CV. Selain itu, saat ini UKM Karya Mandiri sedang memperbesar kapasitas produksi dengan memperbanyak kelompok tani binaan yang tersebar di berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah petani yang bergabung menjadi petani binaan UKM Karya Mandiri saat ini berjumlah kurang lebih 85 orang atau 40% dari total petani aren yang ada di NTB. UKM Karya Mandiri aktif mengikuti ajang perlombaan seperti Wirusaha Muda Mandiri dari Kemenpora dan instansi-instansi lain.

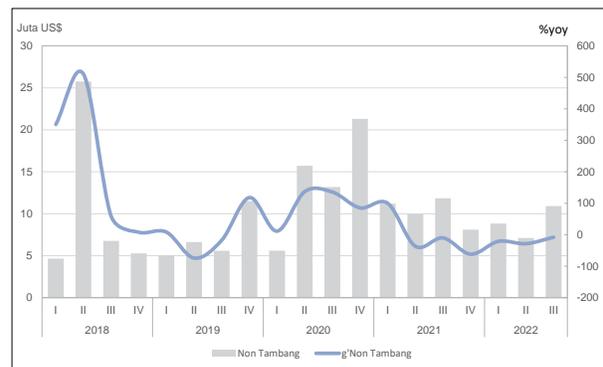
BOKS 3 : Pelatihan Pewarnaan Alami Sebagai Pendorong Wastra Tenun NTB " Go Green Go Global"

Komoditas ekspor Provinsi NTB masih didominasi oleh produk pertambangan yang pangsa eksportnya mencapai lebih dari 90%. Di sisi lain, meskipun secara nominal masih terbatas, geliat ekspor komoditas non tambang juga mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 (Triwulan I s.d. Triwulan III), pertumbuhan ekspor komoditas non tambang tercatat sebesar 205,96% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang tumbuh 198,39% (yoy). Komoditas ekspor non tambang utamanya berupa produk perikanan, buah-buahan, perhiasan/mutiara, dan kerajinan. Secara khusus, ekspor produk kerajinan Provinsi NTB berpotensi terus ditingkatkan sejalan dengan terbukanya pasar ekspor dan dari sisi kualitas yang semakin meningkat.



Sumber : BPS, diolah

Grafik Boks 3.1 Perkembangan Kinerja Ekspor Luar Negeri



Sumber : BPS, diolah

Grafik Boks 3.2 Perkembangan Ekspor Komoditas Non Tambang Provinsi NTB

Sebagai salah satu produk lokal kerajinan unggulan daerah, tenun NTB telah berhasil menembus pasar wastra premium domestik dan akan terus didorong untuk mampu bersaing di pasar global. Guna mewujudkan hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB (KPw BI Provinsi NTB) menyelenggarakan Pelatihan Pewarnaan Alami Wastra Tenun kepada UMKM dan Mitra binaan KPw BI NTB pada 29 – 31 Agustus 2022 bertempat di Yayasan Ponpes Syukur Asyari, Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Fasilitas pendampingan pewarnaan alami merupakan salah satu terobosan yang terus dilakukan KPw BI NTB dengan penyesuaian terhadap *trend* perkembangan zaman, pasar, dan sekaligus pengimplementasian konsep *green economy* dalam pengembangan UMKM di Provinsi NTB.

Program pelatihan tersebut diikuti oleh 15 pengrajin tenun dari lintas generasi mulai dari usia 17 tahun sampai dengan 48 tahun dan berasal dari 5 Kelompok UMKM NTB yaitu Mawar Tenun, Ana Tenun Sukarara, Bun Mudrak, Tenun Pringgasele, dan Tenun Sangkabira Sembalun. Pelatihan dibuka dengan penyampaian materi pengantar dari narasumber dan dilanjutkan dengan praktik secara langsung. Pengrajin diajarkan untuk melakukan pemrosesan tumbuhan alam hingga menjadi bahan baku pewarnaan alami. Adapun bahan-bahan alam yang digunakan pada praktek pewarnaan alami ini di antaranya adalah kayu bakau (*mangrove*), kayu secang, buah jelawe, kayu nangka, indigo, daun mangga, daun minden, dan beberapa bahan dari alam sekitar wilayah Sembalun. Untuk menjadi bahan pewarnaan, bahan-bahan tersebut harus melewati proses ekstraksi melalui perebusan sebelum akhirnya bisa digunakan pada proses pencelupan benang dan dilanjutkan dengan proses fiksasi atau penguncian warna dengan tawas, kapur dan tunjung agar warna yang dihasilkan lebih kuat dan tidak luntur. Salah satu fokus materi pelatihan yang diberikan yaitu pewarnaan lembut atau pastel yang banyak digemari konsumen. Dari hasil praktek tersebut, telah dihasilkan 22 macam warna yang bervariasi dan kekinian.

Inovasi wastra tenun dari segi warna yang sesuai tren pasar saat ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas utamanya untuk memasuki pasar ekspor. Bersamaan dengan hal tersebut, konsep *sustainable fashion* juga perlu terus digaungkan guna membangun kesadaran pada pengrajin mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mendorong budaya ramah lingkungan serta pergeseran preferensi konsumen yang mendukung konsep *go green*, yang juga menjadi salah satu *concern* dalam pasar internasional. Dengan terselenggaranya pelatihan ini diharapkan akan dapat menumbuhkan semangat pengrajin, pelaku UMKM, serta masyarakat pada umumnya untuk menuju *sustainable fashion* dan *green economy*, serta mendorong kelompok tenun dalam mengembangkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya bersaing tinggi.



Sumber : BPS, diolah

Gambar Boks 3.1 Hasil Perwarnaan Bahan
Benang Wastra Tenun



Sumber : BPS, diolah

Gambar Boks 3.2 Proses Pelatihan
Pewarnaan Alami

BAB 5

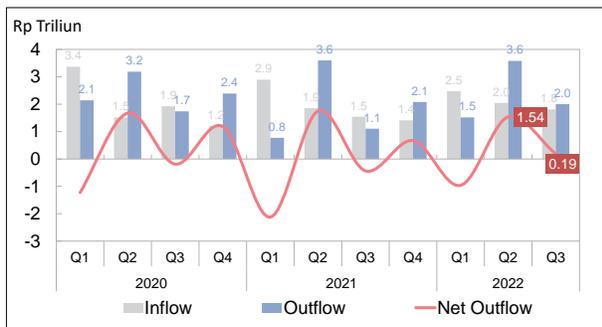
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian di Provinsi NTB pada triwulan III 2022, permintaan terhadap uang kartal dan transaksi menggunakan pembayaran non-tunai di Provinsi NTB tercatat masih meningkat. Kondisi net outflow pada triwulan III 2022 yang sebesar Rp189 miliar menunjukkan lebih banyak uang yang keluar dari kas Bank Indonesia dibanding yang masuk, meski lebih rendah dibandingkan triwulan II 2022 yang mencatatkan net outflow sebesar Rp1,54 triliun. Nominal transaksi non-tunai (melalui RTGS dan kliring) triwulan III 2022 sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh sebesar 10,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,70% (yoy). Nilai transaksi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kredit) mencapai Rp23,61 triliun atau tumbuh sebesar 26,58% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,04% (yoy). Nilai transaksi QRIS pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp52,26 miliar, meningkat 346,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, laju pertumbuhan nilai transaksi Uang Elektronik triwulan III 2022 tercatat 68,88% (yoy), melambat dari 75,49% (yoy) di triwulan sebelumnya.

5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

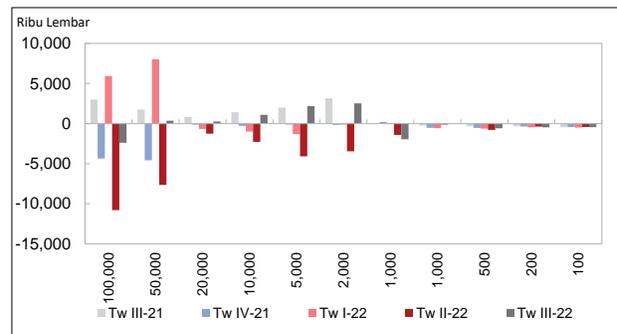
Permintaan terhadap uang kartal di Provinsi NTB masih tinggi. Kondisi *net outflow* pada triwulan III 2022 yang sebesar Rp189 miliar menunjukkan lebih banyak uang yang keluar dari kas Bank Indonesia dibanding yang masuk, meski lebih rendah dibandingkan triwulan II 2022 yang mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,54 triliun. Penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang kartal setelah periode Hari Besar Keagamaan Negara (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri serta *event* internasional MXGP Samota 2022 pada triwulan II 2022. Meski demikian, permintaan di triwulan III 2022 tergolong tinggi karena pola historis pada triwulan III tiga tahun terakhir adalah *net inflow* di mana uang yang masuk ke Bank Indonesia lebih tinggi dibandingkan yang keluar. Pada triwulan III 2021 dan triwulan III 2020, Provinsi NTB mengalami *net*

inflow sebesar Rp433 miliar dan Rp187 miliar. Perbedaan pola di triwulan III 2022 menunjukkan adanya aktivitas ekonomi tinggi yang menciptakan permintaan uang tunai yang tinggi. Adanya relaksasi kebijakan mobilitas serta perkembangan kondisi pengendalian COVID-19 yang semakin membaik diperkirakan mendorong naiknya kebutuhan uang kartal di Provinsi NTB, khususnya pada masa liburan sekolah dan persiapan menuju penyelenggaraan WSBK Championship 2022 di awal November 2022.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.1 Perkembangan Nominal *Inflow*, *Outflow*, dan *Net Outflow* Uang Kartal



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan Pengedaran Uang di Provinsi NTB

Berdasarkan jenis pecahan uang, baik *cash inflow* maupun *cash outflow*, pada triwulan III 2022 masih didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB), yakni Rp50.000 dan Rp100.000. Pada triwulan III 2022, porsi jumlah lembar UPB pada *cash inflow* tercatat sebesar 54,76% dari total pecahan uang yang beredar, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 57,50%. Sementara itu, porsi UPB pada *cash outflow* tercatat sebesar 60,55%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 57,11% dari total pecahan uang yang beredar. Hal ini menunjukkan bahwa tendensi masyarakat untuk menggunakan uang pecahan besar lebih tinggi, diperkirakan karena faktor efisiensi atau kepraktisan dalam melakukan transaksi.

Tabel 5.1 *Inflow, Outflow, dan Net Flow* Uang Per Pecahan (ribu lembar)

Tahun	Triwulan	Flow	Uang Kertas							Uang Logam					Jumlah UK+UL
			100,000	50,000	20,000	10,000	5,000	2,000	1,000	1,000	500	200	100	50	
2020	I	Inflow	21,062	23,011	1,899	3,541	5,113	5,881	633	2	7	12	19	-	61,180
		Outflow	6,698	9,744	1,068	2,344	3,233	3,490	1,080	210	365	520	330	0	29,082
		Net Flow	14,364	13,267	831	1,197	1,881	2,390	(447)	(208)	(358)	(509)	(312)	(0)	32,097
	II	Inflow	7,877	12,500	1,618	3,428	4,227	4,591	451	45	260	-	-	-	34,997
		Outflow	19,943	21,128	2,158	5,080	5,806	4,937	1,056	140	145	160	160	0	60,714
		Net Flow	(12,066)	(8,628)	(540)	(1,652)	(1,579)	(346)	(606)	(95)	115	(160)	(160)	(0)	(25,717)
	III	Inflow	11,454	13,999	1,266	2,466	3,585	5,262	613	-	193	-	0	-	38,838
		Outflow	10,637	12,424	964	1,583	2,190	2,209	199	170	40	50	30	0	30,497
		Net Flow	817	1,576	302	882	1,395	3,053	414	(170)	153	(50)	(30)	(0)	8,342
	IV	Inflow	7,284	8,325	1,011	1,868	2,661	3,411	568	-	6	5	10	0	25,148
		Outflow	15,598	14,856	1,714	2,580	3,555	3,712	789	405	575	330	300	5	44,420
		Net Flow	(8,315)	(6,532)	(704)	(713)	(894)	(300)	(220)	(405)	(569)	(325)	(290)	(5)	(19,271)
Total	Inflow	47,677	57,835	5,794	11,302	15,587	19,145	2,265	47	466	17	29	0	160,163	
	Outflow	52,877	58,152	5,904	11,588	14,784	14,347	3,124	925	1,125	1,060	820	5	164,713	
	Net Flow	(30,950)	(25,515)	(3,496)	(7,809)	(11,527)	(6,261)	(1,277)	(1,762)	(1,330)	(1,064)	(859)	(5)	(91,854)	
2021	I	Inflow	19,314	17,288	1,700	3,144	4,060	4,436	645	20	80	9	5	-	50,700
		Outflow	4,385	5,184	1,331	2,270	3,373	3,626	159	640	735	341	361	-	22,406
		Net Flow	14,929	12,104	369	874	687	810	486	(620)	(655)	(333)	(357)	-	28,295
	II	Inflow	11,414	12,129	1,824	3,610	4,381	4,526	598	-	1	3	3	-	38,488
		Outflow	23,677	20,612	3,495	6,857	8,663	8,068	422	731	795	421	471	-	74,213
		Net Flow	(12,263)	(6,920)	962	1,395	2,686	2,816	(327)	1,260	1,390	674	718	-	(5,889)
	III	Inflow	9,043	10,821	1,661	3,063	4,053	5,296	374	-	-	-	-	-	34,312
		Outflow	6,042	7,174	902	1,227	1,712	1,435	319	235	230	295	290	-	19,860
		Net Flow	3,002	3,648	759	1,836	2,342	3,861	55	(235)	(230)	(295)	(290)	-	14,452
	IV	Inflow	9,110	8,508	1,294	2,311	3,208	3,654	546	1	1	4	4	0	28,640
		Outflow	13,460	13,095	1,427	2,592	3,317	3,809	340	527	536	360	440	0	39,903
		Net Flow	(4,350)	(4,587)	(133)	(281)	(110)	(155)	206	(527)	(535)	(357)	(437)	0	(11,264)
Total	Inflow	48,881	48,746	6,480	12,128	15,702	17,912	2,163	21	82	15	11	0	152,140	
	Outflow	47,564	46,065	7,155	12,945	17,065	16,939	1,240	2,133	2,296	1,417	1,562	0	156,382	
	Net Flow	(25,678)	(16,487)	1,047	1,298	3,340	6,176	(670)	404	740	(138)	(169)	0	(28,418)	
2022	I	Inflow	15,978	15,668	1,699	3,101	4,263	5,313	670	10	21	6	8	-	46,737
		Outflow	10,042	7,649	2,365	4,093	5,571	5,420	732	578	650	471	501	0	38,074
		Net Flow	5,936	8,019	(666)	(992)	(1,308)	(108)	(62)	(568)	(630)	(466)	(493)	(0)	8,663
	II	Inflow	13,200	11,801	2,405	4,487	5,661	5,300	616	1	5	2	2	0	43,479
		Outflow	23,982	19,449	3,662	6,760	9,733	8,752	2,030	114	780	370	410	0	76,043
		Net Flow	(10,782)	(7,648)	(1,257)	(2,273)	(4,072)	(3,452)	(1,414)	(113)	(776)	(368)	(408)	(0)	(32,564)
	III	Inflow	11,213	11,372	2,251	3,735	5,440	6,446	761	-	-	14	10	0	41,240
		Outflow	13,594	11,004	1,986	2,642	3,242	3,912	2,723	5	585	480	450	0	40,623
		Net Flow	(2,381)	368	265	1,093	2,198	2,534	(1,962)	(5)	(585)	(467)	(440)	(0)	617

Sumber : Bank Indonesia

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pemenuhan permintaan uang Rupiah dengan pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTB pada triwulan IV 2022, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

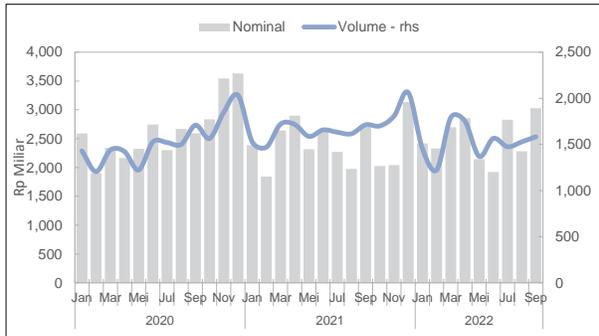
- Membuka layanan penukaran uang rusak melalui Aplikasi PINTAR di setiap hari Kamis kepada pihak Perbankan, BPR, *retailer* dan masyarakat umum, dengan tetap mengoptimalkan layanan penukaran uang oleh Bank Umum di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
- Memastikan kecukupan saldo kas titipan di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk perluasan jangkauan pelayanan perkasan dengan melakukan kegiatan kas titipan secara rutin dengan tetap memperhatikan aspek efektif dan efisien. Adapun pelaksanaan kas titipan di triwulan IV 2022 tercatat sebanyak 5 kali.
- Apabila dalam kondisi tertentu terdapat kebutuhan yang sifatnya mendesak yang harus dipenuhi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kebutuhan yang tinggi lainnya, maka

- perbankan dapat melakukan kegiatan penarikan dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Bank Indonesia dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- d. Berkoordinasi dengan *stakeholders* di daerah untuk mencegah maraknya penyebaran uang palsu. Koordinasi intensif serta *refreshment* terkait kedaulatan Rupiah serta penanganan uang palsu terus dilakukan dengan pihak Polda, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, dan Bareskrim.
 - e. Dalam rangka mendukung pelaksanaan WSBK di Mandalika tanggal 19 sd 21 November 2022, Bank Indonesia membuka layanan kas keliling *retail* pra kegiatan yang menyasar Pertokoan dan Pasar di wilayah Mandalika. Selain itu, BI juga membuka Layanan Kas Keliling kepada masyarakat umum di Pantai Mandalika selama pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - f. Sebagai bentuk *institutional leadership* BI sebagai otoritas dalam Pengelolaan Uang Rupiah, maka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan *review* terhadap kondisi peredaran uang khususnya melalui pemenuhan di Kota Mataram akan dilakukan kepada perbankan dan PJPUR dalam bentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengedaran Uang Rupiah. Kegiatan tersebut akan berfokus pada empat hal yakni (i) *overview* Pengedaran Uang Rupiah (ii) *review* terhadap realisasi-proyeksi penarikan dan penyeteroran uang oleh perbankan ke BI (iii) Kesiapan pemenuhan uang kartal hingga akhir tahun, dan (iv) memperkuat *engagement* BI-Perbankan/PJPUR dalam bentuk pemberian apresiasi terhadap kinerja pengelolaan perkasan perbankan.
 - g. Dalam rangka pengembangan perluasan edukasi Rupiah dan membangun *ownership* bersama atas program edukasi Rupiah terbaru, maka Bank Indonesia senantiasa melaksanakan edukasi CBP Rupiah secara langsung ke masyarakat melalui sosialisasi kepada Ibu Penggerak PKK kecamatan, Sekolah dan Perbankan. Selain itu, BI melaksanakan edukasi CBP Rupiah melalui media seperti pemasangan *billboard* CBP Rupiah di badan jalan strategis dan pemasangan spanduk di seluruh jaringan perbankan di Kota Mataram.

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NON-TUNAI

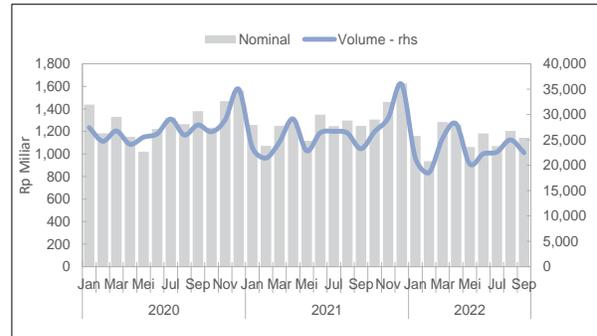
Nominal transaksi non-tunai (melalui RTGS dan Kliring) pada triwulan III 2022 mengalami pertumbuhan dibandingkan kuartal sebelumnya, namun volume transaksi mengalami penurunan. Nominal transaksi non-tunai triwulan III 2022 sebesar Rp11,55 triliun atau tumbuh sebesar 10,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 3,70% (yoy). Pertumbuhan ini menunjukkan transaksi dari konsumsi masyarakat yang meningkat pada triwulan III 2022 yang bertepatan dengan libur sekolah, *peak season* wisatawan mancanegara dan tahun ajaran

baru. Adapun secara volume, transaksi non-tunai melalui RTGS dan kliring tercatat tumbuh sebesar 0,96% (yoy), melandai dibandingkan triwulan yang sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 8,12% (yoy).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 Perkembangan Transaksi RTGS



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.4 Perkembangan Transaksi Kliring

Nominal transaksi melalui RTGS tumbuh sebesar 17,54% (yoy), namun volume transaksinya turun sebesar 2,18% (yoy) pada triwulan III 2022. Hal ini menunjukkan nilai transaksi dengan nilai yang tinggi atau *high value payment* (lebih dari Rp100 juta) yang dilakukan antar lembaga/institusi di NTB mengalami peningkatan. Di sisi lain, nilai transaksi kliring pada triwulan III 2022 terkontraksi sebesar 2,42% (yoy), demikian pula dengan volumenya yang terkontraksi sebesar 0,88% (yoy). Hal ini menunjukkan penurunan penggunaan kliring di Provinsi NTB dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditengarai turut dipengaruhi oleh adanya infrastruktur pembayaran non-tunai baru yaitu menggunakan BI-FAST.

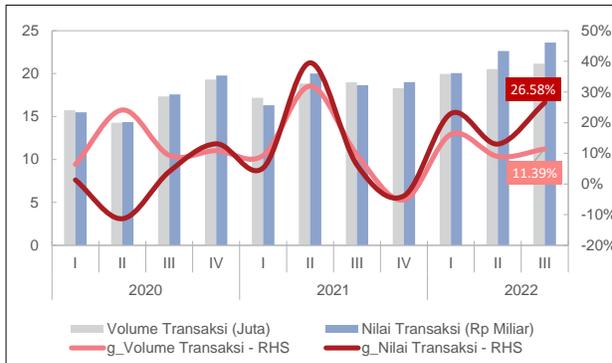
Nilai transaksi kliring Provinsi NTB terdiri dari kliring kredit, kliring debit, dan kliring pengembalian. Kliring warkat kredit memiliki proporsi terbesar dari total nilai transaksi di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 yaitu 32,01%, selanjutnya kliring debit memiliki proporsi 23,95% (yoy), dan kliring pengembalian sebesar 0,09%. Kliring warkat kredit mencapai nilai transaksi sebesar Rp2,61 triliun, sedangkan kliring debit mencapai sebesar Rp8,15 miliar dan kliring pengembalian mencapai Rp6,42 miliar. Bank Indonesia terus mendukung aktivitas kliring dengan ketentuan perpanjangan penurunan tarif SKNBI. Ketentuan ini berlaku sejak 1 April 2020 hingga 30 Juni 2022, dan kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2022. Hal ini diharapkan dapat memudahkan transaksi masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Tabel 5.2 Ketentuan Penurunan Tarif SKNBI

Biaya Transfer SKNBI	Sebelum Penurunan Tarif	Setelah Penurunan Tarif
Dari nasabah ke bank	Rp 3.500,-	Rp 600,-
Dari perbankan ke BI	Rp 2.900,-	Rp 1,-

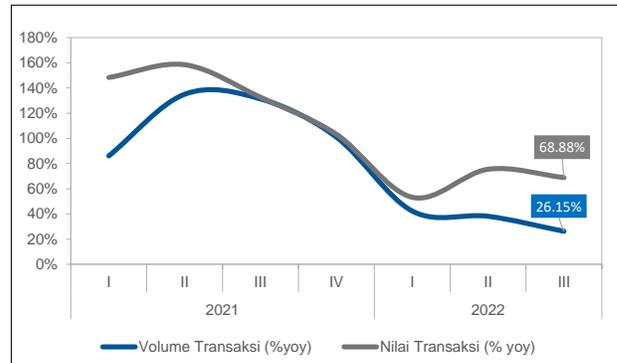
Nilai transaksi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) pada triwulan III mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai transaksi total APMK, baik debit maupun kredit, terus tumbuh selama satu tahun terakhir. Pada triwulan III 2022, nilai transaksi APMK mencapai Rp23,61 triliun atau tumbuh sebesar 26,58% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,04% (yoy). Pertumbuhan nilai transaksi juga sejalan dengan pertumbuhan volume transaksi APMK dan jumlah kartu yang beredar. Volume transaksi tumbuh sebesar 11,39% (yoy), sedangkan jumlah kartu naik sebesar 34,21% (yoy), mencapai lebih dari 12,19 juta kartu yang beredar. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi non-tunai menggunakan kartu semakin diminati oleh masyarakat Provinsi NTB. Pertumbuhan penggunaan APMK didorong oleh nilai transaksi kartu jenis debit yang tumbuh sebesar 26,79% (yoy). Penggunaan kartu debit mendominasi penggunaan APMK dengan proporsi volume transaksi sebesar 99,45% dari total volume transaksi APMK. Di sisi lain, nilai transaksi kartu jenis kredit menurun pada triwulan III 2022 sebesar 6,33% (yoy), dan volume transaksi menggunakan kartu jenis kredit menurun 14,01% (yoy).

Perkembangan volume dan nilai transaksi Uang Elektronik pada triwulan III 2022 masih mengindikasikan pertumbuhan meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi uang elektronik pada triwulan III 2022 tercatat tumbuh 26,15% (yoy), melambat dibandingkan triwulan II 2022 yang tumbuh 38,10% (yoy). Volume transaksi uang elektronik triwulan III 2022 tercatat sebanyak 5,17 juta, lebih rendah dibanding 5,28 juta transaksi uang elektronik di triwulan sebelumnya. Laju pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik triwulan III 2022 tercatat 68,88% (yoy), melambat dari 75,49% (yoy) di triwulan sebelumnya. Secara nominal, nilai transaksi uang elektronik di Provinsi NTB triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp702,35 miliar, menurun dari Rp744,24 miliar di triwulan II 2022.



Sumber : Bank Indonesia

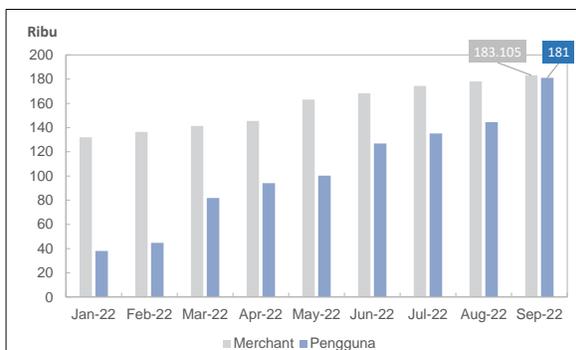
Grafik 5.5 Perkembangan Nominal Transaksi APMK di Provinsi NTB



Sumber : Bank Indonesia

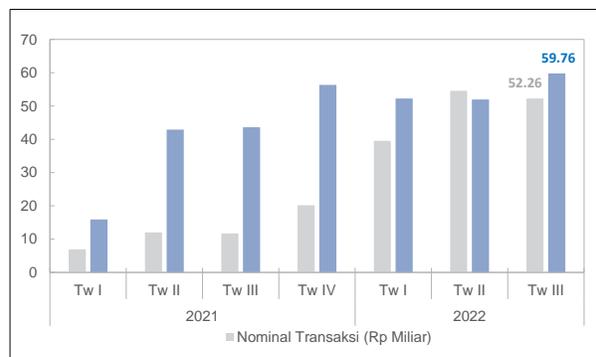
Grafik 5.6 Perkembangan Nominal dan Volume Transaksi Uang Elektronik di Provinsi NTB

Pembayaran non-tunai lainnya yaitu QRIS di wilayah Nusa Tenggara Barat terus tumbuh hingga akhir triwulan III 2022. Dilihat dari jumlah *merchant*, per September 2022 Provinsi NTB memiliki 183.105 *merchant* pengguna QRIS atau tumbuh 101,69% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah total pengguna QRIS di Provinsi NTB sampai dengan bulan September adalah 181.152 pengguna, meningkat 514,83% dibandingkan Desember 2021. Nilai transaksi QRIS pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp52,26 miliar, meningkat 346,57% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara volume transaksi tercatat sebesar 597.612, meningkat 37,09% (yoy). Keberhasilan penambahan penggunaan QRIS tersebut didukung oleh berbagai edukasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada berbagai pelaku usaha (pelaku pariwisata, pedagang, pelajar, dan lain-lain).



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.7 Perkembangan *Merchant* dan Pengguna QRIS di Provinsi NTB



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.8 Perkembangan *Merchant* dan Pengguna QRIS di Provinsi NTB

Guna mencapai target pengguna QRIS di tahun 2022, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengakselerasinya, baik dari sisi peningkatan literasi, pembentukan ekosistemnya, hingga berbagai *user experience* yang diharapkan turut menambah jumlah pengguna baru. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yakni :

- a. Sosialisasi dan edukasi QRIS selama periode triwulan III 2022 di beberapa tempat dengan target peserta yang mayoritas berasal dari generasi muda, akademisi, termasuk pelaku usaha yang memiliki basis pengguna tinggi. Adapun selama periode laporan telah dilakukan edukasi kepada kurang lebih 10.000 peserta, antara lain kepada mahasiswa Universitas Mataram, UIN Mataram, IPDN NTB, pelaku UMKM, termasuk bekerja sama Lembaga Sawah Institute dengan dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI.
- b. Penyelenggaraan *user experience* QRIS untuk menambah penggunaan QRIS dalam proses pembelian, antara lain di *event* Mataram Fair, Lombok Food Festival, dan QRIS *Going Zero Waste*. Adapun total *user experience* QRIS selama pelaksanaan acara tersebut mencapai kurang lebih 19.000 *user experience*, yang terdiri dari pembelian tiket, penukaran *voucher* belanja, games berhadiah, dan pembelian minuman.
- c. *Launching* QRIS sebagai kanal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tanggal 18 Juli 2022. *Launching* dilakukan secara langsung oleh Gubernur Provinsi NTB bersama-sama dengan KPw BI Provinsi NTB, Bank NTB Syariah dan Tim Pembina Samsat. Sejak di luncurkan hingga periode 22 November 2022 telah terdapat sebanyak 4.421 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB menggunakan QRIS dengan total nominal penerimaan mencapai Rp4,84 Miliar.
- d. Promo belanja menggunakan QRIS seperti Promo Kemerdekaan (Diskon transaksi pada beberapa *coffee shop* selama 17-20 Agustus 2022 dengan menggunakan QRIS), Gelegar Diskon QRIS Bank NTB Syariah di seluruh Dealer Krida Honda Motor se-Nusa Tenggara Barat s.d. 31 Oktober 2022 (Untuk 5.800 Transaksi) dan Diskon Tiket Nonton Sepak Bola Liga 3 oleh Bank NTB Syariah dengan menggunakan QRIS s.d. 31 Desember 2022 (Untuk 5.800 Transaksi).

Dalam rangka mendukung implementasi transaksi nontunai di daerah, Bank Indonesia melalui program elektronifikasi terus mendukung beberapa kegiatan. Salah satu hal yang dilakukan adalah pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) di

daerah. Pada tahun 2021 telah terbentuk 11 TP2DD di Provinsi NTB, yang terdiri dari 10 Pemerintah Kab/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi.

Adapun berdasarkan pengisian Indeks Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2022, sudah terdapat 3 Pemda yang berkategori digital, yakni Pemda Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Barat. Guna mendorong lebih banyak lagi Pemda yang berkategori digital, telah dilakukan kegiatan evaluasi sekaligus *coaching clinic* kepada 11 Pemda di Provinsi NTB secara *hybrid*. Adapun kegiatan tersebut ditujukan agar Pemda dapat mengembangkan potensi digitalisasi, serta eksplorasi potensi jenis pendapatan yang memungkinkan untuk ditransformasikan ke digital. Selain itu, berbagai upaya literasi digital masyarakat di Provinsi NTB juga telah dilaksanakan pada triwulan III 2022. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat yang berkualitas, serta diharapkan dapat mendorong tingkat inklusi dengan memanfaatkan berbagai produk digital (termasuk produk di sektor keuangan). Ke depan, QRIS sebagai kanal pembayaran retail diharapkan dapat diimplementasikan juga untuk mendorong transaksi pembayaran pajak yang lebih mudah dan cepat.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB berdasarkan data Agustus 2022 mengalami perbaikan sejalan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut, tercermin dari peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ditinjau secara spasial, tingkat pengangguran di perkotaan per Agustus 2022 mengalami penurunan sedangkan di perdesaan mengalami peningkatan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB yang secara konsisten melanjutkan tren positif pada tahun 2022, kondisi kesejahteraan masyarakat NTB pada Maret 2022 sudah lebih baik dibandingkan Maret 2021 dan September 2019 (sebelum pandemi). Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani pada triwulan III 2022 juga tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kondisi kesejahteraan semakin membaik seiring dengan penurunan kasus COVID-19 yang mendukung recovery aktivitas perekonomian sehingga memberikan dampak positif pada lapangan usaha dan peningkatan kondisi ketenagakerjaan.

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi NTB

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2022 dibandingkan Agustus 2021 ditandai oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari 2,74 juta orang pada Agustus 2021 menjadi 2,80 juta orang pada Agustus 2022 sehingga TPAK Agustus 2022 tercatat 70,93%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 70,57%. Sejalan dengan perbaikan TPAK, TPT tercatat mengalami penurunan dari 3,01% pada Agustus 2021 menjadi 2,89% pada Agustus 2022. Angka TPT Agustus 2022 juga terpantau lebih rendah dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,28% sehingga mengindikasikan bahwa kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Secara umum, perbaikan atau penurunan TPT pada periode Agustus 2022 dibandingkan dengan Agustus 2021 menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi yang terus berlangsung telah memberikan dampak positif terhadap indikator ketenagakerjaan secara konsisten.

Tabel 6.3
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTB (ribu orang)

KEGIATAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	FEB	AGS								
Angkatan Kerja	2,459.02	2,238.41	2,489.39	2,472.54	2,632.75	2,689.39	2,747.52	2,739.90	2,781.38	2,799.18
Bekerja	2,375.81	2,154.12	2,408.10	2,387.04	2,554.53	2,575.96	2,638.45	2,657.40	2,672.31	2,718.35
Menganggur	83.21	84.29	81.29	85.5	78.22	113.43	109.07	82.5	109.08	80.83
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69.83%	65.91%	69.62%	68.65%	69.54%	70.45%	71.32%	70.57%	70.25%	70.93%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.38%	3.72%	3.27%	3.42%	3.04%	4.22%	3.97%	3.01%	3.92%	2.89%

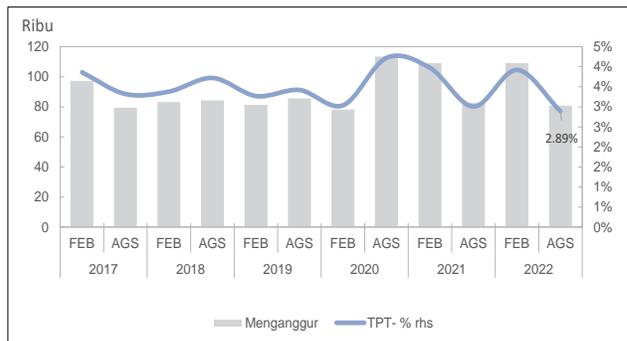
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Ditinjau secara spasial, tingkat pengangguran di perkotaan per Agustus 2022 mengalami penurunan sedangkan di pedesaan mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 3,52% pada Agustus 2022, menurun dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 3,85%. Penurunan tingkat pengangguran di perkotaan terjadi sejalan dengan mulai pulihnya beberapa lapangan usaha (LU) seperti LU Perdagangan serta LU Akomodasi dan Makan Minum yang sudah mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan usaha pariwisata yang sudah mulai kembali normal. Di sisi lain, tingkat pengangguran di wilayah pedesaan per Agustus 2022 sebesar 2,28%, meningkat dari Agustus 2021 yang sebesar 2,18%. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja di lapangan usaha pertanian.

Berdasarkan distribusi tenaga kerja secara sektoral atau Lapangan Usaha (LU), pada periode Agustus 2022 Provinsi NTB didominasi oleh LU Pertanian dengan pangsa 34,57% (939,78 ribu orang). LU Pertanian mengalami kenaikan pangsa tenaga kerja di periode Agustus 2022 dibandingkan periode Agustus 2021 yang tercatat sebesar 32,61%. Dominasi lapangan pekerjaan tidak banyak berubah pada 5 tahun terakhir, hal ini sejalan dengan struktur ekonomi Provinsi NTB di mana sektor tersebut merupakan salah satu sektor unggulan. LU lainnya yang juga mendominasi distribusi lapangan kerja yaitu LU Perdagangan dengan pangsa sebesar 22,04% (599,23 ribu orang), dan LU Industri Pengolahan sebesar 10,11% (274,74 ribu orang).

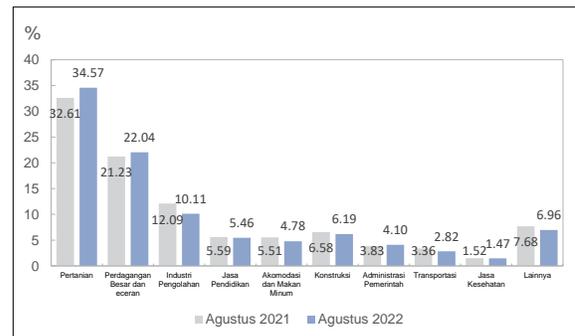
LU Pertanian mengalami peningkatan tertinggi untuk persentase penduduk yang bekerja pada periode Agustus 2021-2022 sebesar 1,96%. Selain LU Pertanian, serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan dan LU Administrasi Pemerintah turut meningkat masing-masing sebesar 0,81% dan 0,27%. Sementara untuk LU lainnya relatif mengalami penurunan sejalan dengan pandemi COVID-19 yang mulai meluas sejak paruh kedua Maret 2020 hingga saat ini telah memberikan tekanan pada sebagian besar lapangan usaha. Meskipun kondisi pandemi mulai relatif terkendali, *scarring effect* di sebagian besar lapangan usaha masih terasa sehingga secara pemulihan masih belum kuat

yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal.



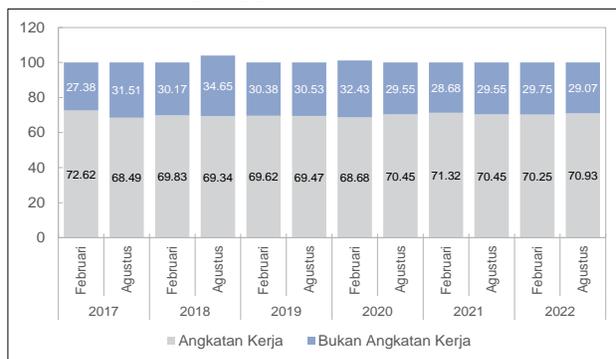
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.1 Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Provinsi NTB



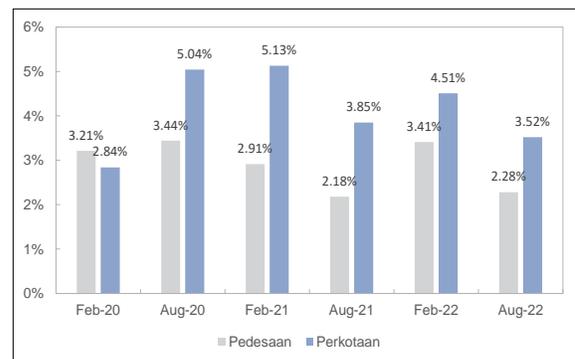
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.2 Distribusi Tenaga Kerja per Sektor/LU



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.3 Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.4 TPT Provinsi NTB Menurut Tempat Tinggal

Produktivitas tenaga kerja tertinggi berdasarkan pangsa PDRB terjadi pada LU Pertambangan dan Penggalian, sementara yang terendah pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. LU yang menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi sebesar 35,10% yakni Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun memiliki produktivitas terendah dibuktikan dengan ukuran disproporsionalitas yang rendah (-12,29%). Sebaliknya, LU Pertambangan dan Penggalian yang hanya menyerap 1,52% tenaga kerja berkontribusi 17,33% terhadap PDRB Provinsi NTB dengan ukuran disproporsionalitas mencapai 15,88%. Penggunaan teknologi serta kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi ditengarai menjadi salah satu faktor pendukung tingginya produktivitas pada LU Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 6.4
Perbandingan Kinerja Lapangan Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja

LAPANGAN USAHA	Tenaga Kerja		PDRB (ADHB)		Ukuran Disproporsionalitas	
	Jumlah (Ribuan)	Pangsa	Nominal (Miliar)	Pangsa	Selisih (PDRB - TK)	Share (PDRB/TK)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	939.73	35.10%	31,960.41	22.80%	-12.29%	64.97%
Perdagangan Besar dan Eceran	599.12	22.38%	19,596.83	13.98%	-8.39%	62.49%
Industri Pengolahan	274.83	10.26%	5,604.53	4.00%	-6.27%	38.96%
Konstruksi	148.42	5.54%	13,667.30	9.75%	4.21%	175.92%
Jasa Pendidikan	129.94	4.85%	7,168.64	5.11%	0.26%	105.40%
Akomodasi dan Makan Minum	168.27	6.28%	1,973.00	1.41%	-4.88%	22.40%
Administrasi Pemerintah	111.45	4.16%	9,096.02	6.49%	2.33%	155.92%
Transportasi dan Pergudangan	76.66	2.86%	6,998.16	4.99%	2.13%	174.41%
Jasa Kesehatan	39.96	1.49%	2,932.37	2.09%	0.60%	140.20%
Pertambangan dan Penggalian	40.78	1.52%	24,283.23	17.33%	15.80%	1137.75%
Lainnya	148.42	5.54%	41,156.06	29.37%	23.82%	529.75%

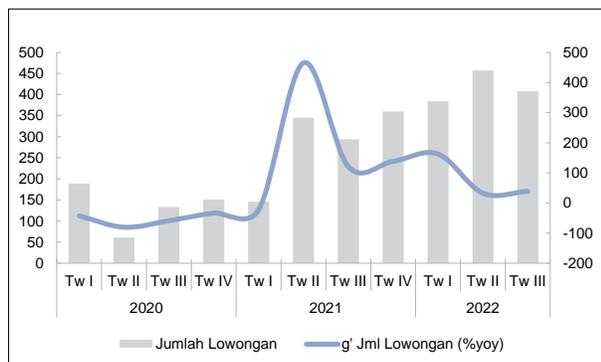
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Jumlah penduduk yang termasuk dalam pekerja tidak penuh (setengah menganggur dan pekerja paruh waktu) periode Agustus 2022 sebesar 38,60% dari total angkatan kerja yang bekerja di Provinsi NTB. Persentase pekerja tidak penuh tersebut menurun dibandingkan periode Agustus 2021 yang tercatat sebesar 43,89%. Secara spesifik, jumlah penduduk pada periode Agustus 2022 dalam kategori setengah menganggur tercatat 13,30%, sementara pekerja paruh waktu tercatat 25,30%. Menurunnya pekerja tidak penuh diindikasikan sejalan dengan kembali beroperasinya beberapa usaha utamanya di LU Perdagangan dan LU Akomodasi Makan Minum seiring dengan mulai meningkatnya aktivitas pariwisata. Pekerja tidak penuh rentan masuk dalam kategori pengangguran absolut karena sifat pekerjaan yang tidak tetap. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui peningkatan kompetensi dan kualitas pekerja di NTB yang sampai dengan periode Agustus 2022 masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah (46,53%).

Tren penggunaan tenaga kerja triwulan III 2022 relatif masih terbatas. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia terkait dengan penggunaan tenaga kerja, realisasi penggunaan tenaga kerja pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 13,23%, menurun dari triwulan sebelumnya yang mencapai 34,61%. Di sisi lain, data pertumbuhan *job vacancy* triwulan III 2022 menunjukkan pertumbuhan 38,78% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 32,46% (yoy). Dampak *scarring effect* pasca pandemi yang masih terasa disinyalir membuat pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan cenderung menahan penambahan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.

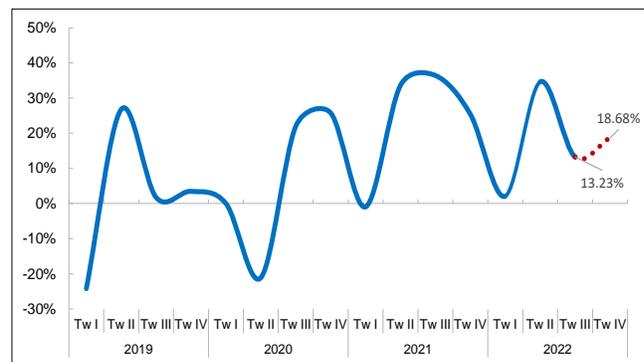
6.1.2 Prospek Ketenagakerjaan Triwulan IV-2022

Kondisi ketenagakerjaan pada triwulan IV 2022 diperkirakan akan membaik. Perkiraan perbaikan kondisi ketenagakerjaan tersebut mengacu pada data hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penggunaan tenaga kerja triwulan IV yang diperkirakan sebesar 18,68%, relatif meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 13,23%. Secara umum, perbaikan kondisi ketenagakerjaan masih terus berlanjut pada triwulan IV 2022 yang utamanya didukung oleh kembali normalnya aktivitas perwisata yang dapat menjadi daya ungkit peningkatan aktivitas ekonomi sehingga berdampak pada serapan tenaga kerja. Optimisme *recovery* ketenagakerjaan berpotensi terus menguat sejalan dengan dihapuskannya pembatasan mobilitas masyarakat serta pemulihan ekonomi yang terus berlanjut.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.5 Perkembangan Pertumbuhan Indeks *Job Vacancy* Provinsi NTB



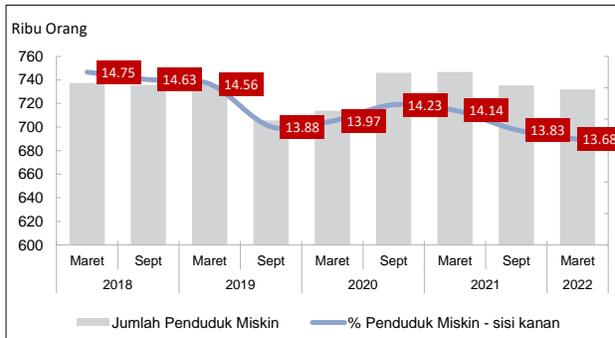
Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.6 Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Perkembangan Penggunaan Tenaga Kerja Provinsi NTB

6.2 PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN PROVINSI NTB

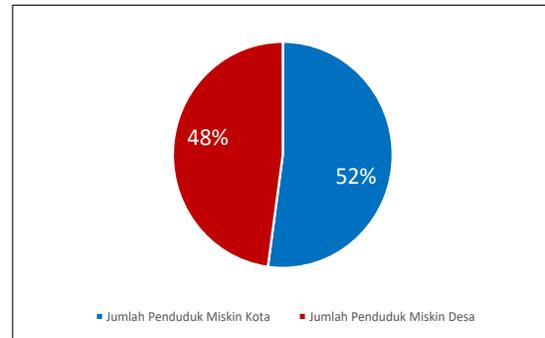
6.2.1 Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi NTB

Searah dengan perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB, kondisi kesejahteraan masyarakat NTB pada periode Maret 2022 tercatat membaik dibandingkan periode Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2022 tercatat sebanyak 731,94 ribu orang atau 13,68% dari total penduduk NTB. Angka ini menurun dibandingkan periode Maret 2021 yang tercatat sebanyak 746,66 ribu orang atau sebesar 14,14% dari total penduduk serta sudah sedikit membaik dibandingkan periode September 2019 (sebelum pandemi) yang tercatat sebesar 14,56%.



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

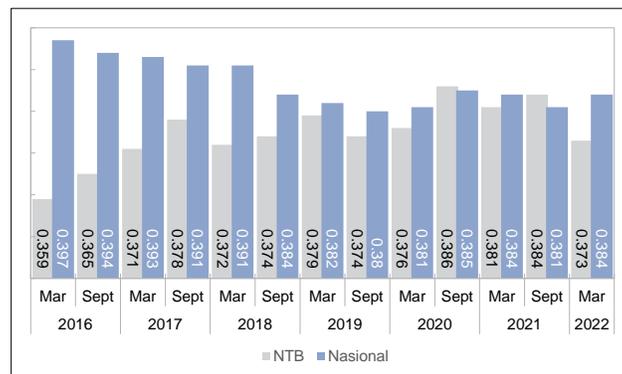
Grafik 6.7 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.8 Persentase Distribusi Penduduk Miskin

Angka kemiskinan di daerah perkotaan periode Maret 2022 lebih tinggi dari daerah pedesaan. Secara khusus, garis kemiskinan di Provinsi NTB pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp459.826 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2021 yang sebesar Rp423.505 per kapita per bulan. Secara spasial, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebanyak 381,84 ribu orang, sementara jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan tercatat sebanyak 350,09 ribu orang. Meskipun pada tahun 2022 pembatasan mobilitas cenderung lebih longgar dibandingkan tahun 2021, *scarring effect* dari pandemi COVID-19 masih dirasakan, terutama untuk LU Perdagangan dan LU Akomodasi dan Makan Minum. Kedua LU tersebut relatif terdampak baik dari sisi keuangan dan sumber tenaga kerja dengan adanya *shifting* dari *work from office* menjadi *work from home* dan kebijakan perumahan sementara (*unpaid leave*) yang diterapkan selama *demand* menurun. Kondisi ini berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat khususnya di daerah perkotaan dan menambah tekanan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB

Nilai *Gini Ratio* periode Maret 2022 membaik dibandingkan periode Maret 2021. Di samping angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan juga dapat ditinjau dari tingkat ketimpangan atau *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana semakin tinggi nilai *Gini Ratio* akan mencerminkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Provinsi NTB tercatat mengalami perbaikan dari 0,381 per Maret 2021 menjadi 0,373 per Maret 2022. Perbaikan ini sejalan dengan dibukanya kembali aktivitas ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat meskipun masih dalam skala terbatas. Berbagai program untuk mendukung peningkatan kesejahteraan yang masih terus berlanjut terindikasi mampu menahan tekanan yang lebih tinggi pada kesejahteraan masyarakat baik program dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program jaring pengaman sosial dari Pemerintah Daerah.

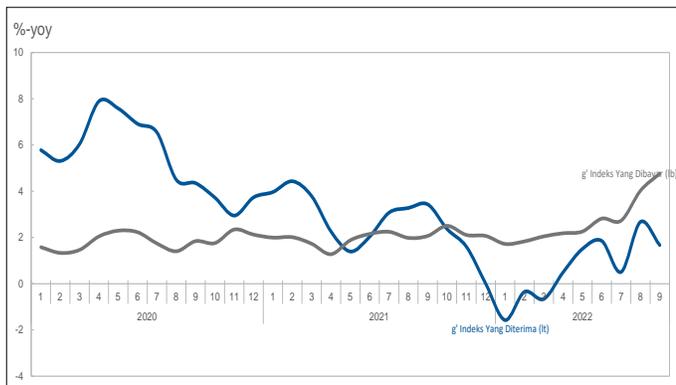
Secara umum, pemerataan pendapatan masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi NTB, di antaranya melalui perbaikan kinerja LU utama seperti LU Pertanian, melalui inovasi pertanian, hilirisasi produk yang memberikan nilai tambah, penggunaan teknologi pertanian, serta mendorong tumbuhnya sektor ekonomi potensial yang padat karya seperti pariwisata. Hal ini diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

6.2.2 Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

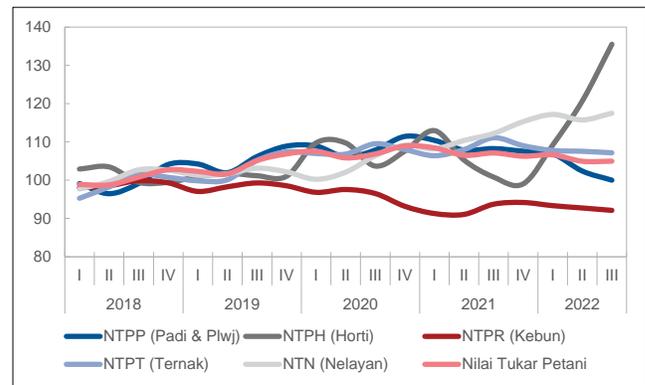
Nilai Tukar Petani (NTP) secara rata-rata pada triwulan III 2022 meningkat dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya. Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi NTB pada triwulan III 2022 yang direpresentasikan oleh NTP sebesar 104,97, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 104,95. Peningkatan NTP ini didorong oleh peningkatan pada subsektor hortikultura dan subsektor perikanan (nelayan). Sektor perkebunan dan tanaman pangan (padi dan palawija) tercatat memiliki NTP di bawah 100 yang artinya pengeluaran dari petani sektor tersebut lebih tinggi dibandingkan pendapatannya dari hasil bertani. Penurunan terbesar dari subsektor Padi dan Palawija yang pada triwulan III 2022 menurun menjadi 99,98 setelah di triwulan sebelumnya mencapai 102,36. Meskipun demikian masih terdapat satu subsektor yang mengalami kenaikan signifikan yaitu subsektor hortikultura yang pada triwulan III 2022 tercatat sebesar 135,48, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 120,68.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) tercatat mengalami peningkatan sebesar 1,66 poin, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) meningkat sebesar 1,57 poin dibandingkan

triwulan sebelumnya. Tipisnya margin antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani menunjukkan tingkat kesejahteraan petani masih cukup rendah. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima petani. Peningkatan biaya diindikasikan akibat terjadinya peningkatan harga terutama pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami inflasi 7,84% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.10 Pertumbuhan Indeks Yang Diterima dan Indeks Yang Dibayar

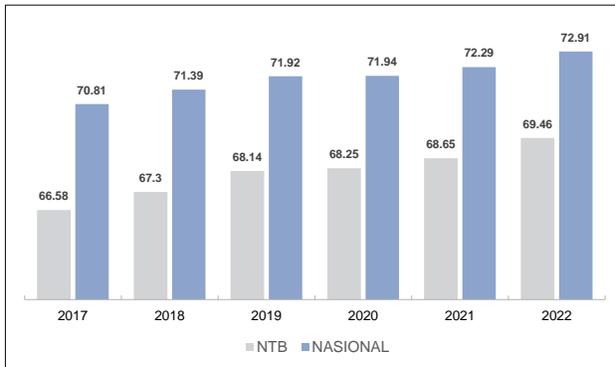
Grafik 6.11 Nilai Tukar Petani Provinsi NTB

LU Pertanian sebagai salah satu LU dengan kontribusi terbesar pada struktur PDRB NTB perlu diimbangi dengan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan upaya untuk mendukung agar harga jual produk pertanian tetap stabil serta dukungan fasilitasi misalnya dalam bentuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang mengalami defisit hasil pertanian terutama untuk komoditas-komoditas tanaman pangan dan hortikultura di mana NTB masih menjadi sentra produksi terbesar di Indonesia. Fasilitas dalam bentuk bantuan modal kerja juga masih diperlukan sejalan dengan munculnya berbagai risiko produksi sehingga petani dapat memperoleh insentif atau margin untuk mencukupi biaya hidup secara keseluruhan akibat biaya pengeluaran konsumsi rumah tangga petani yang juga terus meningkat.

6.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI NTB

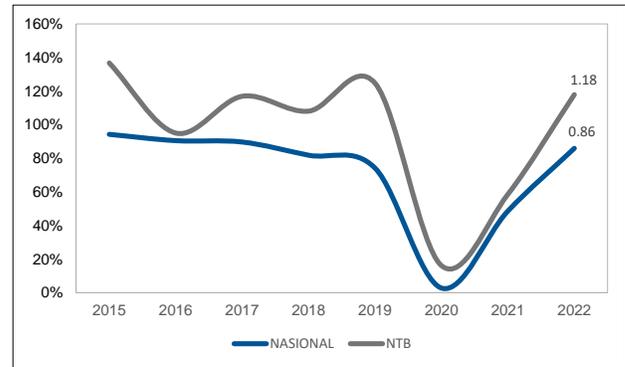
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan nasional. IPM Provinsi NTB tumbuh 1,18% (yoy) pada tahun 2022, lebih tinggi dari pertumbuhan IPM nasional yang sebesar 0,86% (yoy). Secara umum, tren pertumbuhan IPM Provinsi NTB dari tahun ke tahun selalu di atas tren pertumbuhan IPM nasional. Secara spasial, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat IPM Kabupaten dan kota di Provinsi

NTB. Pada 2022, terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dari total 10 (sepuluh) kabupaten/kota di Provinsi NTB yang masuk pada level IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$). Ketiga kabupaten/kota tersebut antara lain Kota Mataram (79,59), Kota Bima (76,84), dan Kabupaten Sumbawa Barat (72,65). Sementara 7 (tujuh) kabupaten lainnya masuk pada level IPM sedang ($60 \leq \text{IPM} \leq 70$). Ke depan, pemerintah perlu mengupayakan penguatan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.12 IPM Provinsi NTB dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.13 Pertumbuhan IPM Provinsi NTB dan Nasional

Kualitas hidup layak Provinsi NTB tahun 2022 yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 namun masih lebih rendah dibandingkan nasional. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat NTB mencapai Rp 10,68 juta/tahun atau tumbuh 2,89% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar Rp 10,38 juta/tahun, meskipun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan pengeluaran per kapita secara nasional pada tahun 2022 yang tercatat mencapai Rp 11,48 juta/tahun.

BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,4% – 7,2% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,30% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan perekonomian didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, serta Ekspor Luar Negeri (LN) yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh kenaikan ekspor konsentrat tembaga. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekspektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama, kecuali LU Konstruksi yang masih tertahan pasca penyelesaian sejumlah proyek strategis pada tahun 2021.

Selanjutnya tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun 2021, serta lebih tinggi dari batas atas target inflasi nasional 3% +/- 1% (yoy). Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan seiring dengan recovery ekonomi, kenaikan harga komoditas pangan baik yang didorong oleh gangguan pasokan dalam negeri maupun disrupsi rantai pangan global akibat ketegangan geopolitik Russia-Ukraina, serta kenaikan harga energi global. Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi terutama terjadi pada kelompok komoditas volatile foods (VF) dan kelompok administered prices (AP).

Pada tahun 2023, perekonomian Provinsi NTB diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,8% - 5,6% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didukung oleh peningkatan kinerja PMTB sejalan dengan berlangsungnya pembangunan smelter perusahaan tambang utama di Provinsi NTB. Sementara dari sisi LU, pertumbuhan terutama didukung oleh peningkatan kinerja LU Konstruksi dan LU Perdagangan. Pertumbuhan lebih lanjut relatif tertahan oleh perlambatan kinerja LU Pertambangan yang utamanya dipengaruhi oleh faktor base effect. Selanjutnya, inflasi Provinsi NTB pada tahun 2023 diperkirakan akan melandai dan berada pada rentang target inflasi nasional 3%±1% (yoy).

7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTB

7.1.1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

Perekonomian Provinsi NTB diprakirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, peningkatan terutama didorong oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, serta Ekspor Luar Negeri (LN) yang diproyeksikan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi secara umum, serta didukung oleh kenaikan target produksi dan ekspor konsentrat tembaga dari perusahaan tambang. Dari sisi lapangan usaha (LU), proyeksi peningkatan utamanya didukung oleh ekpektasi kenaikan kinerja pada seluruh LU utama, kecuali LU Konstruksi yang diprakirakan masih tertahan pasca penyelesaian sejumlah proyek strategis pada tahun 2021. LU Pertanian diprakirakan meningkat sejalan dengan kenaikan produktivitas yang didukung oleh kondisi cuaca yang lebih baik. LU Pertambangan diproyeksikan meningkat seiring dengan ekspektasi perbaikan *recovery rate* dibandingkan tahun 2021. LU Konstruksi diproyeksikan akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2021 seiring dengan telah selesainya pembangunan sejumlah proyek strategis dengan nilai signifikan seperti Sirkuit Mandalika, proyek-proyek di Bandara Internasional Lombok (BIL), serta jalan *by-pass* BIL-Mandalika. Penurunan lebih dalam relatif tertahan oleh masih berlanjutnya konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan-bendungan di Provinsi NTB, serta konstruksi infrastruktur pendukung di KEK Mandalika. Selanjutnya LU Perdagangan dan LU Transportasi diprakirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Provinsi NTB.

Konsumsi Rumah Tangga diproyeksikan akan mengalami peningkatan sejalan dengan ekspektasi perbaikan daya beli masyarakat di tahun 2022. Sampai dengan triwulan III 2022 Konsumsi Rumah Tangga masih menunjukkan tren perbaikan dengan catatan pertumbuhan 3,10% (yoy) pada triwulan II 2022 dan 4,34% (yoy) pada triwulan III 2022. Optimisme peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2022 secara keseluruhan didukung oleh indikator daya beli masyarakat sebagaimana tercermin pada hasil Survei Konsumen. Pada Survei Konsumen, optimisme ditunjukkan oleh posisi indeks yang berada di angka 100 atau lebih tinggi. Di sepanjang tahun 2022 (Januari-November 2022), rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat sebesar 119,33 dan 140,29, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 97,41 dan 124,88.

Ekspektasi perbaikan daya beli juga relatif sejalan dengan perkiraan pertumbuhan penjualan pelaku usaha di tahun 2022. Berdasarkan hasil *liaison*, rata-rata *likert scale* perkiraan penjualan untuk tahun 2022 tercatat sebesar 1,48, meningkat dibandingkan *likert scale* penjualan di tahun 2021 yang rata-rata sebesar 0,57 sejalan dengan perbaikan ekonomi di tahun 2022. Secara umum, *contact liaison* memproyeksikan bahwa kinerja penjualan pada tahun 2022 akan cenderung meningkat seiring dengan perbaikan pengendalian COVID-19 yang didukung oleh perluasan target vaksinasi serta pemberian vaksinasi *booster* secara bertahap. Selain itu, relaksasi pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat, serta normalisasi jam operasional usaha yang lebih panjang juga diperkirakan akan mendukung peningkatan aktivitas ekonomi. Secara khusus, pelaksanaan *event-event* internasional seperti MotoGP, World Super Bike, dan MXGP diperkirakan akan turut mendorong peningkatan penjualan pelaku usaha.

Optimisme peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga turut didukung oleh tren perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat mengalami penurunan dari 3,01% pada Agustus 2021 menjadi 2,89% pada Agustus 2022. Angka TPT Agustus 2022 juga terpantau lebih rendah dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,28% sehingga mengindikasikan bahwa kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Optimisme membaiknya kondisi ketenagakerjaan juga didukung oleh tren perbaikan indeks *job vacancy* yang telah kembali ke level positif. Pada triwulan III 2022 indeks *job vacancy* tercatat tumbuh 38,78% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 32,46% (yoy).

Perkembangan sejumlah indikator seperti mobilitas masyarakat, omset penjualan eceran, serta SBT kegiatan usaha LU Perdagangan di sepanjang tahun 2022 juga masih mengindikasikan adanya peningkatan. *Google Mobility Index* di sektor *retail and recreation* pada tahun 2022 (Januari-Oktober 2022) menunjukkan indeks rata-rata pergerakan masyarakat di level 23,22, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2021 yang sebesar -1,94. Mobilitas pada sektor *grocery and pharmacy* pada tahun 2022 (Januari-Oktober 2022) juga tercatat pada level 46,80, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang hanya pada level 19,80. Selanjutnya berdasarkan data Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KPw BI NTB, omset penjualan di sepanjang tahun 2022 (Januari-November 2022) mengalami pertumbuhan 100,16% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021. Hasil Survei Kegiatan Usaha (SKDU) yang juga dilakukan oleh KPw BI NTB menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) LU Perdagangan mengalami peningkatan dari 6,05% pada triwulan III 2022 menjadi 9,15% pada perkiraan triwulan IV 2022.

Kinerja PMTB pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih rendah paska penyelesaian sejumlah proyek strategis. Pada tahun 2021, pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Sirkuit Mandalika, proyek-proyek BIL (perluasan terminal, perpanjangan *runway*, penambahan *apron* dan fasilitas *cargo*), serta jalan *by-pass* BIL-Mandalika relatif menopang pertumbuhan kinerja PMTB di Provinsi NTB. Pasca penyelesaian proyek-proyek tersebut, kinerja PMTB di tahun 2022 relatif mengalami penurunan.

Namun demikian, penurunan lebih dalam relatif tertahan oleh masih berlanjutnya konstruksi Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan-bendungan di Provinsi NTB, serta proyek Mandalika Urban Tourism Infrastructure Project (MUTIP) di KEK Mandalika. Pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) PSN bendungan yang masih berlanjut yaitu Bendungan Beringin Sila dan Bendungan Meninting masing-masing senilai Rp1,7 triliun dan Rp1,4 triliun yang ditargetkan selesai Desember 2022, serta Bendungan Tiu Suntuk senilai Rp1,2 Triliun yang ditargetkan selesai Desember 2023. Sementara untuk konstruksi MUTIP di KEK Mandalika dengan estimasi anggaran sebesar Rp3,6 triliun telah memasuki masa konstruksi sejak tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023. Selanjutnya untuk kinerja investasi dari sektor swasta di luar perusahaan tambang diperkirakan masih akan terbatas sejalan dengan hasil *liaison* di mana sebagian pelaku usaha masih mengemukakan *stance wait-and-see*, sebelum menetapkan rencana investasi untuk periode setahun yang akan datang. Berdasarkan hasil *liaison*, rata-rata *likert scale* perkiraan investasi untuk tahun 2022 tercatat sebesar 0,78, tumbuh terbatas dibandingkan *likert scale* investasi di tahun 2021 yang sebesar 0,68.

Secara khusus, proyek *smelter* dari perusahaan tambang utama di Provinsi NTB diproyeksikan akan turut menopang kinerja PMTB, baik dari aktivitas konstruksi maupun pengadaan mesin dan peralatan. Pada tahun 2021 proses *tender* untuk proyek konstruksi *smelter* telah dilaksanakan dan telah ditetapkan pelaksana pekerjaan. Namun demikian, proses konstruksi proyek *smelter* diperkirakan baru akan dimulai pada awal tahun 2023. Adapun progres pembangunan *smelter* telah mencapai 47,40% (per Juli 2022). Sesuai rencana, *smelter* akan memiliki kapasitas input sebesar 900.000 *Tonnes Per Annum* (TPA) dan kapasitas *output* sebesar 222 ribu ton katoda tembaga/tahun.

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh terbatas. Pada tahun 2022 pagu belanja pada APBN di Provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 6,23% (yoy) dan pagu APBD Provinsi NTB serta seluruh Kabupaten/Kota di NTB untuk tahun 2022 tumbuh terbatas 0,02% (yoy). Pada triwulan III 2022, kinerja Konsumsi Pemerintah tercatat tumbuh sebesar 0,51% (yoy), membaik setelah berkontraksi di triwulan II 2022. Sejalan dengan perkembangan pengendalian

COVID-19 yang semakin membaik serta didukung dengan kebijakan relaksasi pembatasan mobilitas dan penyelenggaraan *event*, kinerja Konsumsi Pemerintah diperkirakan akan semakin meningkat, di antaranya melalui realisasi belanja dan penyelenggaraan berbagai rapat dan aktivitas pemerintahan.

Pada tahun 2022 kinerja Ekspor LN diperkirakan akan mengalami peningkatan. Kinerja ekspor NTB sangat dipengaruhi oleh ekspor konsentrat tembaga yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan. Per Maret 2022, perusahaan tambang utama di NTB mendapatkan kuota ekspor sebesar 989.001 WMT, mengalami kenaikan 70,68% dibandingkan kuota ekspor tahun sebelumnya yang sebesar 579.444 WMT. Peningkatan kuota ekspor ini sejalan dengan meningkatnya target produksi konsentrat tembaga yang didukung oleh perbaikan *recovery rate*. Secara khusus, fokus penjualan perusahaan tambang utama di Provinsi NTB pada tahun 2022 diperkirakan masih sepenuhnya ditujukan untuk pasar ekspor. Sebelumnya pada tahun 2020 terdapat penjualan ke pasar domestik seiring dengan belum pulihnya pasokan konsentrat tembaga dari perusahaan tambang di Provinsi Papua. Namun, seiring dengan normalisasi pasokan perusahaan tambang di Provinsi Papua untuk pasar domestik paska *shifting* dari *open-pit* ke *underground mining*, penjualan perusahaan tambang utama di Provinsi NTB kembali difokuskan ke pasar ekspor sejak tahun 2021.

Dari sisi *demand*, potensi permintaan ekspor komoditas tembaga pada tahun 2022 diproyeksikan masih relatif baik. Hal ini turut didukung oleh harga komoditas tembaga yang masih tinggi serta mulai pulihnya permintaan dari pasar luar negeri seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan rilis dari *London Metal Exchange* (LME), indeks harga tembaga global pada triwulan IV 2022 (rata-rata Oktober-November 2022) tercatat sebesar \$352,59/pound, sedikit meningkat dibandingkan rata-rata harga triwulan III 2022 yang sebesar \$351,95/pound, namun lebih rendah dibandingkan harga tahun 2021. Sebagai informasi, harga tembaga global sempat mencapai harga tertinggi (*all time high*) pada Mei 2021. Meski harga komoditas global saat ini cenderung melandai seiring dampak ketegangan geopolitik di Russia Ukraina, harga komoditas tembaga diperkirakan masih akan tinggi sejalan dengan kebutuhan tembaga yang terus meningkat sebagai bahan pendukung sistem energi terbarukan.

Kinerja impor pada tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Hal ini utamanya sejalan dengan peningkatan kebutuhan material dan/atau mesin-mesin serta peralatan penunjang untuk mendukung optimalisasi perluasan kapasitas tambang serta persiapan pembangunan *smelter* perusahaan tambang di Kabupaten Sumbawa Barat yang diperkirakan membutuhkan *import content* relatif tinggi. Lebih lanjut, adanya konstruksi proyek MUTIP di KEK Mandalika serta kenaikan kuota

impor *raw cane sugar* untuk pelaku industri gula yang berlokasi di Kabupaten Dompu juga diperkirakan akan mendorong kenaikan impor. Kenaikan impor lebih lanjut diperkirakan akan tertahan oleh masih terbatasnya impor barang modal dari sektor swasta lainnya sejalan dengan *stance wait-and-see* pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, LU Pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2022. Kinerja LU pertanian diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2022 seiring dengan ekspektasi meningkatnya hasil produksi komoditas-komoditas utama sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA), produksi padi (GKG) untuk tahun 2022 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 22,63% (yoy), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 8,49% (yoy). Lebih lanjut, produksi jagung berdasarkan data KSA juga diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 6,82% (yoy). Secara umum, perbaikan kondisi ekonomi, serta penyelenggaraan berbagai *event* internasional seperti MotoGP dan *World Super Bike* diperkirakan akan turut meningkatkan *demand* bahan makanan dan produk-produk pertanian di tahun 2022.

LU Pertambangan pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Sepanjang tahun 2021, kinerja LU Pertambangan secara umum menunjukkan penurunan kinerja seiring dengan kualitas batuan ore dan *recovery rate* yang tidak sebaik tahun 2020. Tingkat kekerasan lapisan batuan, terutama pada triwulan III dan IV 2021, cenderung lebih tinggi sehingga menghambat proses penggilingan (*crushing and grinding*). Namun, untuk tahun 2022 kinerja LU Pertambangan diperkirakan akan kembali meningkat seiring dengan membaiknya kualitas batuan ore serta *recovery rate*. Target produksi konsentrat tembaga pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan, dengan orientasi penjualan masih ditujukan pada pasar ekspor seiring terbatasnya permintaan domestik. Secara khusus, harga komoditas tembaga di pasar global yang masih relatif tinggi serta mulai pulihnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan diharapkan dapat mendukung optimalisasi kinerja LU Pertambangan.

Pada tahun 2022 kinerja LU Perdagangan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ekspektasi perbaikan mobilitas masyarakat serta penyelenggaraan berbagai *event* internasional. Berdasarkan hasil Survei Konsumen, di sepanjang tahun 2022 (Januari-November 2022), rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat sebesar 120,22 dan 141,37, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 97,41 dan 124,88.

Hal ini mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat telah semakin membaik sehingga turut menopang peningkatan kinerja LU Perdagangan.

Selain itu, hasil *liaison* juga mengindikasikan adanya peningkatan perkiraan penjualan di tahun 2022. Rata-rata *likert scale* perkiraan penjualan untuk tahun 2022 tercatat sebesar 1,48, meningkat dibandingkan *likert scale* penjualan di tahun 2021 yang rata-rata sebesar 0,57 sejalan dengan perbaikan ekonomi di tahun 2022. Secara umum, *contact liaison* memproyeksikan bahwa kinerja penjualan pada tahun 2022 akan cenderung meningkat seiring dengan perbaikan pengendalian COVID-19, relaksasi pembatasan sosial serta normalisasi jam operasional usaha yang lebih panjang, serta penyelenggaraan *event-event* internasional.

Perkembangan sejumlah indikator seperti mobilitas masyarakat, omset penjualan eceran, serta SBT kegiatan usaha LU Perdagangan di sepanjang tahun 2022 juga masih mengindikasikan adanya peningkatan. *Google Mobility Index* di sektor *retail and recreation* pada tahun 2022 (Januari-Oktober 2022) menunjukkan indeks rata-rata pergerakan masyarakat di level 23,22, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2021 yang sebesar -1,94. Mobilitas pada sektor *grocery and pharmacy* pada tahun 2022 (Januari-Oktober 2022) juga tercatat pada level 46,80, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang hanya pada level 19,80. Selanjutnya berdasarkan data Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KPw BI NTB, omset penjualan di sepanjang tahun 2022 (Januari-November 2022) mengalami pertumbuhan 100,16% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021. Hasil Survei Kegiatan Usaha (SKDU) yang juga dilakukan oleh KPw BI NTB menunjukkan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) LU Perdagangan mengalami peningkatan dari 6,05% pada triwulan III 2022 menjadi 9,15% pada perkiraan triwulan IV 2022.

LU Konstruksi diperkirakan akan mengalami penurunan kinerja pada tahun 2022 paska penyelesaian sejumlah proyek strategis. Pada tahun 2021, pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Sirkuit Mandalika, proyek-proyek BIL (perluasan terminal, perpanjangan *runway*, penambahan *apron* dan fasilitas *cargo*), serta jalan *by-pass* BIL-Mandalika relatif menopang pertumbuhan kinerja LU Konstruksi di Provinsi NTB. Paska penyelesaian proyek-proyek tersebut, kinerja LU Konstruksi di tahun 2022 relatif mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan lebih dalam relatif tertahan oleh masih berlanjutnya konstruksi PSN bendungan-bendungan di Provinsi NTB, serta proyek Mandalika *Urban Tourism Infrastructure Project* (MUTIP) di KEK Mandalika. Secara khusus, proyek konstruksi *smelter* dari perusahaan tambang utama di Provinsi NTB sebelumnya diperkirakan akan dapat menopang kinerja LU Konstruksi pada tahun 2022. Namun, proses

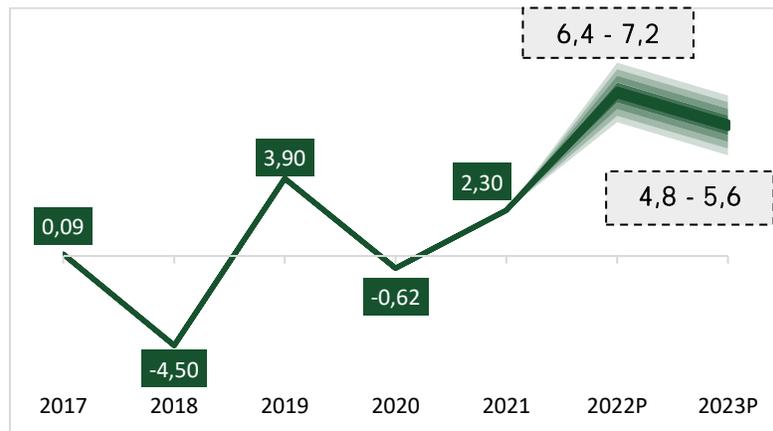
konstruksi yang awalnya diperkirakan telah dimulai pada pertengahan tahun, berdasarkan perkembangan lebih lanjut baru akan dimulai pada awal tahun 2023.

LU Transportasi diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022 didukung oleh perbaikan mobilitas masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan internasional. Perkembangan jumlah kasus COVID-19 yang sempat melonjak akibat penyebaran varian Omicron, mulai melandai pada akhir Februari 2022. Pengendalian COVID-19 ke depannya diperkirakan akan semakin membaik dengan didukung oleh perluasan vaksinasi 2 (dua) dosis serta program *booster* untuk masyarakat. Dengan perkembangan pengendalian COVID-19 yang semakin baik, kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat akan semakin dilonggarkan. Per 1 Maret 2022, kewajiban karantina untuk penumpang internasional ditetapkan menjadi hanya 3 (tiga) hari, setelah sebelumnya sempat berlaku kewajiban karantina selama 10 (sepuluh) hari. Per 1 April 2022, kewajiban karantina telah sepenuhnya ditiadakan. Adanya relaksasi pembatasan mobilitas serta penyelenggaraan *event* internasional seperti *MotoGP*, *Road to Tour de France*, dan *World Super Bike*, diperkirakan akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Provinsi NTB pada tahun 2022. Namun demikian, tingginya harga tiket angkutan udara akibat semakin tingginya harga avtur serta pemberlakuan kebijakan *fuel surcharge* pada maskapai berpotensi menahan peningkatan kinerja LU Transportasi lebih lanjut.

7.1.2. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

Perekonomian Provinsi NTB pada tahun 2023 diperkirakan masih akan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi namun cenderung melandai dibandingkan tahun 2022. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh kinerja PMTB yang diperkirakan akan meningkat relatif signifikan seiring dengan pembangunan *smelter* perusahaan tambang utama di Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, Kinerja Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan lebih lanjut relatif tertahan oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri yang melandai, serta Impor Luar Negeri yang mengalami peningkatan signifikan sejalan dengan pembangunan *smelter*. Dari sisi lapangan usaha (LU), LU Pertanian diperkirakan akan tumbuh terbatas utamanya dipengaruhi oleh kondisi cuaca. LU Pertambangan diperkirakan akan melandai seiring dengan melambatnya pertumbuhan target produksi perusahaan tambang di tahun 2023. Meski secara volume target produksi di tahun 2023 masih tercatat tinggi, namun terdapat pengaruh *base-effect* dari kinerja produksi tahun 2021 yang tinggi sehingga pertumbuhan di tahun

2023 cenderung melandai. Selanjutnya untuk LU Perdagangan dan LU Transportasi diperkirakan juga akan mengalami perlambatan, namun untuk LU Konstruksi diperkirakan akan mengalami peningkatan relatif signifikan utamanya didorong oleh pembangunan *smelter* perusahaan tambang.



Sumber : BPS Provinsi NTB dan *Staff estimated*, diolah

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Prov. NTB Tahunan

7.1.3. Risiko Pertumbuhan Ekonomi

Ke depan, terdapat hal-hal yang berpotensi menarik ke bawah atau mendorong proyeksi pertumbuhan menjadi bias ke atas. Adapun risiko pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain:

Tabel 7.5
Risiko Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTB

No	Risiko	Sifat Risiko
1	<i>Demand</i> produk pertanian yang lebih stabil pada masa <i>recovery</i>	<i>Upside</i>
2	Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca pada tahun 2022 tidak dipengaruhi El Nino ataupun La Nina sehingga mendukung produksi pertanian yang lebih optimal	<i>Upside</i>
3	Peningkatan aktivitas ekonomi sejalan dengan perluasan vaksinasi 2 dosis dan program <i>booster</i> di tahun 2022	<i>Upside</i>
4	Peningkatan produksi konsentrat tembaga seiring perbaikan kualitas batuan ore dan <i>recovery rate</i>	<i>Upside</i>

No	Risiko	Sifat Risiko
5	Peningkatan <i>demand</i> konsentrat tembaga sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi di negara tujuan ekspor	<i>Upside</i>
6	Peningkatan pagu belanja pemerintah untuk tahun 2022	<i>Upside</i>
7	Pelaksanaan pembatasan mobilitas pada awal tahun seiring meluasnya penyebaran varian Omicron	<i>Downside</i>
8	Kembali meningkatnya penyebaran Covid-19 apabila terdapat varian baru	<i>Downside</i>
9	<i>Recovery</i> daya beli yang masih terbatas dapat menahan peningkatan aktivitas ekonomi/pariwisata	<i>Downside</i>
10	Pembangunan <i>smelter</i> perusahaan tambang baru akan dimulai awal tahun 2023	<i>Downside</i>
11	<i>Stance wait-and-see</i> pelaku usaha yang masih menahan kebijakan investasi	<i>Downside</i>

7.2 PRAKIRAAN INFLASI PROVINSI NTB

7.2.1 Prakiraan Inflasi Tahun 2022

Tekanan inflasi untuk keseluruhan tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, serta berada di atas batas atas target inflasi nasional 3% +/- 1% (yoy). Hal ini terutama sejalan dengan ekspektasi peningkatan kinerja perekonomian di tahun 2022 sehingga *demand* akan cenderung lebih tinggi, kenaikan harga komoditas pangan akibat gangguan pasokan, serta kenaikan harga energi global. Secara umum, peningkatan tekanan inflasi di Provinsi NTB juga sejalan dengan kenaikan tekanan inflasi baik di tingkat nasional maupun global. Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. Lebih lanjut, kenaikan harga komoditas pangan dalam negeri juga turut dipengaruhi oleh disrupsi pasokan, khususnya untuk komoditas aneka cabai dan bawang merah, akibat gagal panen di sejumlah sentra produksi di Pulau Jawa pada semester I 2022.

Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi terjadi pada kelompok komoditas *volatile foods* (VF), kelompok *administered prices* (AP), dan kelompok *core inflation* (CI). Meningkatnya harga komoditas pangan secara langsung mendorong kenaikan tekanan inflasi pada kelompok *volatile food* (VF). Lebih lanjut, *recovery* ekonomi sejalan dengan kondisi pandemi yang

semakin membaik diperkirakan akan mendorong permintaan sehingga turut memberikan tekanan pada kelompok VF dan CI. Sementara itu, tekanan untuk kelompok *administered prices* (AP) pada tahun 2022 juga relatif menguat seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan LPG, tarif cukai rokok, Tarif Dasar Listrik (TDL), serta pengurangan sejumlah subsidi.

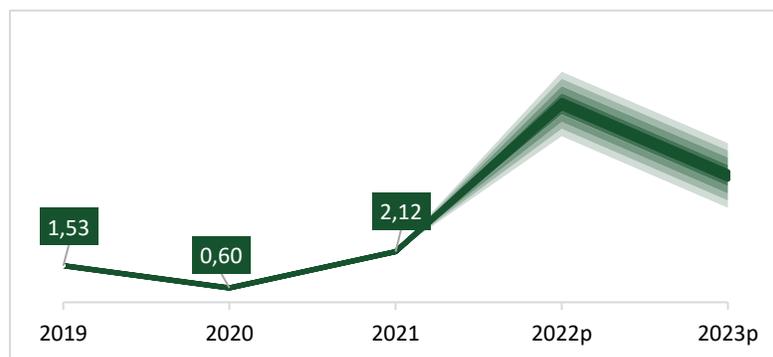
Secara umum, permintaan komoditas bahan makanan maupun non bahan makanan diperkirakan akan meningkat seiring dengan ekspektasi peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Meningkatnya aktivitas pariwisata, MICE, serta penyelenggaraan *event* besar seperti MotoGP dan *World Super Bike* diperkirakan mendorong *demand* untuk bahan makanan. Selain pemenuhan di Provinsi NTB, stok bahan pangan NTB juga dipengaruhi oleh permintaan dari luar daerah. Perkembangan pengendalian COVID-19 yang semakin membaik diperkirakan akan mendorong perbaikan mobilitas serta meningkatkan *demand* dari luar daerah.

Risiko tekanan dari kelompok komoditas VF masih perlu menjadi perhatian pada tahun 2022. Meski Provinsi NTB merupakan daerah sentra produksi pertanian, tekanan inflasi dari kelompok VF masih cukup *persistent*. Kondisi ini salah satunya diakibatkan oleh belum meratanya sebaran *output* produksi di sepanjang tahun karena metode produksi yang masih tradisional dan sangat rentan terhadap pengaruh cuaca. Selain itu, untuk komoditas seperti minyak goreng dan produk turunan kedelai seperti tahu tempe sempat memberikan tekanan khususnya di awal tahun seiring dengan meningkatnya harga *raw material* di pasar global. Lebih lanjut, adanya gagal panen komoditas aneka cabai serta bawang merah di sejumlah sentra di Pulau Jawa pada triwulan II 2022 turut memicu kenaikan pengiriman komoditas ke luar daerah sehingga mengurangi ketersediaan pasokan di Provinsi NTB dan memberikan tekanan inflasi yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) di bulan November 2022, beberapa komoditas yang masih berpotensi memberikan tekanan inflasi di antaranya tomat, bawang merah, beras, dan ikan-ikanan.

Pada kelompok AP, tekanan harga diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2021. Sepanjang tahun 2022, tekanan dari kelompok AP cenderung meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan LPG, tarif cukai rokok, peningkatan TDL, serta pengurangan sejumlah subsidi. Sampai dengan November 2022, tarif angkutan udara telah mengalami kenaikan signifikan dan menjadi salah satu penyumbang inflasi utama di sepanjang tahun 2022. Harga BBM juga telah mengalami kenaikan seiring dengan lonjakan harga minyak dunia yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh meningkatnya tensi di Russia dan Ukraina, serta posisi Russia sebagai salah satu produsen utama untuk komoditas ini. Kenaikan harga

BBM memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap inflasi secara keseluruhan mengingat dampak yang timbul tidak hanya dampak langsung namun juga dampak tidak langsung seperti kenaikan biaya transportasi, biaya logistik, serta biaya produksi untuk sejumlah aktivitas yang menggunakan bahan bakar sebagai sumber energi.

Tekanan inflasi dari kelompok CI pada tahun 2022 juga diperkirakan akan mengalami **peningkatan**. Hal ini seiring peningkatan aktivitas ekonomi yang diperkirakan mendorong *demand* untuk makanan jadi, pakaian, maupun alas kaki. Secara khusus, harga komoditas emas sebelumnya telah melandai di akhir tahun 2021 seiring dengan mulai meredanya ketidakpastian global yang didukung dengan perkembangan pengendalian COVID-19 yang semakin membaik. Namun demikian, adanya ketegangan geopolitik antara Russia dan Ukraina kembali meningkatkan ketidakpastian global sehingga harga komoditas emas kembali meningkat seiring dengan tendensi pembelian emas sebagai *safe haven* investasi. Lebih lanjut, peningkatan aktivitas ekonomi serta telah dimulainya pembelajaran tatap muka seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang semakin membaik memberikan dampak peningkatan tekanan inflasi untuk sejumlah komoditas seperti sewa rumah, kontrak rumah, biaya pendidikan, serta bahan/material konstruksi.



Sumber : BPS Provinsi NTB dan *Staff estimated*, diolah

Grafik 7.2 Proyeksi Inflasi NTB

7.2.2. Prakiraan Inflasi Tahun 2023

Tekanan inflasi untuk tahun 2023 diperkirakan akan melandai dibandingkan tahun 2022, serta kembali ke rentang target inflasi nasional 3% +/- 1% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, kelompok AP diperkirakan akan melandai paska penyesuaian sejumlah tarif/harga di tahun 2022. Harga minyak global pada tahun 2023 diperkirakan akan melandai sehingga mengurangi risiko penyesuaian harga BBM lanjutan. Namun demikian, masih terdapat risiko disrupsi pasokan yang dapat kembali mendorong kenaikan harga, seiring masih berlanjutnya konflik geopolitik Russia-Ukraina. Lebih lanjut, pada tahun 2023, pemerintah akan kembali menaikkan tarif cukai rokok sehingga diperkirakan akan memberikan sumbangan inflasi untuk rokok yang sebagaimana historis akan ditransmisikan oleh pedagang secara bertahap di sepanjang tahun. Dari sisi VF, kondisi cuaca yang kondusif, tidak dipengaruhi El Nino maupun La Nina, diharapkan dapat mendukung ketersediaan pasokan bahan pangan strategis dan menurunkan tekanan inflasi dari kelompok ini. Selain itu, penyaluran bantuan pupuk bersubsidi diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, tekanan dari kelompok CI berpotensi mengalami peningkatan tekanan seiring dengan perbaikan permintaan, khususnya di sektor pariwisata.

7.2.3. Risiko Inflasi

Adapun beberapa risiko inflasi yang perlu menjadi perhatian bersama di antaranya :

Tabel 7.2
Risiko Inflasi di Provinsi NTB

No	Risiko	Sifat Risiko
1	Produksi hasil pertanian yang lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mendukung ketersediaan pasokan	<i>Downside Risk</i>
2	Pemberlakuan pembatasan mobilitas apabila terdapat kenaikan kasus COVID-19	<i>Downside Risk</i>
3	Peningkatan pengiriman komoditas pangan ke luar daerah sehingga mengurangi ketersediaan pasokan di Provinsi NTB	<i>Upside Risk</i>
4	Potensi peningkatan permintaan bahan makanan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas pariwisata	<i>Upside Risk</i>
5	Peningkatan harga komoditas pangan dan energi global akibat ketegangan geopolitik antara Russia dan Ukraina	<i>Upside Risk</i>

6	Kebijakan pemerintah untuk menghentikan/mengurangi subsidi listrik dan bahan bakar	<i>Upside Risk</i>
7	Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tarif cukai rokok, rencana kenaikan harga BBM	<i>Upside Risk</i>